



# PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para *stakeholders* dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai total realisasi pendapatan periode berkenaan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah mendanai seluruh aktivitasnya serta mencukupi kebutuhan kasnya dalam periode berkenaan.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat aktivitas yang dilakukan selama periode pelaporan.

### 2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

- Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).
- c. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- e. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
- n. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- o. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- p. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung T.A. 2023.
- q. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung T.A. 2023.
- r. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2022.
- s. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- t. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung T.A. 2023.
- u. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung T.A. 2023.
- v. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- w. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Bandar Lampung.

**3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

**BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN  
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD KOTA BANDAR LAMPUNG**

1. Kondisi Ekonomi Makro
2. Kebijakan Keuangan/Fiskal
3. Pencapaian Target Kinerja APBD Kota Bandar Lampung

**BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

**BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

**BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
3. Penjelasan Pos-Pos Neraca Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

**BAB VI PENUTUP**



**BAB II**  
**KONDISI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN**  
**PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**  
**KOTA BANDAR LAMPUNG**

**1) Kondisi Ekonomi Makro**

Perkembangan ekonomi makro Kota Bandar Lampung mengalami *trend* positif dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi perekonomian suatu daerah dapat diperoleh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku.

PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor akan dapat memberikan gambaran untuk mengukur sampai seberapa jauh keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian daerahnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi.

Selain itu, indikator yang sangat populer yang dapat diturunkan dari pendapatan regional atas dasar harga berlaku adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk yang akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk atau masyarakat.

Perkembangan masing-masing Indikator Ekonomi Makro Kota Bandar Lampung yang telah dicapai selama kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

**a. Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah adalah melalui angka pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB riil) dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi tersebut atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi riil tercermin melalui laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PDRB atas dasar harga konstan adalah PDRB yang nilainya telah disesuaikan dengan perubahan harga. Dengan demikian, nilai PDRB atas dasar harga konstan dapat dibandingkan antar tahun. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan juga dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan sebaliknya, pertumbuhan yang negatif menunjukkan adanya penurunan perekonomian.

**Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandar Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 s.d. 2022 (*persen*)**

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,07	1,04	-0,70	-0,45	0,66
2	Pertambangan dan Penggalian	6,23	5,51	4,38	-4,43	2,74
3	Industri Pengolahan	6,12	6,95	-4,36	4,28	0,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,45	6,51	5,23	2,17	4,24
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,73	5,43	5,29	6,80	3,42
6	Konstruksi	9,91	5,56	0,01	4,51	2,65
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,19	6,09	-10,00	6,36	9,98
8	Transportasi dan Pergudangan	6,48	6,94	-4,26	2,41	17,20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,67	8,56	-12,38	0,46	12,19
10	Informasi dan Komunikasi	9,96	8,01	8,76	5,48	0,30
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,15	3,23	2,15	0,02	-1,99
12	Real Estat	7,16	5,83	-1,30	0,40	2,94
13	Jasa Perusahaan	4,59	4,41	-2,96	0,20	9,74
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,35	4,79	5,20	1,97	-1,35
15	Jasa Pendidikan	7,03	7,73	7,50	1,29	2,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,89	7,02	11,23	2,70	-0,12
17	Jasa Lainnya	7,78	7,84	-4,05	-1,60	15,11
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>6,20</b>	<b>6,17</b>	<b>-1,88</b>	<b>3,10</b>	<b>4,95</b>

\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2023

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut selain dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi juga terutama karena adanya kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

yang sinergis dalam rangka pemulihan pasca pandemi Covid-19 selama Tahun 2022 yang membuahkan hasil yang baik dimana setelah bernilai negatif pada Tahun 2020 maka pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung kembali positif pada Tahun 2021 dan mengalami peningkatan pada Tahun 2022. Nilai PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2022 atas dasar harga konstan 2010 mencapai sebesar 41.800,07 milyar rupiah. Angka tersebut naik dari Tahun 2021 yang mencapai sebesar 39.830,38 milyar rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2022 terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 yang mencapai sebesar 3,10%.

Bila pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, yaitu sebesar 6,80% maka pada Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yaitu sebesar 17,20%. Lebih lanjut, laju pertumbuhan kategori ini menguat dengan angka terbesar dari tahun-tahun sebelumnya karena adanya perubahan yang signifikan dari peningkatan mobilitas masyarakat mengingat pada waktu sebelumnya, hal ini dibatasi sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid-19, khususnya di Kota Bandar Lampung. Peningkatan pada Tahun 2022 ini juga sejalan dengan fakta meningkatnya permintaan tiket kereta api dan bis akibat diperbolehkannya melakukan mudik pada saat hari raya keagamaan.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua dicapai oleh lapangan usaha Jasa Lainnya, yaitu sebesar 15,11%. Banyaknya event yang diadakan di Kota Bandar Lampung selama Tahun 2022 berdampak pada peningkatan produksi, baik barang maupun jasa dalam kategori jasa perusahaan.

Kemudian pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yaitu sebesar 12,19%. Hal ini juga didorong oleh situasi saat ini yang memungkinkan masyarakat dapat menyelenggarakan perayaan terutama pernikahan secara lebih bebas dan dibebaskannya jam operasional tempat makan seperti restoran, cafe, dan lainnya. Sehingga masyarakat dapat berkumpul atau makan di tempat makan ataupun mengadakan acara di hotel dimana hal ini berimbas secara signifikan terhadap lapangan usaha Penyedia Akomodasi Makan dan Minum.



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

Dari tujuh belas lapangan usaha ekonomi yang ada, lima lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas 5%, sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di bawah 5% dan tiga lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif dari tahun sebelumnya. Lima lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di atas 5% tersebut adalah : lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 17,20%, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 15,11%, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,19%, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,98% dan lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 9,74%.

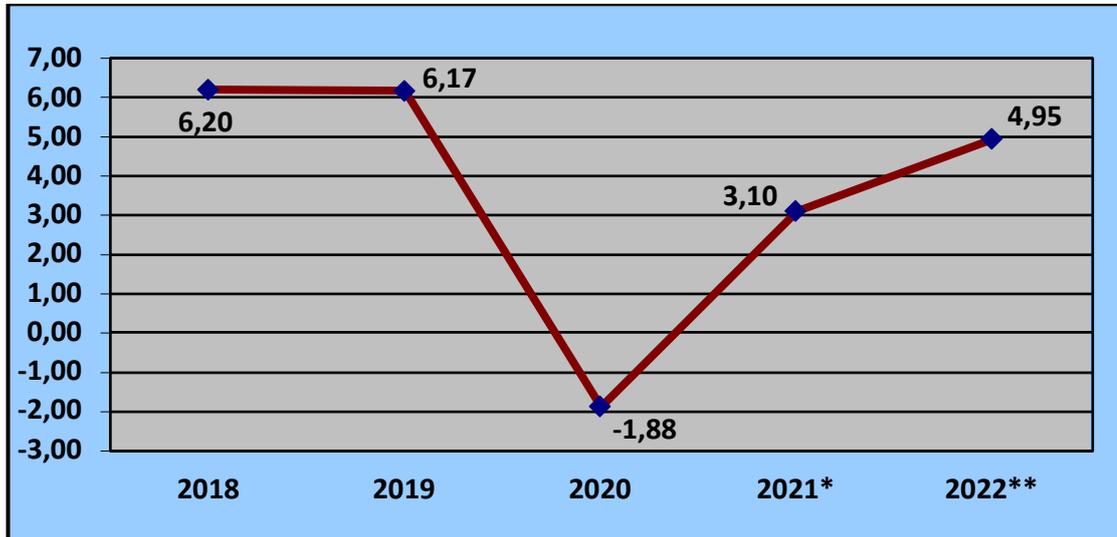
Selanjutnya, sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di bawah 5% adalah : lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,24%, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,42%, lapangan usaha Real Estat sebesar 2,94%, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 2,90%, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,74%, lapangan usaha Konstruksi sebesar 2,65%, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 0,86%, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,66% dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,30%.

Sedangkan tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif atau nilainya di bawah 0% adalah : lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar (0,12%), lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar (1,35%) dan lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar (1,99%).

Perekonomian Kota Bandar Lampung selama Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 terus mengalami pertumbuhan. Pada Tahun 2018, perekonomian Kota Bandar Lampung tumbuh menjadi sebesar 6,20%, Tahun 2019 tumbuh menjadi sebesar 6,17%, Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar (1,88%) dari tahun sebelumnya, Tahun 2021 tumbuh menjadi sebesar 3,10% dan terakhir Tahun 2022 tumbuh menjadi sebesar 4,95%.

Berikut dapat dilihat Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung :

**Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung Berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 s.d. 2022 (persen)**



\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2023

## **b. Struktur Ekonomi**

Struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha dalam suatu perekonomian. Dalam suatu wilayah, struktur ekonomi ini dapat diketahui melalui angka distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Dari angka distribusi PDRB tersebut terlihat besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa dimana hal ini sangat menentukan struktur ekonomi di suatu wilayah dan seberapa besar ketergantungan suatu wilayah terhadap kemampuan produksi setiap lapangan usaha. Lapangan usaha ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Selama Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, Struktur Perekonomian Kota Bandar Lampung didominasi oleh empat lapangan usaha, diantaranya : lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan lapangan



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

usaha Konstruksi. Selanjutnya kita akan melihat peranan dari masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bandar Lampung.

**Tabel 2.2. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandar Lampung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 s.d. 2022 (persen)**

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,85	3,68	3,76	3,71	3,52
2	Pertambangan dan Penggalian	3,36	3,34	3,56	3,32	3,26
3	Industri Pengolahan	21,18	21,27	20,84	21,09	19,88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,12	0,12	0,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,28	0,27	0,29	0,29	0,28
6	Konstruksi	11,06	10,95	10,98	11,41	11,26
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,15	14,44	13,34	13,80	14,94
8	Transportasi dan Pergudangan	13,65	13,54	13,29	13,14	15,22
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,85	2,90	2,57	2,49	2,60
10	Informasi dan Komunikasi	5,87	5,90	6,43	6,34	5,82
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,13	4,97	5,12	5,10	4,81
12	Real Estat	5,81	5,97	6,03	5,88	5,60
13	Jasa Perusahaan	0,36	0,36	0,35	0,34	0,37
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,66	5,51	5,92	5,75	5,28
15	Jasa Pendidikan	3,13	3,20	3,66	3,57	3,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,86	1,86	2,10	2,10	1,98
17	Jasa Lainnya	1,69	1,74	1,64	1,56	1,65
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara

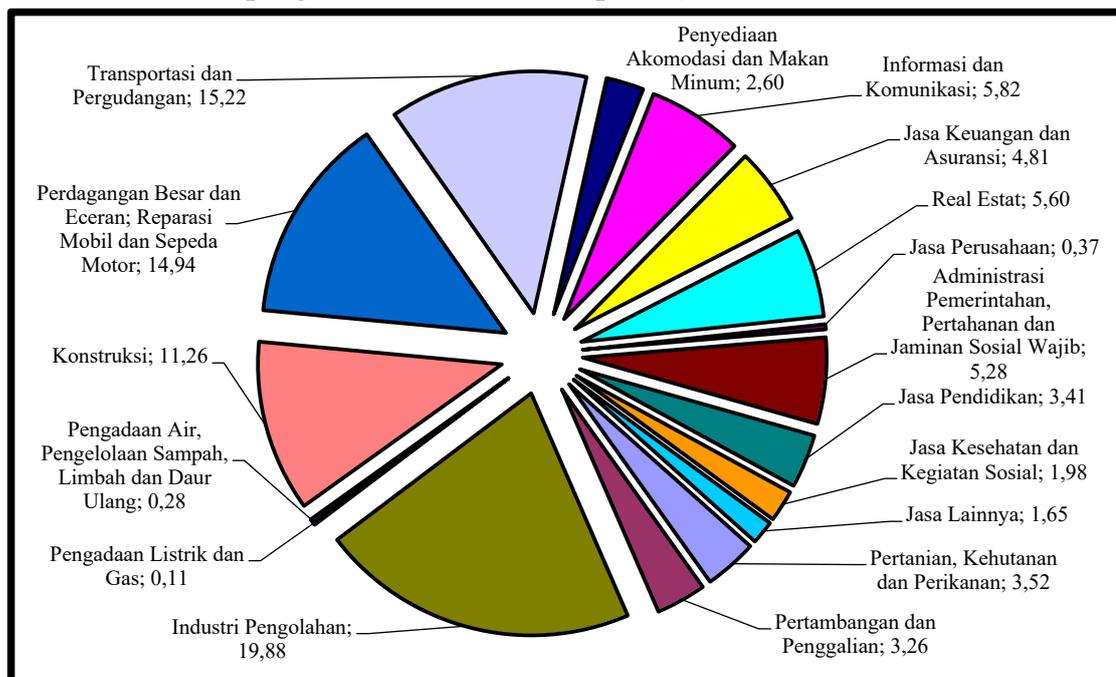
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2023

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 19,88%. Selanjutnya, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,22%, disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,94%. Berikutnya, lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,26%.

Dari tujuh belas lapangan usaha pembentuk perekonomian Kota Bandar Lampung, terdapat lima lapangan usaha yang peranannya relatif meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun kelima lapangan usaha tersebut antara lain : lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, lapangan usaha Jasa Lainnya dan lapangan usaha Jasa Perusahaan.

**Gambar 2.2. Struktur Perekonomian Kota Bandar Lampung Berdasarkan Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 (persen)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2023

Sebagai ibukota provinsi, perekonomian Kota Bandar Lampung maju dan berkembang cukup pesat secara signifikan didukung oleh lapangan usaha Industri Pengolahan. Jumlah industri di Kota Bandar Lampung secara kuantitas sangat banyak dan beraneka ragam, mulai dari industri makanan, barang-barang plastik atau pengepakan, olahan kayu, hingga industri alat-alat atau mesin, baik industri kecil dan rumah tangga, hingga industri berskala besar. Nilai tambah yang dihasilkan oleh lapangan usaha ini sangat besar sehingga kontribusinya terhadap nilai PDRB Kota Bandar Lampung cukup tinggi.

Selain lapangan usaha Industri Pengolahan pada Tahun 2022, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan menduduki lapangan usaha kedua dengan persentase kontribusi terbesar yang menyumbang Struktur Perekonomian Kota Bandar Lampung dengan nilai tambah sebesar 10,34 triliun rupiah atau setara dengan 15,22 persen dari total PDRB Kota Bandar Lampung. Apabila ditinjau dari tahun-tahun sebelumnya, lapangan usaha ini juga termasuk tiga besar kategori dengan persentase terbesar.



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

Sebagian besar kontribusi pada kategori lapangan usaha ini disumbang oleh subkategori angkutan darat, yaitu dengan persentase 12,25 persen. Hal tersebut didukung oleh data penumpang Stasiun Kereta Api Tanjung Karang dan jumlah penumpang DAMRI yang naik secara signifikan terutama pada cuti bersama Natal dan Tahun Baru. Hal tersebut tentunya berdampak pada pendapatan yang dihasilkan oleh sektor ini.

Sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Lampung, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam perekonomian Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022. Peningkatan yang cukup signifikan ini salah satunya dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan penjualan mobil baru dan *second* di Kota Bandar Lampung akibat melonjaknya permintaan. Hal tersebut juga berdampak pada meningkatnya harga mobil *second* di Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya, lapangan usaha Konstruksi juga memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pembentukan PDRB Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022. Adapun untuk lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, lapangan usaha Real Estat dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, ketiganya memberikan kontribusi di bawah 6% yang masing-masing berjumlah sebesar 5,82%, sebesar 5,60% dan sebesar 5,28%. Sementara itu, lapangan usaha lainnya hanya memberikan kontribusi yang nilainya di bawah 5% terhadap pembentukan PDRB Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022.

### c. Tingkat Inflasi/Deflasi PDRB

Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indeks yang menunjukkan tingkat perkembangan harga di tingkat produsen (*producer price index*). Peningkatan indeks harga implisit menunjukkan adanya kenaikan harga barang dan jasa dan sebaliknya, penurunan indeks harga implisit menunjukkan adanya penurunan harga barang dan jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perubahan tersebut merupakan inflasi yang didapat dari PDRB yang komponennya meliputi seluruh barang dan jasa yang ada dalam suatu perekonomian.



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Berikut adalah Data Indeks Harga Implisit PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 2.3. dan Gambar 2.3. di bawah ini, terlihat bahwa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, terdapat adanya kenaikan Indeks Harga Implisit PDRB Kota Bandar Lampung. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan harga produk unggulan di tingkat produsen yang berdampak pada kenaikan nilai jual produk.

**Tabel 2.3. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandar Lampung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 s.d. 2022**

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	141,18	144,88	148,17	153,31	159,56
2	Pertambangan dan Penggalian	178,93	182,42	185,37	188,81	199,59
3	Industri Pengolahan	154,03	156,80	159,70	161,95	167,15
4	Pengadaan Listrik dan Gas	107,30	109,65	109,07	111,65	114,44
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	152,64	153,26	153,89	155,41	157,64
6	Konstruksi	144,22	146,67	146,29	151,99	161,33
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	138,06	143,91	146,91	149,27	162,30
8	Transportasi dan Pergudangan	150,96	151,85	154,76	156,21	170,46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	167,78	170,30	171,74	172,87	177,46
10	Informasi dan Komunikasi	120,11	121,10	120,66	117,93	119,23
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	159,86	162,64	162,92	169,76	180,26
12	Real Estat	137,07	144,34	146,97	149,09	152,47
13	Jasa Perusahaan	152,98	155,74	158,45	159,67	174,67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	162,34	163,51	165,89	165,20	170,03
15	Jasa Pendidikan	151,93	156,17	165,45	166,40	170,73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144,03	145,91	147,44	150,08	156,05
17	Jasa Lainnya	140,71	146,09	142,87	144,00	146,59
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>147,26</b>	<b>150,37</b>	<b>152,38</b>	<b>154,47</b>	<b>162,54</b>

\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara

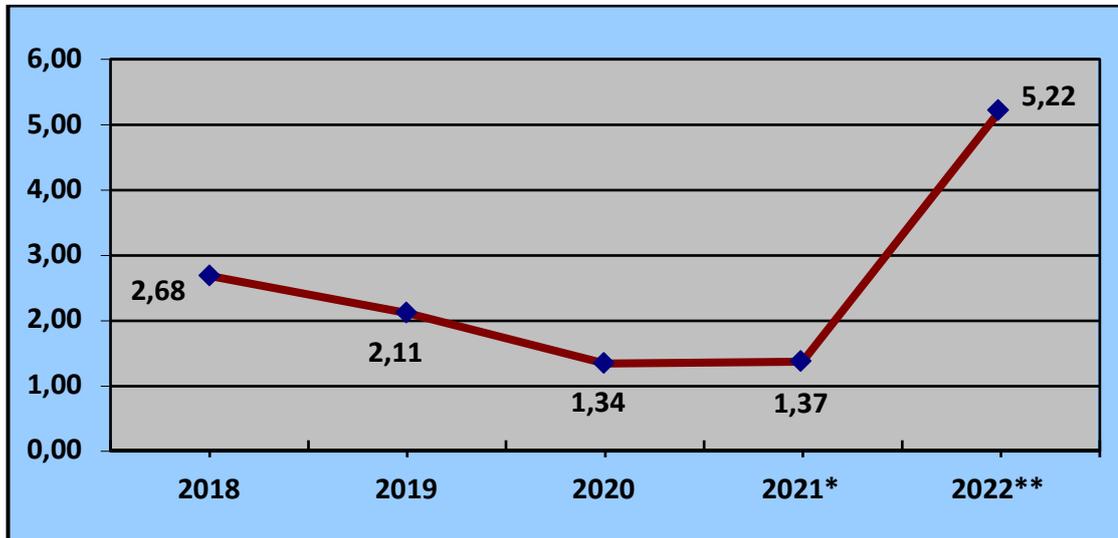
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2023

**Gambar 2.3. Inflasi PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2012 s.d. 2017**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2018

**Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kota Bandar Lampung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 s.d. 2022 (persen)**



\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2023

#### **d. Pendapatan Per Kapita**

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah atau wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita menginterpretasikan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita menandakan bahwa semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Sebaliknya, penurunan pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun.

Kenaikan nilai PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan. Pertumbuhan nilai PDRB per kapita diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk. Hal berbeda terjadi pada Tahun 2020, pada tahun ini, terjadi pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan tetapi tidak diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 terkontraksi.

Hal ini menyebabkan nilai PDRB per kapita mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2019. Saat terjadinya pandemi Covid-19 lalu, nilai PDRB per kapita penduduk Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar (10,92) persen. Namun pada Tahun 2021, Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama pelaku usaha dan masyarakat bersama-sama mampu memperbaiki perekonomian Kota Bandar Lampung sehingga pendapatan per kapita di Tahun 2021 beranjak naik menjadi sebesar 0,92 persen. Pada Tahun 2022, nilai PDRB per kapita Kota Bandar Lampung berdasarkan atas dasar harga berlaku adalah sebesar 56,15 juta rupiah atau setara dengan 4,68 juta rupiah per bulannya.

**Tabel 2.4. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kota Bandar Lampung Tahun 2018 s.d. 2022**

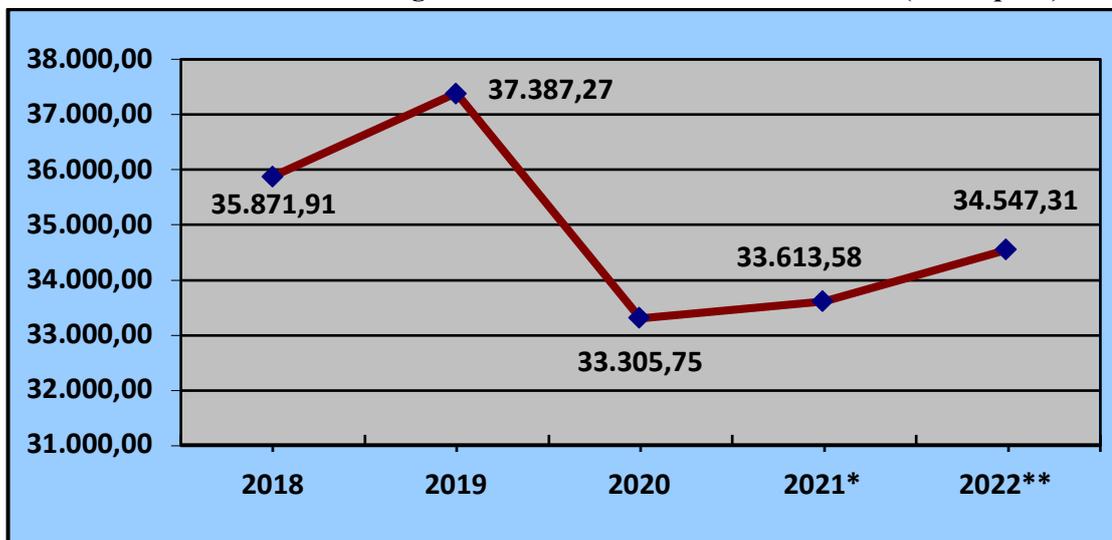
	2018	2019	2020	2021*	2022**
<b>Nilai PDRB (Milyar Rupiah)</b>					
<b>Atas Dasar Harga Berlaku</b>	54.609,16	59.203,98	58.869,44	61.525,51	67.940,87
<b>Atas Dasar Harga Konstan 2010</b>	37.084,49	39.373,24	38.632,20	39.830,38	41.800,07
<b>Nilai PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)</b>					
<b>Atas Dasar Harga Berlaku</b>	52.823,57	56.217,75	50.752,75	51.922,50	56.152,40
<b>Atas Dasar Harga Konstan 2010</b>	35.871,91	37.387,27	33.305,75	33.613,58	34.547,31
<b>Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)</b>	4,36	4,22	-10,92	0,92	2,78
<b>Jumlah Penduduk (Orang)</b>	1.033.803	1.053.119	1.159.926	1.184.949	1.209.937
<b>Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)</b>	6,20	6,17	-1,88	3,10	4,95

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2023

Perlu diketahui bahwa indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan per kapita penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreatifitas usaha dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Namun dengan segala keterbatasan, indikator PDRB per kapita dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dari gambar di bawah terlihat bahwa selama periode lima tahun terakhir, nilai PDRB per kapita Kota Bandar Lampung atas dasar harga konstan 2010 mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada Tahun 2020 yang mengalami penurunan. Pertumbuhan nilai PDRB per kapita Kota Bandar Lampung atas dasar harga konstan 2010 dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 secara berturut-turut sebesar 35,87 juta rupiah, 37,38 juta rupiah, 33,30 juta rupiah, 33,61 juta rupiah dan 34,54 juta rupiah.

**Gambar 2.5. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kota Bandar Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018 s.d. 2022 (ribu rupiah)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2023

#### e. Angka Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada Tahun 2022, TPT Kota Bandar Lampung berjumlah sebesar 7,91%. Angka tersebut turun dari Tahun 2021 yang berjumlah sebesar 8,85%. Salah satu penyebab dari menurunnya angka TPT Kota Bandar



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Lampung tersebut adalah karena telah berakhirnya wabah pandemi Covid-19 sehingga iklim usaha kembali tumbuh positif. Sementara itu, pada Tahun 2020, TPT Kota Bandar Lampung berjumlah sebesar 8,79%. Angka tersebut naik dari Tahun 2019 yang berjumlah sebesar 7,12%. Pada Tahun 2018, TPT Kota Bandar Lampung berjumlah sebesar 7,28%.

Selain data mengenai TPT, kondisi ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung juga mencakup mengenai data penduduk usia kerja. Besarnya jumlah penduduk usia kerja berkaitan erat dengan besarnya jumlah penduduk itu sendiri karena penduduk usia kerja merupakan segmen dari jumlah total penduduk secara keseluruhan. Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari separuh penduduk Kota Bandar Lampung termasuk ke dalam angkatan kerja.

**Tabel 2.5. Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Yang Bekerja, Pengangguran Terbuka dan Rasio Kesempatan Kerja Kota Bandar Lampung Tahun 2018 s.d. 2022**

Tahun	Angkatan Kerja (Orang)	Penduduk yang Bekerja (Orang)	Pengangguran Terbuka (Orang)	Rasio Kesempatan Kerja (Persen)
2018	504.849	468.121	36.728	92,72
2019	511.686	475.244	36.442	92,87
2020	554.224	505.483	48.741	91,21
2021	560.107	510.511	49.596	91,15
2022	567.038	522.166	44.872	92,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2023

Pada Tahun 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bandar Lampung berjumlah sebesar 66,70%. Angka tersebut sedikit turun dari Tahun 2021 yang berjumlah sebesar 67,18%. Kemudian pada Tahun 2020, TPAK Kota Bandar Lampung berjumlah sebesar 67,79%. Angka tersebut naik dari Tahun 2019 yang berjumlah sebesar 65,52%. Sedangkan pada Tahun 2018, TPAK Kota Bandar Lampung berjumlah sebesar 65,92%.



**f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

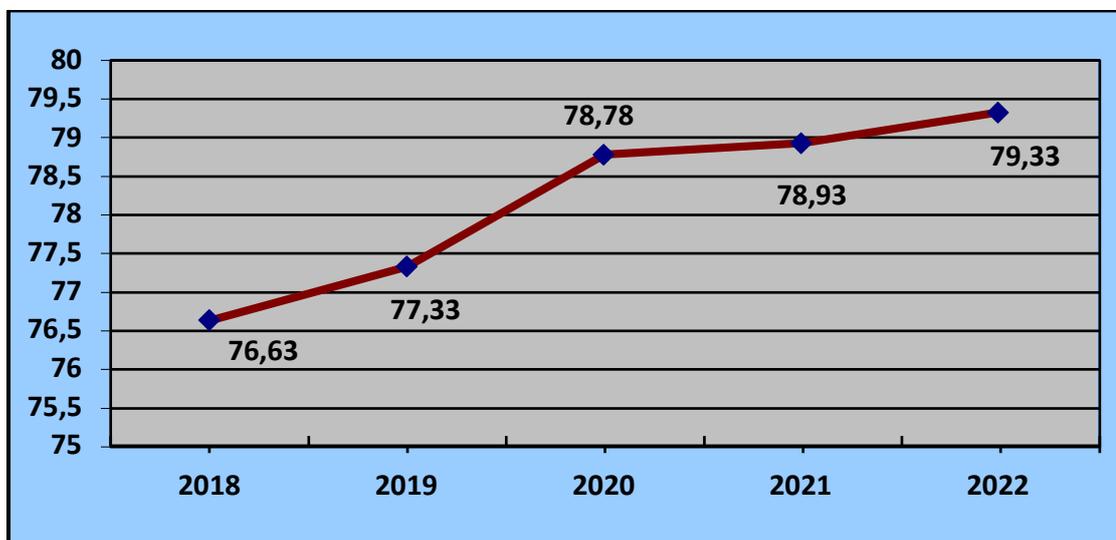
Pemantauan terhadap perkembangan dan perubahan kualitas pembangunan manusia dapat dilihat dengan menggunakan suatu indikator komposit. Indikator yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dapat memberikan ukuran tunggal yang mencerminkan kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Atau dengan kata lain, IPM ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan dari suatu wilayah atau negara.

Di Indonesia, IPM merupakan data yang strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan metode penghitungan IPM yang baru, perkembangan pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung tidak terlalu signifikan selama tiga tahun terakhir. Lambatnya kenaikan IPM ini dapat dipahami mengingat dampak dari investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, khususnya terhadap peningkatan indikator penyusun IPM yang akan terlihat secara nyata dalam jangka panjang. Sejak Tahun 2020, angka IPM Kota Bandar Lampung sudah masuk kategori “tinggi”. Terakhir di Tahun 2022, angka IPM Kota Bandar Lampung meningkat menjadi sebesar 79,33.

**Gambar 2.6. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandar Lampung Tahun 2018 s.d. 2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2023

Dari gambar di atas terlihat bahwa selama periode lima tahun terakhir, angka IPM Kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2018 sebesar 76,63, Tahun 2019 sebesar 77,33, Tahun 2020 sebesar 78,78, Tahun 2021 sebesar 78,93 dan terakhir Tahun 2022 sebesar 79,33.



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**g. Angka Kemiskinan**

Untuk mengukur angka kemiskinan, digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo/kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

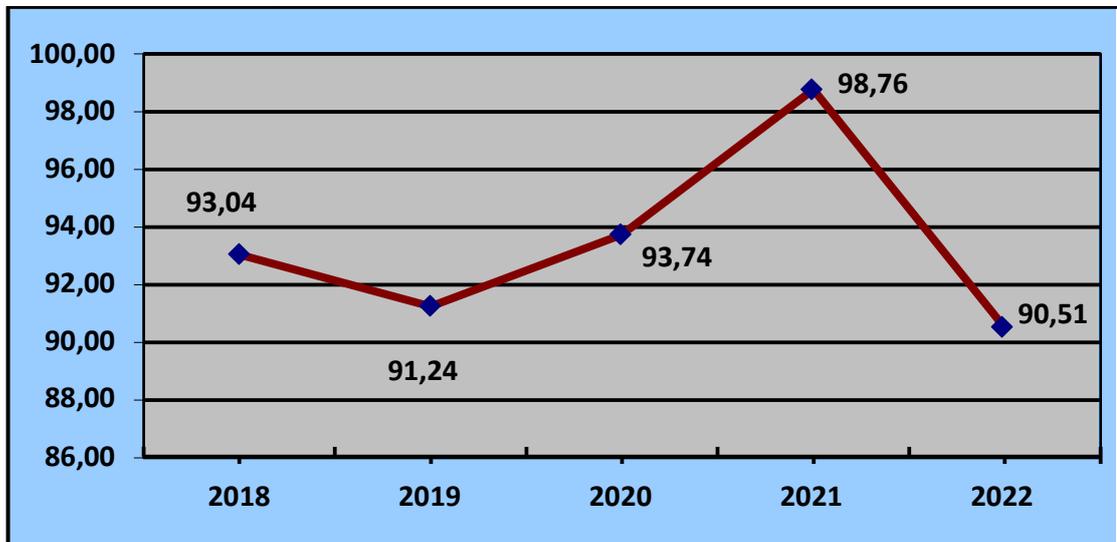
Berdasarkan tabel dan gambar di bawah ini terlihat bahwa sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, jumlah persentase penduduk miskin di Kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan, kecuali pada Tahun 2022 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dimana jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan, salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya penduduk bekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat terjadinya wabah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan berbagai sektor kehidupan, terutama sektor ekonomi menjadi melemah. Sementara untuk Tahun 2022, penurunan jumlah persentase penduduk miskin adalah karena terdapatnya peningkatan kesejahteraan penduduk dari sisi pendapatan. Ketersediaan lapangan pekerjaan dan stabilitas kepastian usaha pasca wabah pandemi Covid-19 akan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk sekaligus mengurangi jumlah penduduk kategori miskin di Kota Bandar Lampung.

**Tabel 2.6. Angka Kemiskinan Kota Bandar Lampung Tahun 2018 s.d. 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk (Proyeksi Penduduk)</b>	<b>Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)</b>	<b>Penduduk Miskin (Persen)</b>
2018	1.033.803	93,04	9,04
2019	1.051.500	91,24	8,71
2020	1.166.066	93,74	8,81
2021	1.184.949	98,76	9,11
2022	1.202.070	90,51	8,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2023

**Gambar 2.7. Jumlah Penduduk Miskin Kota Bandar Lampung Tahun 2018 s.d. 2022 (ribu jiwa)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2023

## 2) Kebijakan Keuangan/Fiskal

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya, APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas dan fungsi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2023, tertuang prioritas pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mengarah pada pencapaian sasaran, strategi dan arah kebijakan yang menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023.



**a. Kebijakan Umum Tahun Anggaran 2023**

Tujuan pembangunan daerah adalah harus mampu memacu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta harus mampu meningkatkan pembangunan penduduknya (Indeks Pembangunan Manusia-IPM). Kualitas penduduk yang tinggi dan ketersediaan lapangan pekerjaan serta stabilitas kepastian usaha tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk sehingga distribusi pendapatan berada pada tingkat ketimpangan yang semakin rendah. Disamping itu, pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok.

Secara umum, prospek akselerasi ekonomi pada Tahun 2022 didorong oleh kembali meningkatnya aktivitas ekonomi pasca perlambatan yang terjadi selama pandemi Covid-19 di Tahun 2020 (*base effect*). Selanjutnya, prospek perekonomian global dan domestik pada Tahun 2023 sangat tergantung pada proses penanganan penyebaran pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 serta kondisi tensi geopolitik internasional. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Lampung maupun Kota Bandar Lampung pada Tahun 2021 yang lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2020 maka Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 diperkirakan akan menjadi lebih baik sebagai lanjutan dari perbaikan kondisi perekonomian Tahun 2022.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 terutama didorong oleh aktivitas ekonomi nasional dan regional maupun Kota Bandar Lampung yang akan berdampak pada peningkatan permintaan. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 juga diharapkan dari hasil respons dari berbagai kebijakan, seperti kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui konsumsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki peran dalam percepatan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 dengan memperhatikan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 pada misi keempat, yaitu



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tujuan meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan serta sasaran :

1. Meningkatnya sektor unggulan daerah.
2. Meningkatnya investasi dan memperluas kesempatan kerja.
3. Menurunnya kemiskinan.
4. Meningkatnya penanganan PMKS.

Seiring dengan hal tersebut maka tema rencana pembangunan tahunan atau tema Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 adalah “Percepatan Pemulihan Ekonomi, Sosial dan Budaya Daerah melalui Pembangunan Berkelanjutan” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi.
2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.
3. Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan.
4. Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah (SID).
6. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

### **b. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pengertian pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri dan alokasi dari pemerintah pusat maupun bagi hasil provinsi sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Dalam struktur APBD Kota Bandar Lampung, pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting sebagai sumber pembiayaan dan investasi pembangunan daerah



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

dari sektor pemerintah. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD sangat ditentukan oleh besaran pendapatan daerah yang mampu direalisasikan pada tahun berjalan. Oleh karenanya, pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat penting dan relevan.

Dalam struktur RAPBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023, dana perimbangan masih menjadi sumber pendanaan utama. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan, antara lain melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien sehingga diproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi PAD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 sampai Tahun Anggaran 2022.

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah daerah tersebut dapat diukur dengan penerimaan pendapatan daerah. Berikut ini dijabarkan beberapa strategi peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal, yaitu :

1. Penguatan regulasi pendapatan daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
3. Peningkatan kompetensi personil pengelola pendapatan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi.

Kebijakan pendapatan daerah Kota Bandar Lampung diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (*intensifikasi*) dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (*ekstensifikasi*). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* pendapatan daerah, optimalisasi aset daerah dan peningkatan dana perimbangan dan bagi hasil.



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

Dalam upaya mencapai target pendapatan daerah tersebut, banyak usaha yang akan dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu melalui :

1. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan.
3. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah, baik yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah dengan basis data dan sistem informasi yang tepat dan akurat. Salah satu upayanya adalah dengan pemasangan *tapping box* pada objek pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir.
4. Mengoptimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pendapatan pada kecamatan di Kota Bandar Lampung dengan mengembangkan mekanisme pelayanan yang efisien, efektif, cepat dan tepat.
5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga terutama untuk pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.
6. Meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, beberapa langkah konkret yang telah, sedang dan akan dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mencapai target penerimaan PAD Tahun Anggaran 2023, yaitu :

### A. Pajak Parkir, Hiburan, Hotel, Restoran dan Reklame

- 1) Audit pajak terhadap wajib pajak yang belum sesuai antara potensi dengan jumlah setoran pajaknya. Dilakukan secara persuasif dengan melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak.
- 2) Penagihan piutang atau tunggakan pajak secara intensif dan kontinyu serta penertiban objek pajak yang memiliki tunggakan pajak didukung melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung.
- 3) Pemutakhiran dan peremajaan data objek pajak dan wajib pajak dengan melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak dan melakukan pendataan terhadap objek pajak baru yang belum menjadi wajib pajak.
- 4) Telah melaksanakan penerapan pembayaran pajak secara *online (payment online system)* di seluruh kantor cabang PT Bank Lampung untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Proses pemungutan pajak dilakukan dengan cara menginput data objek pajak dengan



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

menggunakan SIMPATDA dan SAI-PEPADUN sehingga wajib pajak yang memiliki tunggakan harus terlebih dahulu melunasi tunggakan pajaknya untuk memperoleh SPTPD dan SKPD.

- 5) Melakukan kerjasama dengan PT Bank Lampung untuk melakukan pemasangan *tapping box* dalam pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir (sebagaimana arahan KPK).
- 6) Peninjauan kembali kebijakan yang berkenaan dengan pajak restoran terhadap warung makan tenda yang berdasarkan omzet atau keuntungannya dapat dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan serta melakukan kegiatan pengawasan objek pajak restoran.
- 7) Optimalisasi pemungutan pajak reklame dari papan nama toko dan reklame dalam ruangan.
- 8) Optimalisasi pemungutan pajak kos-kosan atau rumah kos.
- 9) Telah melaksanakan penerapan *tax clearance* secara *link-system* dengan perangkat daerah terkait (salah satunya dengan DPM PTSP).
- 10) Akan melaksanakan proses pelayanan perpajakan secara *online* (pajak *online*) dari proses penerbitan SPTPD sampai dengan proses pembayaran akan dilakukan oleh wajib pajak secara *online*.
- 11) Penutupan objek-objek pajak reklame dengan stiker yang setelah diberikan teguran, baik lisan maupun tertulis, tetapi tidak melakukan kewajiban pembayaran pajaknya.
- 12) Penagihan tunggakan dengan menyampaikan STPD kepada wajib pajak dan melakukan penagihan tunggakan secara langsung terhadap wajib pajak.

### B. PBB-P2 dan BPHTB

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan untuk lebih intensif dalam melakukan penagihan tunggakan dan PBB-P2 tahun berjalan.
- 2) Meningkatkan pelayanan prima kepada wajib pajak dengan membuka loket pembayaran PBB-P2 di setiap kecamatan, menyediakan mobil kas keliling PT Bank Lampung untuk menerima pembayaran PBB serta efisiensi pengurusan administrasi perpajakan. Bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung dalam upaya melakukan penagihan tunggakan PBB yang nilainya di atas Rp.50.000.000,00.



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

- 3) Melakukan pendataan massal terhadap seluruh objek PBB-P2 di 20 (*dua puluh*) wilayah kecamatan se-Kota Bandar Lampung.
- 4) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak, khususnya PBB-P2 dan menghimbau agar pembayaran pajaknya dilakukan sebelum jatuh tempo.
- 5) Menambah jumlah petugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan terkait BPHTB.
- 6) Mempercepat proses penerbitan SSPD BPHTB.
- 7) Melaksanakan kerja sama dengan BPN Kota Bandar Lampung dalam rangka verifikasi data BPHTB.

Proyeksi pendapatan didasarkan pada pertumbuhan pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Adapun asumsi yang digunakan dalam proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 antara lain :

1. Optimalisasi pelaksanaan beberapa peraturan daerah terkait pajak dan retribusi, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Optimalisasi potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Perekonomian Tahun 2023 yang diperkirakan lebih baik jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 seiring dengan proses penanganan penyebaran pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19.



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

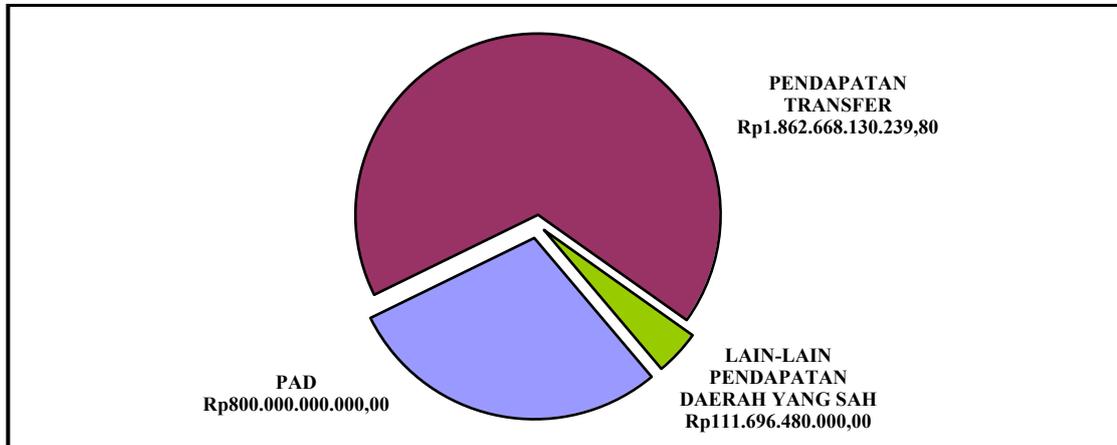
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Maka proyeksi Pendapatan RAPBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 digambarkan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah diprediksi sebesar Rp.800.000.000.000,00 yang terdiri dari : Pajak Daerah sebesar Rp.520.195.262.269,00; Retribusi Daerah sebesar Rp.47.954.673.205,48; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.31.276.185.222,10 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.200.573.879.303,42.
- 2) Pendapatan Transfer diprediksi sebesar Rp.1.862.668.130.239,80 yang terdiri dari :
  - a. Transfer Pemerintah Pusat diprediksi sebesar Rp.1.667.668.130.239,80 yang terdiri dari :
    - Dana Perimbangan diprediksi sebesar Rp.1.667.668.130.239,80 yang terdiri dari : Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp.68.856.672.000,00; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.201.094.731.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.357.504.692.000,00.
    - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp.40.212.035.239,80 yang terdiri dari : Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.40.212.035.239,80.
  - b. Transfer Antar Daerah diprediksi sebesar Rp.195.000.000.000,00 yang terdiri dari : Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp.195.000.000.000,00.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diprediksi sebesar Rp.111.696.480.000,00 yang terdiri dari : Pendapatan Hibah sebesar Rp.4.961.250.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.106.735.230.000,00.
- 4) Pendapatan Daerah secara keseluruhan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 diperkirakan mencapai sebesar Rp.2.774.364.610.239,80 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.432.663.708.239,80 atau 18,48% dibandingkan Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 yang mencapai sebesar Rp.2.341.700.902.000,00.

Berikut adalah Proyeksi Pendapatan RAPBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023.

**Gambar 2.8. Proyeksi Pendapatan RAPBD Kota Bandar Lampung T.A. 2023**



### c. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023. Belanja Daerah Kota Bandar Lampung meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Bandar Lampung yang tidak perlu diterima kembali oleh pemerintah daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (*satu*) tahun anggaran.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang dirinci atas jenis : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (*satu*) periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang dirinci atas jenis : belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Dalam rancangan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2026, diamanatkan bahwa kebijakan alokasi anggaran menganut prinsip skala prioritas. Hal ini mengandung arti bahwa pengalokasian belanja haruslah berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan.

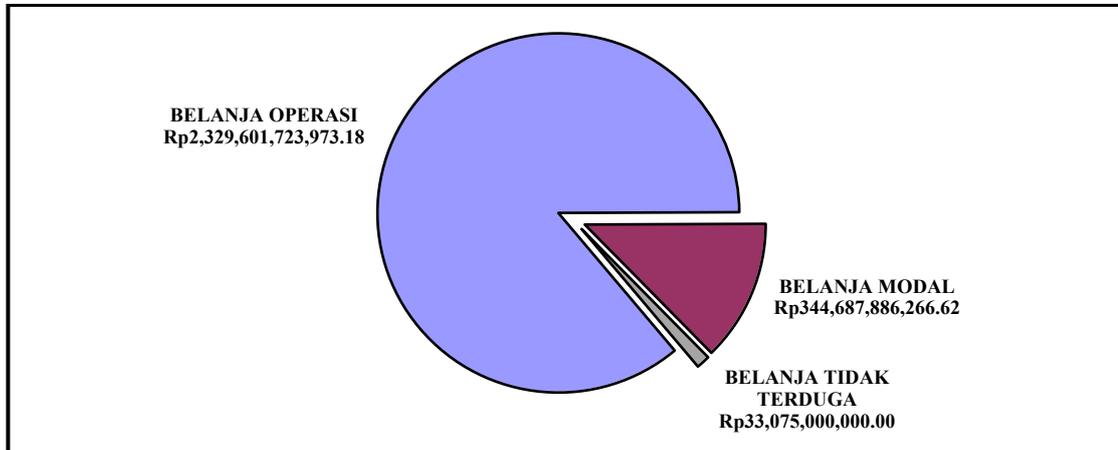
Dalam rancangan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2026 juga disebutkan bahwa kebijakan penganggaran yang dianut oleh Kota Bandar Lampung adalah anggaran berimbang. Artinya belanja daerah tentu sepenuhnya tergantung pada pendapatan atau dengan kata lain, kemampuan belanja dipengaruhi oleh kapasitas pendapatan. Oleh karena itu, pengeluaran haruslah selalu didasarkan atas kapasitas pendapatan.

Proyeksi Belanja RAPBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 digambarkan sebagai berikut :

- 1) Belanja Operasi diprediksi sebesar Rp.2.329.601.723.973,18 yang terdiri dari : Belanja Pegawai sebesar Rp.1.082.830.213.419,60; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.111.929.694.295,58; Belanja Bunga sebesar Rp.19.396.250.000,00; Belanja Subsidi sebesar Rp.1.000.000.000,00; Belanja Hibah sebesar Rp.107.205.566.258,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.7.240.000.000,00.
- 2) Belanja Modal diprediksi sebesar Rp.344.687.886.266,62.
- 3) Belanja Tidak Terduga diprediksi sebesar Rp.33.075.000.000,00.
- 4) Belanja Daerah secara keseluruhan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 diperkirakan mencapai sebesar Rp.2.707.364.610.239,80 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.452.663.708.239,80 atau 20,08% dibandingkan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 yang mencapai sebesar Rp.2.254.700.902.000,00.

Berikut adalah Proyeksi Belanja RAPBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023.

**Gambar 2.9. Proyeksi Belanja RAPBD Kota Bandar Lampung T.A. 2023**



Berdasarkan perkiraan angka belanja daerah tersebut maka kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, Pemerintah Kota Bandar Lampung akan berupaya untuk melakukan pemenuhan layanan dasar masyarakat atau pelaksanaan SPM dengan memperhatikan masa pasca pandemi atau endemi. Sedangkan belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan.



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

3. Kebijakan anggaran belanja Tahun 2023 berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah bersangkutan.
4. Selanjutnya kebijakan anggaran belanja Tahun 2023 masih akan memperhatikan upaya penanganan pasca pandemi atau endemi dan dampaknya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, sosial dan budaya di Kota Bandar Lampung.
5. Rencana pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) Nasional Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak Tahun 2024 juga akan menjadi perhatian dalam kebijakan anggaran Tahun 2023.
6. Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
7. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah, antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, pertanian, ketahanan pangan, perhubungan dan kelautan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada perangkat daerah yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **d. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2023 secara umum tidak banyak berbeda dengan kebijakan pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan pembiayaan daerah tersebut diarahkan bagi pengamanan sisa perhitungan anggaran tahun lalu untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi.



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2023 bersumber dari :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang akan diterima sesuai dengan perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah Tahun 2023 digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada Tahun 2023.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk :

1. Pembayaran Hutang

2. Penyertaan Modal pada BUMD

a. Penyertaan modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) tentang penyertaan modal.

b. Jika Pemerintah Kota Bandar Lampung akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal maka akan dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

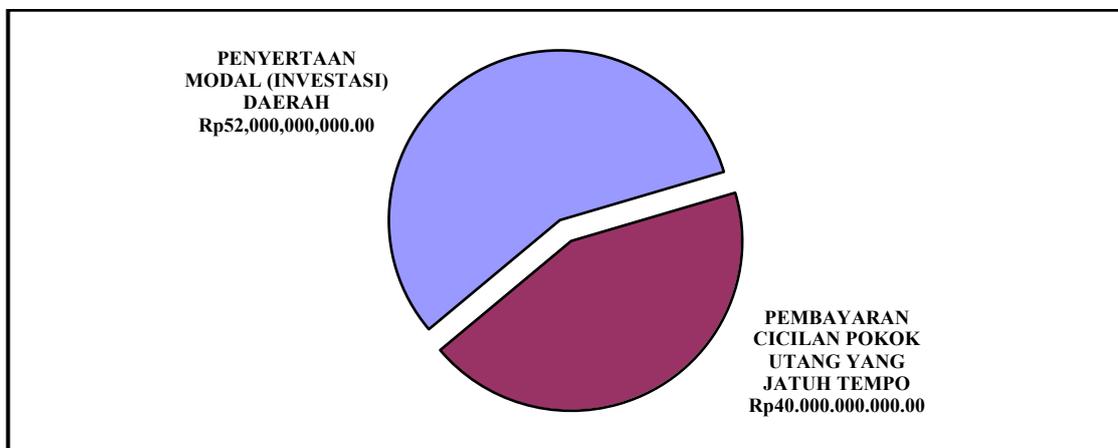
c. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk memperkuat struktur permodalan sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

- d. Sampai dengan Tahun 2021, disamping ikut memiliki saham pada PT Bank Lampung, sudah ada 5 (*lima*) BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu PT BPR Waway Lampung, PT BPR Syariah Bandar Lampung, PDAM Way Rilau, PD Pasar Tapis Berseri dan PD Kebersihan Tapis Berseri.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023, penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp.25.000.000.000,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.25.000.000.000,00. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp.92.000.000.000,00 yang bersumber dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp.40.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sebesar Rp.52.000.000.000,00 yang terdiri dari : PDAM Way Rilau sebesar Rp.39.500.000.000,00; PT BPR Waway Lampung sebesar Rp.5.000.000.000,00; PT BPR Syariah Bandar Lampung sebesar Rp.2.500.000.000,00; PD Kebersihan Tapis Berseri sebesar Rp.1.000.000.000,00; PD Pasar Tapis Berseri sebesar Rp.1.000.000.000,00 dan PT Bank Lampung sebesar Rp.3.000.000.000,00.

Berikut adalah Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan RAPBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023.

**Gambar 2.10. Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan RAPBD Kota Bandar Lampung T.A. 2023**





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**3) Pencapaian Target Kinerja APBD Kota Bandar Lampung**

APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023.

Target keuangan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 tersebut dapat dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target pendapatan dengan capaian sebesar 78,48% atau sebesar Rp.2.299.794.223.208,49 dan target belanja (jumlah belanja dan transfer) dicapai dengan capaian sebesar 77,80% atau terdapat penghematan sebesar Rp.650.053.207.011,67. Sedangkan target penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar 38,42% dan target pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar 45,73% sehingga menghasilkan SiLPA tahun berjalan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.17.895.574.758,58.

Selanjutnya, gambaran capaian kinerja selama Tahun 2023 Pemerintah Kota Bandar Lampung atas pelaksanaan Rencana Strategis Pemerintah Kota Bandar Lampung yang merupakan capaian sasaran berdasarkan indikator kinerja *output* atau *outcome*, dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023.

Realisasi APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi APBD Kota Bandar Lampung T.A. 2023 (dalam rupiah)**

<b>URAIAN</b>	<b>APBD (PERUBAHAN)</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>LEBIH / (KURANG)</b>	<b>%</b>
<b>Pendapatan</b>	2.930.424.128.001,10	2.299.794.223.208,49	(630.629.904.792,61)	(21,52)
<b>Belanja</b>	2.927.770.619.245,00	2.277.717.412.233,33	(650.053.207.011,67)	(22,20)
<b>Transfer</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Belanja dan Transfer</b>	2.927.770.619.245,00	2.277.717.412.233,33	(650.053.207.011,67)	(22,20)
<b>Surplus / (Defisit)</b>	2.653.508.756,10	22.076.810.975,16	19.423.302.219,06	731,99



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	APBD (PERUBAHAN)	REALISASI 2023	LEBIH / (KURANG)	%
<b>Pembiayaan :</b>				
a. Penerimaan Pembiayaan	40.596.491.243,90	15.596.491.243,90	(25.000.000.000,00)	(61,58)
b. Pengeluaran Pembiayaan	43.250.000.000,00	19.777.727.460,48	(23.472.272.539,52)	(54,27)
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(2.653.508.756,10)</b>	<b>(4.181.236.216,58)</b>	<b>(1.527.727.460,48)</b>	<b>57,57</b>
<b>SiLPA Tahun Berjalan</b>	<b>0,00</b>	<b>17.895.574.758,58</b>	<b>17.895.574.758,58</b>	



---

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

**Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Pada awal tahun anggaran, pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya selama satu tahun anggaran.

Untuk menilai pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2023, diperlukan suatu analisis terhadap laporan keuangan. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti : apakah posisi keuangan sesuai yang diharapkan, apakah perkembangan posisi keuangan mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan metode analisis yang lazim digunakan untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan, sebagai berikut :

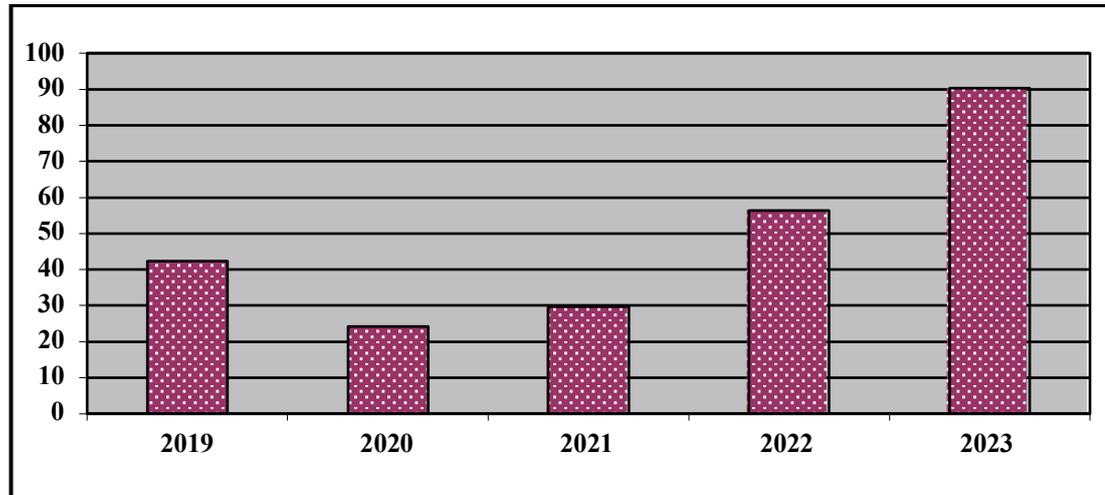
- a. Rasio antar pos Neraca :
  - 1) Rasio Cair (*Quick Ratio*)
  - 2) Rasio Utang Terhadap Total Aset (*Debt Ratio*)
  - 3) Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset
- b. Rasio antar pos Laporan Realisasi APBD :
  - 1) Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
  - 2) Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja
  - 3) Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan
  - 4) *Debt Service Ratio* (DSR)
  - 5) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)
  - 6) Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan

Uraian terhadap masing-masing capaian rasio dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1) Rasio Cair (*Quick Ratio*)**

$$\text{Rasio Cair (*Quick Ratio*)} = \frac{382.527.484.680,16 - 78.650.986.138,80}{336.732.247.971,06} = 90,24\%$$

**Gambar 3.1. Rasio Cair (*Quick Ratio*) Kota Bandar Lampung Tahun 2019 s.d. 2023**



Rasio Cair (*Quick Ratio*) dihitung dengan mengurangi Persediaan dari Aset Lancar dan hasilnya dibagi dengan Utang Jangka Pendek. Biasanya Aset Lancar terdiri dari : Kas di Kas Daerah, Kas di Pemegang Kas, Bagian Lancar Tagihan Penjualan, Bagian Lancar TGR, Beban Jasa Dibayar Dimuka, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-Lain dan Persediaan. Persediaan merupakan unsur Aset Lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

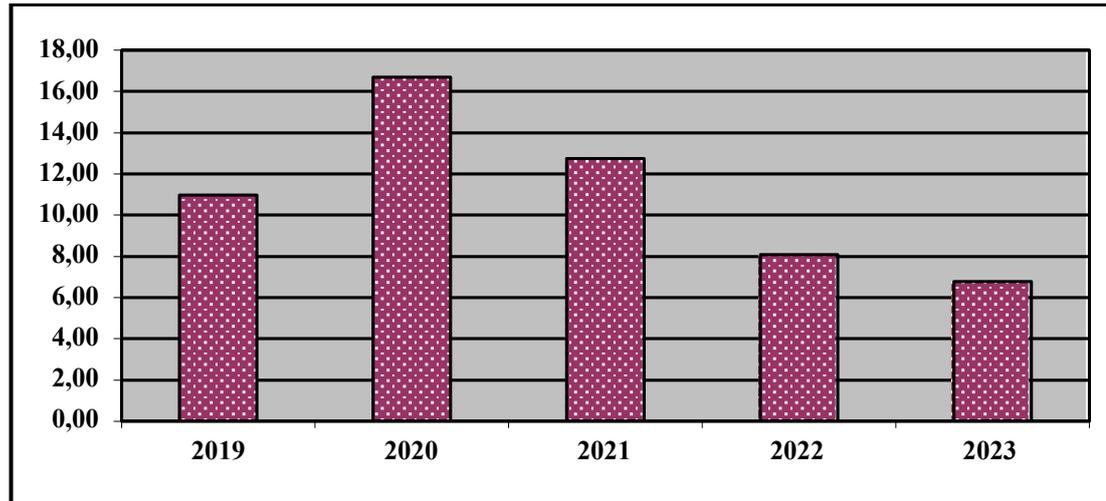
Analisis rasio ini bertujuan untuk menilai kemampuan memenuhi Kewajiban Jangka Pendek. Secara umum, angka rasio di atas 100% menunjukkan hasil yang baik, artinya pemerintah daerah dapat menjamin Kewajiban Jangka Pendeknya dengan Aktiva Lancar Non Persediaan yang ada. Kebalikannya, angka rasio di bawah 100% menunjukkan hasil yang kurang. Capaian angka rasio sebesar 90,24% menunjukkan kinerja keuangan yang kurang baik.

Pada Tahun 2023 ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memperhitungkan pembayaran angsuran pokok pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero Kementerian Keuangan RI berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor PERJ-220/SMI/1221 Tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.147.766.963.670,15 karena masih berada dalam masa tenggang atau *grace periode* pembayaran cicilan pokok pinjaman yang akan berakhir sampai dengan Bulan April 2024.

## 2) Rasio Utang Terhadap Total Aset (*Debt Ratio*)

$$\text{Rasio Utang Terhadap Total Aset (Debt Ratio)} = \frac{447.557.467.769,21}{6.588.059.307.452,35} = 6,79\%$$

**Gambar 3.2. Rasio Utang Terhadap Total Aset (*Debt Ratio*) Kota Bandar Lampung Tahun 2019 s.d. 2023**



Rasio Utang terhadap Total Aset dihitung dengan membandingkan antara Total Utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan Total Aset yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Kewajiban tersebut terdiri dari : Utang PFK, Utang Belanja, Utang pada Pemerintah Pusat dan Utang Bunga.

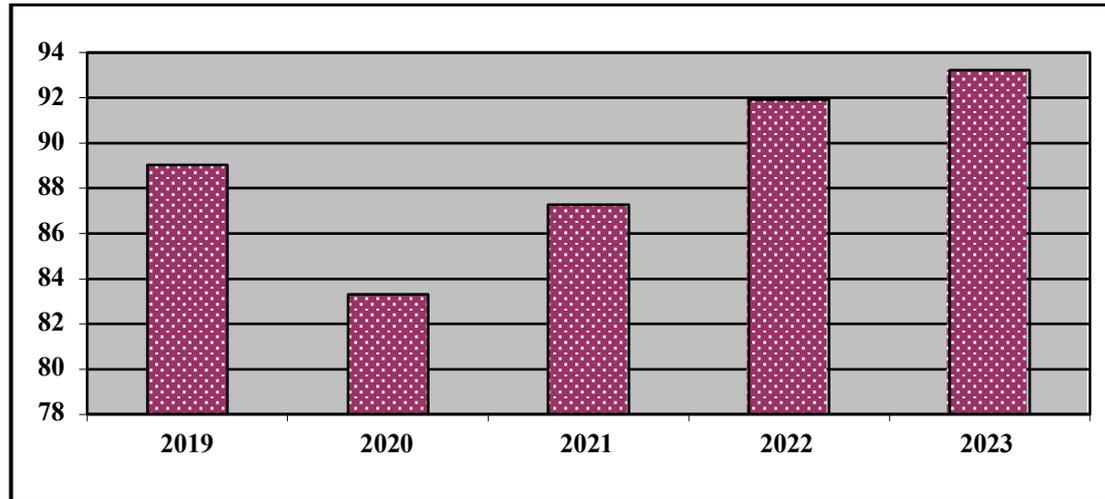
Analisis rasio ini bertujuan untuk mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditur atau donatur atau pihak ketiga dalam membiayai pembangunan. Capaian angka rasio sebesar 6,79% (mendekati 0%) menunjukkan tingkat rasio yang cukup baik, artinya pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh kemampuan Pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri.

Analisis Rasio Utang terhadap Total Aset harus dihubungkan dengan *Debt Service Ratio* (DSR), yaitu rasio yang membandingkan antara Jumlah Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga dengan Total Pendapatan. Dengan menghubungkan kedua rasio ini maka akan didapatkan angka Rasio Utang terhadap Total Aset yang terbaik bagi pemerintah daerah.

### 3) Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset

$$\begin{array}{l} \text{Rasio Ekuitas Dana} \\ \text{Terhadap Total Aset} \end{array} = \frac{6.140.501.839.683,14}{6.588.059.307.452,35} = 93,21\%$$

**Gambar 3.3. Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset Kota Bandar Lampung Tahun 2019 s.d. 2023**



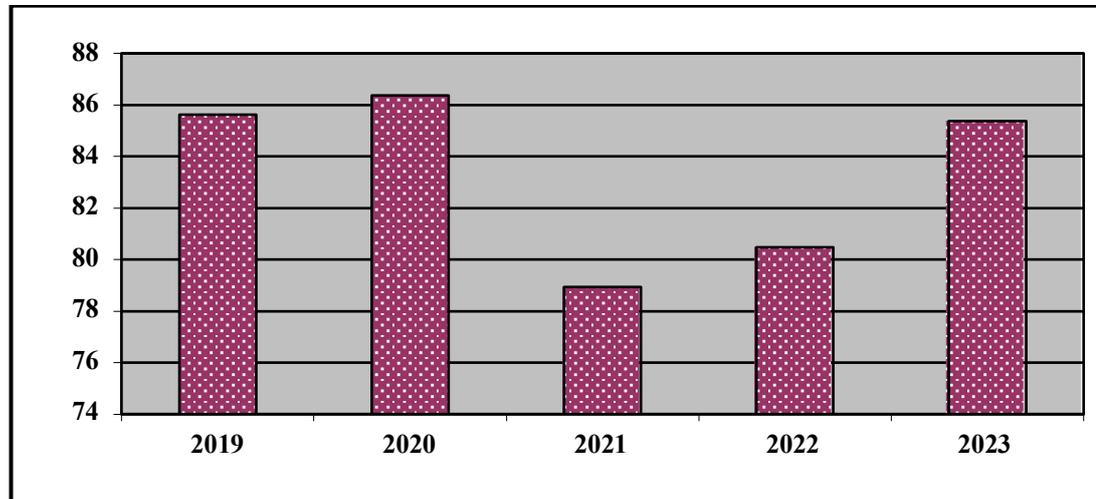
Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset dihitung dengan membandingkan antara Total Ekuitas Dana dengan Total Aset yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Ekuitas Dana tersebut terdiri dari : Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan dan Ekuitas Dana Cadangan.

Rasio ini merupakan kebalikan dari Rasio Utang terhadap Total Aset sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Dalam kondisi ini, angka yang mendekati 100% berarti baik, artinya pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh kemampuan daerah itu sendiri. Capaian angka rasio sebesar 93,21% menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang cukup baik, artinya hampir seluruh biaya pembangunan dibiayai dari dana sendiri.

### 4) Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

$$\begin{array}{l} \text{Rasio Belanja Operasi} \\ \text{Terhadap Total Belanja} \end{array} = \frac{1.944.418.592.178,31}{2.277.717.412.233,33} = 85,37\%$$

**Gambar 3.4. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Kota Bandar Lampung Tahun 2019 s.d. 2023**



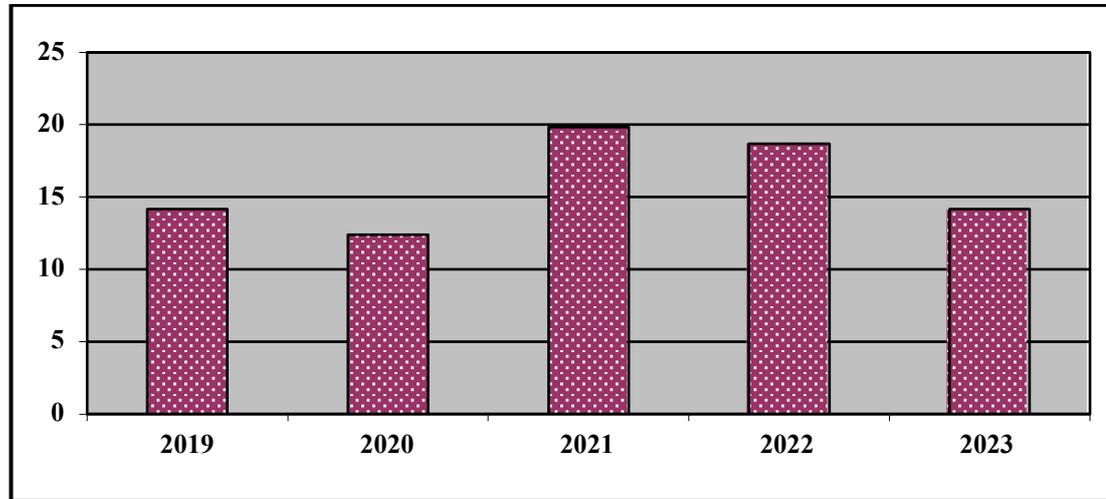
Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja dihitung dengan membandingkan antara Total Realisasi Belanja Operasi dengan Total Realisasi Belanja. Belanja Operasi terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan seluruh realisasi belanja. Para pemakai laporan keuangan akan menilai kecenderungan apakah realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin atau untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik. Bila persentase tersebut menghasilkan angka di atas 50% maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan rutin.

#### 5) Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{322.688.320.055,02}{2.277.717.412.233,33} = 14,17\%$$

**Gambar 3.5. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Kota Bandar Lampung Tahun 2019 s.d. 2023**



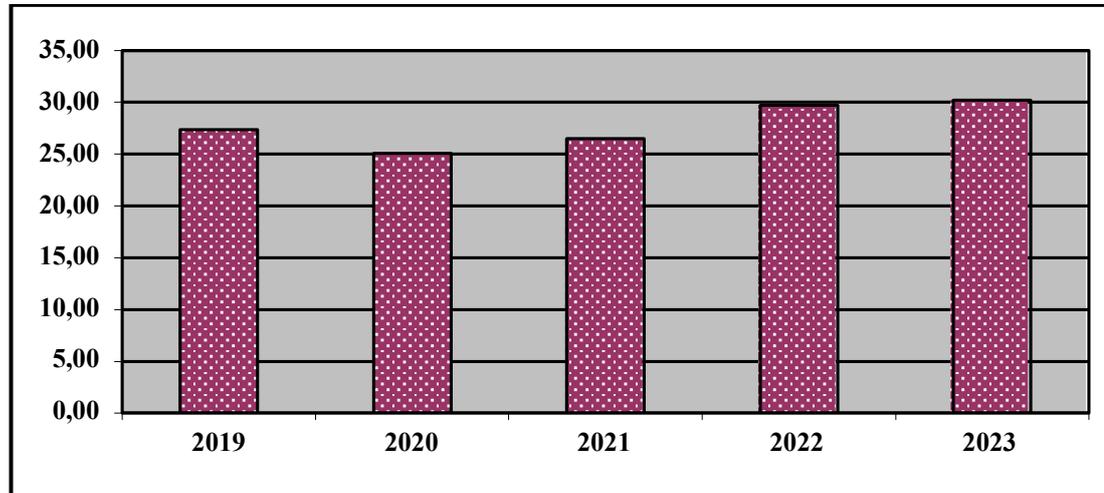
Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dihitung dengan membandingkan antara Total Realisasi Belanja Modal dengan Total Realisasi Belanja. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya.

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dibandingkan seluruh realisasi belanja. Bila persentase tersebut menghasilkan angka di atas 50% maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik infrastruktur yang membawa ke arah perkembangan pembangunan yang lebih baik. Sebagai kebalikan dari Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja, Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung sebesar 14,17% adalah hal yang tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi dari Belanja Pegawai yang cukup tinggi.

#### **6) Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan**

$$\text{Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan} = \frac{694.676.220.527,49}{2.299.794.223.208,49} = 30,21\%$$

**Gambar 3.6. Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Kota Bandar Lampung Tahun 2019 s.d. 2023**



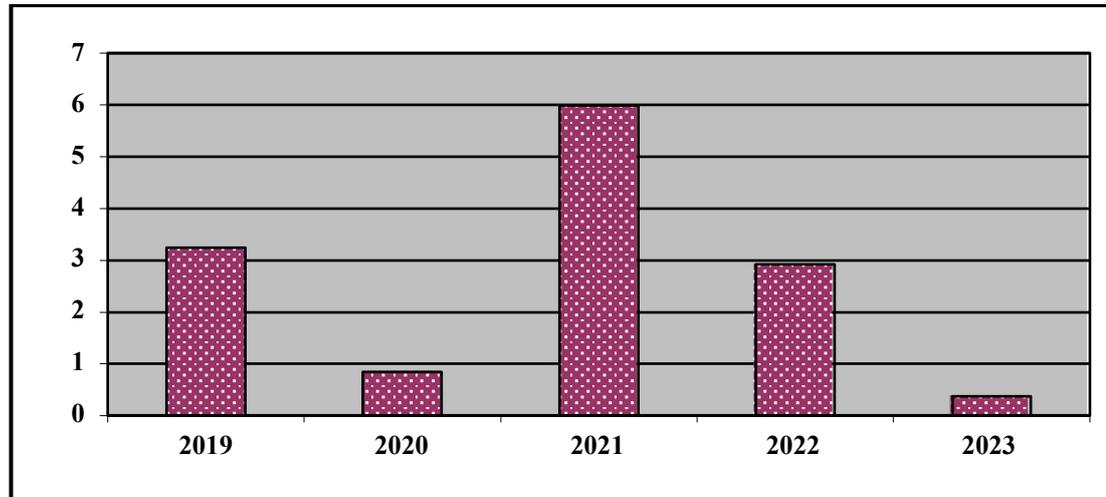
Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan dihitung dengan membandingkan antara Realisasi Penerimaan PAD dengan Total Realisasi Pendapatan. Yang termasuk dalam PAD antara lain : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Rasio ini mengukur sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan. Rasio tersebut dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan diwilayahnya. Semakin besar angka rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah semakin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Bila hasil rasio mendekati 100% berarti pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh usaha pemerintah daerah itu sendiri. Semakin kecil angka rasio, semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pihak lain.

#### 7) *Debt Service Ratio (DSR)*

$$\text{Debt Service Ratio (DSR)} = \frac{0,00 + 8.753.140.284,00}{2.299.794.223.208,49} = 0,38\%$$

**Gambar 3.7. Debt Service Ratio (DSR) Kota Bandar Lampung Tahun 2019 s.d. 2023**



*Debt Service Ratio* (DSR) dihitung dengan membandingkan antara Jumlah Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman dengan Total Pendapatan. Yang dimasukkan dalam perhitungan tersebut adalah Pembayaran Utang dan Bunga dan Biaya Pinjaman Lainnya yang dibayar dalam satu tahun anggaran.

Rasio yang tepat untuk menetapkan standar DSR yang baik dapat dihasilkan dari pengalaman yang dialami pemerintah daerah lainnya yang mempunyai tanggungan utang. Pengalaman Negara Indonesia yang kesulitan membayar pokok dan bunga utang akhir-akhir ini dapat menjadi standar bahwa DSR yang ada di Negara Indonesia sudah terlalu tinggi.

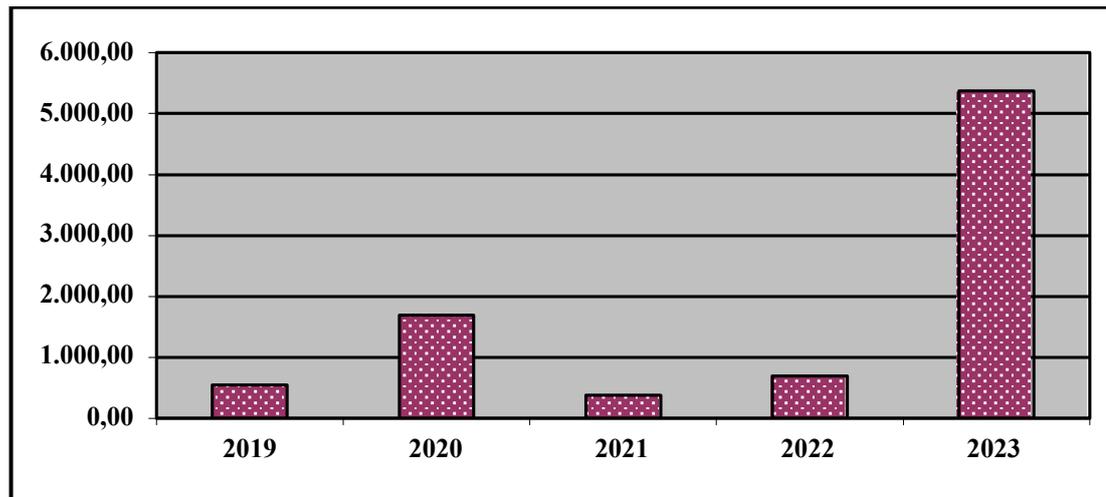
Rasio DSR yang konservatif (minimal) dapat diartikan baik dan sebaliknya, semakin besar angka rasio maka semakin buruk kondisi keuangan pemerintah daerah atau semakin berat beban APBD.

Rendahnya angka DSR Kota Bandar Lampung sebesar 0,38% selama Tahun 2023 terjadi karena Pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai dengan perjanjian pinjaman daerah dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) PT SMI berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor PERJ-220/SMI/1221 Tanggal 29 Desember 2021, belum memiliki kewajiban untuk membayar cicilan pokok dari pinjaman daerah tersebut karena masih berada dalam masa tenggang atau *grace periode* pembayaran cicilan pokok pinjaman yang akan berakhir sampai dengan Bulan April 2024.

**8) Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**

$$\text{Debt Service Coverage Ratio (DSCR)} = \frac{694.676.220.527,49 + 1.605.118.002.681,00 - 1.829.786.730.583,31}{8.753.140.284,00} = 5.369,59\%$$

**Gambar 3.8. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Kota Bandar Lampung Tahun 2019 s.d. 2023**



*Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* memiliki logika yang tidak berbeda dengan *Debt Service Ratio (DSR)*, yaitu untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar utang. Namun DSCR mengukur dari sisi kemampuan Pendapatan Daerah dalam menutupi kewajiban pembayaran Pokok Pinjaman ditambah Biaya Pinjaman. DSCR adalah perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah dari PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Penerimaan SDA dan Bagian Daerah Lainnya seperti PPh Perseorangan serta DAU setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan Angsuran Pokok, Bunga dan Biaya Pinjaman Lainnya yang jatuh tempo.

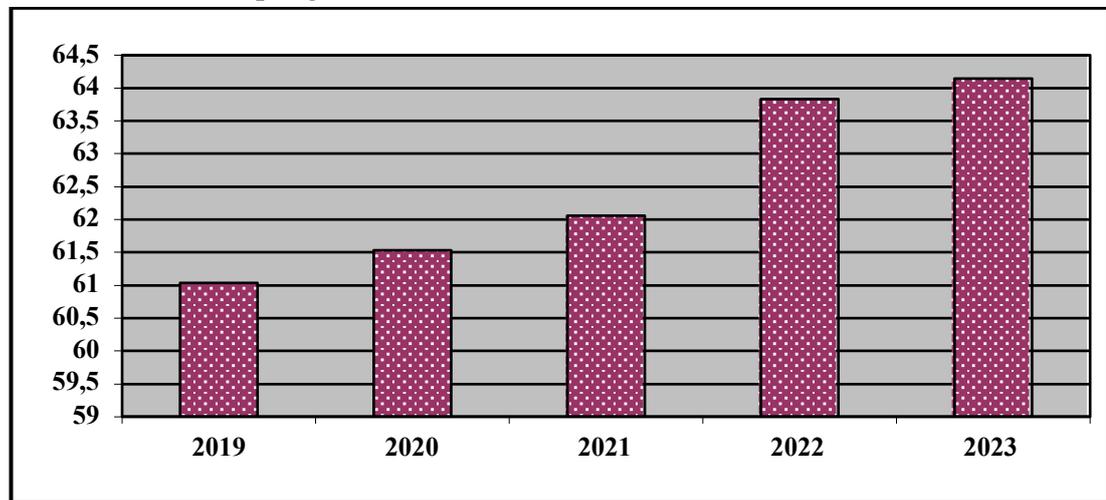
Untuk memperoleh Pinjaman Jangka Menengah atau Jangka Panjang, Rasio DSCR dipersyaratkan minimal 2,5 atau 250% (pasal 7, PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah). Tingginya angka DSCR Kota Bandar Lampung sebesar 53,69 atau 5.369,59% selama Tahun 2023 terjadi karena Pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai dengan perjanjian pinjaman daerah dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) PT SMI berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor PERJ-220/SMI/1221 Tanggal 29 Desember 2021, belum memiliki kewajiban

untuk membayar cicilan pokok dari pinjaman daerah tersebut karena masih berada dalam masa tenggang atau *grace periode* pembayaran cicilan pokok pinjaman yang akan berakhir sampai dengan Bulan April 2024.

### 9) Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan

$$\begin{array}{l} \text{Rasio Dana Perimbangan} \\ \text{Terhadap Total Pendapatan} \end{array} = \frac{1.475.148.922.746,00}{2.299.794.223.208,49} = 64,14\%$$

**Gambar 3.9. Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan Kota Bandar Lampung Tahun 2019 s.d. 2023**



Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan dihitung dengan membandingkan antara Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan dengan Total Realisasi Pendapatan. Yang termasuk dalam Dana Perimbangan antara lain : Pendapatan Bagian Daerah dari PBB, PPh, Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Rasio ini mengukur sumbangan Dana Perimbangan dalam menyediakan dana pembangunan. Standar ideal, porsi terbesar dalam unsur Pendapatan adalah PAD. Sisanya diperoleh dari Dana Perimbangan dan Dana Pinjaman yang bersifat menutup defisit anggaran. Semakin kecil angka rasio yang dihasilkan maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunannya sendiri. Rasio dengan angka di atas 50% berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Mandatory Spending**

Pemerintah setiap tahun selalu menganggarkan sejumlah belanja yang wajib dialokasikan dengan persentase tertentu. Alokasi belanja ini dikenal dengan *mandatory spending*, yaitu belanja atau pengeluaran negara yang besarnya sudah diatur oleh Undang-Undang (UU). Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

**A. Mandatory Spending Bidang Infrastruktur**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023	P-APBD 2023	REALISASI
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan :	649.023.517.494,00	708.345.769.498,00	619.653.615.051,00
	1) Belanja Operasi :	617.559.279.494,00	665.210.212.324,00	580.740.044.405,00
	a. belanja pegawai;	495.854.210.494,00	528.527.268.134,00	459.795.005.840,00
	b. belanja barang dan jasa;	73.928.069.000,00	87.648.344.190,00	72.499.553.749,00
	c. belanja hibah;	47.777.000.000,00	48.962.000.000,00	48.445.484.816,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	72.600.000,00	0,00
	2) Belanja Modal;	31.464.238.000,00	43.135.557.174,00	38.913.570.646,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan :	1.898.900.000,00	1.898.900.000,00	449.763.700,00
	1) Belanja Operasi :	1.898.900.000,00	1.898.900.000,00	449.763.700,00
	a. belanja pegawai;	0,00	0,00	0,00
	b. belanja barang dan jasa;	850.000.000,00	850.000.000,00	449.763.700,00
	c. belanja hibah;	1.048.900.000,00	1.048.900.000,00	0,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023	P-APBD 2023	REALISASI
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	0,00	0,00	0,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan :	5.335.519.881,00	5.943.505.003,00	5.271.240.902,00
	1) Belanja Operasi :	4.518.019.881,00	5.176.495.603,00	4.648.888.602,00
	a. belanja pegawai;	3.591.319.881,00	4.064.805.003,00	3.826.156.230,00
	b. belanja barang dan jasa;	926.700.000,00	1.111.690.600,00	822.732.372,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	817.500.000,00	767.009.400,00	622.352.300,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga :	12.835.454.078,00	14.589.305.301,00	13.306.349.853,00
	1) Belanja Operasi :	12.738.941.159,00	14.441.346.062,00	13.261.599.853,00
	a. belanja pegawai;	2.792.818.096,00	3.135.518.487,00	2.711.871.484,00
	b. belanja barang dan jasa;	2.216.171.663,00	2.925.876.175,00	2.571.228.369,00
	c. belanja hibah;	7.729.951.400,00	8.379.951.400,00	7.978.500.000,00
	d. belanja bantuan sosial.			
	2) Belanja Modal;	96.512.919,00	147.959.239,00	44.750.000,00
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di Bidang Pendidikan, antara lain :			
	1) Belanja Transfer :			
	Belanja bantuan keuangan			
	2) Sub Kegiatan pada OPD dst			
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	650.922.417.494,00	710.244.669.498,00	620.103.378.751,00
3.	Total Belanja Daerah	2.364.847.300.275,00	2.927.770.619.245,00	2.277.647.622.683,33
4.	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%	27,52	24,26	27,23

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi alokasi anggaran untuk Bidang Pendidikan di Kota Bandar Lampung telah memenuhi *mandatory spending* yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar 20%, yaitu mencapai sebesar 27,23%.

**B. Mandatory Spending Bidang Kesehatan**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023	P-APBD 2023	REALISASI
1.	a. Urusan Bidang Kesehatan :	256.711.967.600,00	350.756.536.766,00	329.076.276.118,33
	1) Belanja Operasi :	243.812.119.760,27	335.634.176.191,27	289.348.466.289,31
	a. belanja pegawai;	115.119.996.671,00	118.223.305.479,00	123.978.934.663,97
	b. belanja barang dan jasa;	128.391.623.089,27	216.581.620.712,27	164.540.281.625,34
	c. belanja hibah;	300.500.000,00	829.250.000,00	829.250.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023	P-APBD 2023	REALISASI
	2) Belanja Modal :	12.899.847.839,73	15.122.360.574,73	39.727.809.829,02
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan Bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain :	79.407.964.554,89	102.342.884.422,89	0,00
	1) Belanja Transfer :	14.612.749.249,00	38.550.868.699,00	0,00
	a. Belanja bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00
	b. Alokasi Fungsi Kesehatan dari Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi kepada Kabupaten/Kota sebesar 37,5% untuk BPJS Kesehatan	14.612.749.249,00	38.550.868.699,00	0,00
	2) Iuran Jaminan Kesehatan ASN	55.617.815.305,89	53.899.084.033,89	24.973.567.222,00
	3) Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
	4) Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00
	5) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	45.000.000,00	45.000.000,00	5.469.120,00
	6) Medical Check Up bagi KDH/WKDH	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
	7) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
	8) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum	5.000.000.000,00	8.215.531.690,00	0,00
	9) Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Dinas Pangan	3.000.000.000,00	500.000.000,00	0,00
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	336.119.932.154,89	453.099.421.188,89	329.076.276.118,33
3.	Total Belanja Daerah	2.364.847.300.275,00	2.927.770.619.245,00	2.277.647.622.683,33
4.	Gaji ASN	698.131.905.804,34	703.332.718.185,34	576.015.539.438,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.666.715.394.470,66	2.224.437.901.059,66	1.701.632.083.245,33
6.	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	20,17	20,37	19,34

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi alokasi anggaran untuk Bidang Kesehatan di Kota Bandar Lampung telah memenuhi *mandatory spending* yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar 10%, yaitu mencapai sebesar 19,34%.



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**C. Mandatory Spending Bidang Infrastruktur**

Sementara itu untuk Bidang Infrastruktur, Pemerintah Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya dapat memenuhi *mandatory spending* dibidang tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Perhitungan Pemenuhan *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Tahun 2022 dan 2023**

No	Komponen Perhitungan	Realisasi (Rp)	
		2023	2022
1.	a) Belanja Modal		
	1) Tanah	0,00	0,00
	2) Peralatan dan Mesin	66.160.112.894,02	39.214.431.118,00
	3) Gedung dan Bangunan	60.661.295.098,00	152.562.250.068,15
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	180.801.808.230,00	212.429.244.155,00
	5) Aset Tetap Lainnya	15.065.103.833,00	20.545.050.932,00
	6) Aset Lainnya	-	
	b) Belanja Pemeliharaan	22.391.873.677,80	24.795.942.065,00
2.	a) Belanja Hibah	749.535.816,00	350.000.000,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	345.829.729.548,82	449.896.918.338,15
4.	Total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.	2.277.647.622.683,33	2.273.619.562.000,00
5.	Persentase porsi realisasi belanja infrastruktur dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.	15,18%	19,79%

Sesuai dengan Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2023, Pemerintah Daerah seharusnya mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dari T.A. 2022 sampai dengan T.A. 2027. Namun demikian, dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, porsi belanja infrastruktur pelayanan publik justru menurun dari 19,79% menjadi 15,18%.

Lebih lanjut, APBD murni dan perubahan yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi, anggaran belanja hibah uang, barang dan jasa disandingkan dengan realisasinya dapat dilihat urutan prioritas belanja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Prioritas Urusan Pemerintah Daerah**

No	Urusan Pemerintah Daerah	APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Realisasi Belanja 2023 (Rp)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.415.152.611.343,00	1.842.475.411.324,00	427.322.799.981,00	1.346.861.690.574,00
2	Belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	188.219.504.599,00	214.088.830.310,00	25.869.325.711,00	159.465.723.820,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Urusan Pemerintah Daerah	APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Realisasi Belanja 2023 (Rp)
3	Belanja Urusan Pemerintahan Pilihan	41.628.810.255,11	48.885.270.958,11	7.256.460.703,00	35.610.365.619,00
4	Hibah Yang Dianggarkan Pada Belanja Hibah	103.051.155.875,00	119.391.939.549,00	16.340.783.674,00	104.552.335.261,00
5	Hibah Yang Dianggarkan Pada Belanja Barang dan Jasa	206.916.480.018,00	292.743.186.562,00	85.826.706.544,00	171.667.872.245,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.954.968.562.090,11</b>	<b>2.517.584.638.703,11</b>	<b>562.616.076.613,00</b>	<b>1.818.157.987.519,00</b>



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah.

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Entitas pelaporan keuangan daerah ialah pemerintah daerah secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada sekretariat DPRD, sekretariat daerah, dinas-dinas dan lembaga teknis daerah.

#### **2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandar Lampung tersaji dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandar Lampung. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting dapat disajikan sebagai berikut :

##### **a. Basis Akuntansi**

- 1) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung menggunakan basis akrual yang diterapkan mulai Tahun Anggaran 2015 secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

- 3) Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO dan beban berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO dan beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah walaupun kas belum diterima atau belum dibayar oleh kas daerah.

### **b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan**

- 1) Pendapatan ialah penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- 2) Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan saja pada saat kas diterima oleh kas daerah.
- 3) Pendapatan diakui dengan basis kas, yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai pendapatan apabila telah ada realisasi penerimaan kas oleh kas daerah.
- 4) Pendapatan dicatat dengan azas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran.
- 5) Pengembalian atau koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan yang bersangkutan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya, dicatat sebagai pengurangan ekuitas dana lancar.

### **c. Kebijakan Akuntansi Belanja**

- 1) Belanja ialah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- 2) Beban menurut basis akrual diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, baik kas sudah dikeluarkan maupun kas belum dikeluarkan oleh kas daerah.



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

- 3) Belanja diakui dengan basis kas, yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai belanja apabila telah ada realisasi pengeluaran kas oleh kas daerah.
- 4) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, dibukukan ke dalam pendapatan lain-lain.
- 5) Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap).

### **d. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

- 1) Pembiayaan ialah transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 2) Pembiayaan diakui dengan basis kas, yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai pembiayaan apabila telah ada realisasi penerimaan atau pengeluaran kas oleh kas daerah.
- 3) Sumber penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima oleh kas daerah.
- 4) Sumber pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan oleh kas daerah.
- 5) Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui sebagai pembiayaan netto.
- 6) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang diterima dan nilai nominal kas yang dikeluarkan.

### **e. Kebijakan Akuntansi Perhitungan Fihak Ketiga**

- 1) Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ialah transaksi keuangan pemerintah daerah yang tidak mempengaruhi anggaran. Transaksi PFK ini terjadi berupa penerimaan kas yang berasal dari pungutan yang akan disetor kepada fihak ketiga, misalnya : PPh, PPN, Iuran ASKES, Iuran TASPEN, Iuran TAPERUM dan lain-lain.
- 2) Penerimaan kas yang berasal dari pungutan dibukukan dalam pos penerimaan PFK.



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 3) Penyetoran kas kepada pihak ketiga atas penerimaan kas yang berasal dari pungutan dibukukan dalam pos pengeluaran PFK.
- 4) Penerimaan dan pengeluaran PFK diakui berdasarkan basis kas, yaitu dibukukan saat diterima atau dikeluarkan dari kas daerah.
- 5) Penerimaan dan pengeluaran PFK dinilai sebesar jumlah nominal rupiah yang tercantum dalam pungutan.
- 6) Selisih penerimaan PFK dan pengeluaran PFK atau sisa penerimaan PFK yang masih harus disetorkan kepada pihak ketiga dibukukan dalam utang PFK.

**f. Kebijakan Akuntansi Aset**

- 1) Aset ialah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang.
- 2) Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis tersebut ialah sumber daya alam, seperti : hutan, sungai, danau atau rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah seperti candi.

**PROPERTY INVESTASI**

- 1) Sehubungan dengan terbitnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi (PSAP 17) yang mulai berlaku efektif penerapannya di Tahun 2022, terdapat kemungkinan satuan kerja (Satker) di lingkungan pemerintah daerah untuk melakukan reklasifikasi keluar dari pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya atas penyajian aset berwujud yang bersifat properti di masing-masing Neraca per 31 Desember 2022.
- 2) Paragraf 63 sampai dengan paragraf 66 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan dan paragraf 4 sampai dengan paragraf 14 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, memberikan panduan bahwa aset tetap pemerintah yang disajikan di Neraca pos Aset Tetap diberikan tekanan, yaitu :
  - a. aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

- c. dalam kondisi siap dipakai; dan
  - d. jika aset tetap tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah maka disajikan di Neraca di pos Aset Lainnya, termasuk dalam hal ini asset kerjasama dalam kemitraan.
- 3) Properti investasi ialah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk :
- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
  - b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- 5) Hasil reklasifikasi BMD properti investasi dan/atau perolehan awal baru BMD yang memenuhi karakteristik properti investasi disajikan pada Neraca dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

### **ASET LANCAR**

- 1) Aset lancar ialah sumber daya ekonomis yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.
- 2) Aset lancar meliputi antara lain : kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

### **DANA BERGULIR**

- 1) Dana bergulir ialah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- 2) Dana bergulir diakui sebagai investasi setelah dana tersebut keluar dari kas umum daerah.
- 3) Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- 4) Pendapatan atas dana bergulir (bunga, bagi hasil dan lain-lain) diakui pada kelompok pendapatan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

- 5) Penarikan atau penagihan kembali dana bergulir diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
- 6) Dana bergulir disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.
- 7) Dana bergulir disajikan dalam Laporan Operasional sebagai Piutang. Penyajian Piutang Dana Bergulir atas Pokok Pinjaman diklasifikasikan berdasarkan periode jatuh temponya sehingga disajikan pada kelompok aset lancar maupun aset non lancar.
- 8) Dana bergulir disajikan dalam Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen – Dana Bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Reliazable Value*).
- 9) Nilai bersih yang dapat direalisasikan diperoleh dengan mengurangi perkiraan dana bergulir yang diperkirakan tidak tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan
- 10) Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir. Adapun jatuh tempo dana bergulir tersebut adalah 5 (lima) tahun dan/atau sesuai yang tertera dalam perjanjian.
- 11) Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan.

### KAS DAN SETARA KAS

- 1) Kas ialah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Setara kas ialah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Contoh setara kas adalah deposito dengan jangka waktu kurang dari tiga bulan.
- 2) Kas dan setara kas dibagi kedalam dua pos, yaitu : kas di kas daerah dan kas di pemegang kas.



## **PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG** **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

- 3) Kas di kas daerah ialah saldo kas dan setara kas yang ada di pembukuan kas daerah sedangkan kas di pemegang kas ialah saldo kas yang belum dipertanggungjawabkan oleh satuan pemegang kas.
- 4) Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

### **PIUTANG LANCAR**

- 1) Piutang lancar merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- 2) Piutang lancar diakui pada akhir periode akuntansi dan diukur sebesar nilai nominal.

### **PERSEDIAAN**

- 1) Persediaan ialah barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam satu periode akuntansi.
- 2) Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

### **ASET TETAP**

- 1) Aset tetap ialah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian/seluruh APBD melalui : pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.
- 3) Aset tetap meliputi : tanah, jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan, bangunan gedung, kendaraan, alat kantor dan rumah tangga dan lain-lain.
- 4) Pengklasifikasian aset tetap mengacu pada klasifikasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan MENDAGRI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

- 5) Aset tetap diakui pada periode berjalan dan dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 6) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- 7) Biaya perolehan mencakup harga pembelian ditambah ongkos-ongkos, misalnya : biaya pengangkutan, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya pengurusan hak dan lain-lain yang dikeluarkan sampai dengan aset yang bersangkutan siap untuk dipergunakan.
- 8) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- 9) Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi : biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurangan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dibongkar.
- 10) Jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan dan bangunan gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun aset tetap yang bersangkutan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi : nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama serta biaya pembebasan. Terhadap jalan dan jembatan yang dibangun melalui swakelola, harga perolehan ditentukan sebesar biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi : biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta biaya pembebasan.
- 11) Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi : harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

- 12) Alat besar, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat laboratorium, alat kedokteran dan alat lainnya diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dimaksud sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi : harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- 13) Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- 14) Penambahan ialah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
- 15) Pengurangan ialah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
- 16) Pengembangan ialah peningkatan nilai aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan :
  - a) Memperpanjang usia manfaat.
  - b) Meningkatkan efisiensi dan/atau.
  - c) Menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap.Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

### **g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

- 1) Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
- 2) Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu.
- 3) Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

- 4) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- 5) Kewajiban jangka panjang ialah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
- 6) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
- 7) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.

**h. Kebijakan Akuntansi Ekuitas**

- 1) Ekuitas ialah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pada tanggal laporan.

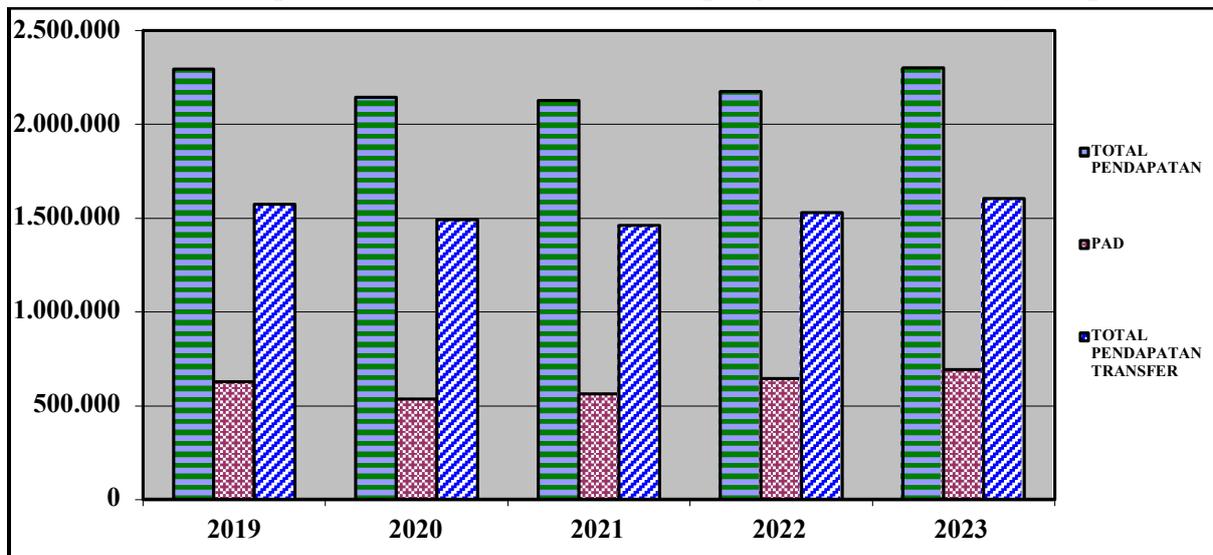
**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**a. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Selain berasal dari pendapatan dana perimbangan atau transfer pemerintah pusat dan daerah, pendapatan daerah juga berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari gambar di bawah terlihat bahwa Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu Tahun 2019-2023 cenderung mengalami fluktuasi. Contohnya pada Tahun 2022 terjadi peningkatan Pendapatan Daerah sebesar Rp.46.366.226.126,30 dengan persentase peningkatan sebesar 2,18% dibandingkan Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan pada Tahun 2023 terjadi peningkatan Pendapatan Daerah sebesar Rp.125.678.424.930,28 dengan persentase peningkatan sebesar 5,78% dibandingkan Pendapatan Daerah Tahun 2022.

**Gambar 5.1. Realisasi Total Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Pendapatan Transfer Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023 (juta rupiah)**





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Ditinjau dari kontribusi masing-masing pos Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung selama periode waktu tersebut, pos Pendapatan Daerah yang memberikan kontribusi tertinggi adalah pos Total Pendapatan Transfer, dimana pada Tahun 2021 memberikan kontribusi sebesar 68,75%, Tahun 2022 memberikan kontribusi sebesar 70,29% dan Tahun 2023 memberikan kontribusi sebesar 69,79% terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung. Sementara itu, pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya memberikan kontribusi sebesar 26,52% pada Tahun 2021, sebesar 29,71% pada Tahun 2022 dan sebesar 30,21% pada Tahun 2023 terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

Secara lebih rinci, berikut adalah pos-pos laporan realisasi anggaran pendapatan untuk Tahun 2023 dan 2022, yaitu :

	<b>APBD-P Tahun 2023 (Rp.)</b>	<b>Realisasi Tahun 2023 (Rp.)</b>	<b>Persentase Capaian (%)</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 (Rp.)</b>
<b>5.1.1. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.930.424.128.001,10</b>	<b>2.299.794.223.208,49</b>	<b>78,48</b>	<b>2.174.115.798.278,21</b>
<b>5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.316.723.312.406,10</b>	<b>694.676.220.527,49</b>	<b>52,76</b>	<b>645.965.433.702,21</b>

Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.48.710.786.825,28 atau sebesar 7,54% dibandingkan Realisasi Tahun 2022. Akan tetapi, Realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun 2023 ini masih tetap tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan langkah-langkah untuk mengupayakan adanya peningkatan Realisasi terhadap Target Pendapatan Asli Daerah sepanjang Tahun Anggaran 2023. Adapun hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung antara lain : telah melakukan audit terhadap Wajib Pajak yang belum sesuai antara potensi dengan jumlah setoran pajaknya. Dilakukan secara persuasif dengan melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak; penagihan piutang/tunggakan pajak secara intensif dan kontinyu dan penertiban Objek Pajak yang memiliki tunggakan pajak dengan didukung melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung; pemutakhiran dan peremajaan data Objek Pajak dan Wajib Pajak dengan melakukan pendataan ulang terhadap Objek Pajak dan melakukan pendataan terhadap Objek Pajak baru yang belum menjadi wajib pajak; telah melaksanakan penerapan pembayaran pajak secara online (*Payment Online System*) di seluruh kantor cabang PT Bank Lampung untuk mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak. Proses pemungutan pajak dilakukan dengan cara menginput data Objek Pajak dengan menggunakan SIMPATDA dan SAI-PEPADUN sehingga Wajib Pajak yang memiliki tunggakan harus terlebih dahulu melunasi tunggakan pajaknya untuk memperoleh SPTPD dan SKPD; melakukan kerjasama dengan PT Bank Lampung untuk melakukan pemasangan *tapping box* dalam pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir (sebagaimana arahan KPK); peninjauan kembali kebijakan yang berkenaan dengan Pajak Restoran terhadap warung makan tenda yang berdasarkan omzet atau keuntungannya dapat dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan serta melakukan kegiatan pengawasan Objek Pajak Restoran; optimalisasi pemungutan Pajak Reklame dari papan nama toko dan reklame dalam ruangan; optimalisasi pemungutan Pajak Kos-Kosan/Rumah Kos; telah melaksanakan penerapan *Tax Clearance* secara *Link-System* dengan perangkat daerah terkait (salah satunya dengan DPM PTSP); akan melaksanakan proses pelayanan perpajakan secara online (Pajak Online) dari proses penerbitan SPTPD sampai dengan proses pembayaran akan dilakukan oleh Wajib Pajak secara online; penutupan objek-objek Pajak Reklame dengan stiker yang setelah diberikan teguran baik lisan maupun tertulis tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran pajaknya; penagihan tunggakan dengan menyampaikan STPD kepada Wajib Pajak dan melakukan penagihan tunggakan secara langsung terhadap Wajib Pajak; meningkatkan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan untuk lebih intensif dalam melakukan penagihan tunggakan dan PBB-P2 tahun berjalan; meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dengan membuka loket pembayaran PBB-P2 di setiap Kecamatan, menyediakan mobil kas keliling PT Bank Lampung untuk menerima pembayaran PBB serta efisiensi pengurusan administrasi perpajakan. Bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam upaya melakukan penagihan tunggakan PBB yang nilainya diatas Rp.50.000.000,00; melakukan pendataan massal terhadap seluruh Objek PBB-P2 di 20 (*dua puluh*) Wilayah Kecamatan Kota Bandar Lampung; memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak khususnya PBB-P2 dan menghimbau agar pembayaran dilakukan



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

<b>APBD-P Tahun 2023 (Rp.)</b>	<b>Realisasi Tahun 2023 (Rp.)</b>	<b>Persentase Capaian (%)</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 (Rp.)</b>
--	---	---------------------------------------	---

sebelum jatuh tempo; menambah jumlah petugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan terkait BPHTB; mempercepat proses penerbitan SSPD BPHTB; melaksanakan kerja sama dengan BPN Kota Bandar Lampung dalam rangka verifikasi data BPHTB; penguatan regulasi pendapatan daerah; intensifikasi perolehan pendapatan daerah dimaksudkan untuk mengefektifkan pendapatan melalui optimalisasi pendapatan rutin daerah seperti dari sektor perpajakan, retribusi daerah, pendapatan Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penerimaan lain. Hal tersebut dilakukan melalui : a). produk hukum dan penegakan hukum serta sanksi yang jelas dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah, b). pendataan Wajib Pajak yang akurat dan berkelanjutan dengan sistem teknologi yang modern dan mutakhir, c). meningkatkan disiplin dan kapasitas aparat daerah dalam hal pemungutan pajak dan pengelolaannya, d). pembinaan manajemen Perusahaan Daerah/BUMD untuk mendukung penerimaan daerah, e). pemasangan *tapping box* pada objek Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir; ekstensifikasi merupakan aktivitas mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah dari pihak eksternal. Strategi *fund rising* ini dimungkinkan dengan pihak swasta yang memiliki komitmen terhadap pembangunan di Kota Bandar Lampung; peningkatan kompetensi personil pengelola pendapatan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

**5.1.1.1.1. Pajak Daerah 620.195.262.269,00 546.953.963.871,38 88,19 498.946.403.154.86**

Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Pajak Daerah untuk Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.48.007.560.716,52 atau sebesar 9,62% dibandingkan Realisasi Tahun 2022.

Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

**5.1.1.1.1.1. Pajak Hotel 39.000.000.000,00 40.645.689.522,00 104,22 36.235.905.687,00**

Pendapatan dari Pajak Hotel melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023, yaitu mencapai sebesar 104,22%.

Pajak Hotel terdiri dari :

a. Pajak Hotel	39.000.000.000,00	40.645.689.522,00	104,22	36.235.905.687,00
- Pajak Hotel	39.000.000.000,00	40.645.689.522,00	104,22	36.235.905.687,00

**5.1.1.1.1.2. Pajak Restoran 116.000.000.000,00 116.440.711.478,00 100,38 101.352.212.240,00**

Pendapatan dari Pajak Restoran melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023, yaitu mencapai sebesar 100,38%.

Pajak Restoran terdiri dari :

a. Pajak Restoran dan Sejenisnya	116.000.000.000,00	116.440.711.478,00	100,38	101.352.212.240,00
- Pajak Restoran dan Sejenisnya	116.000.000.000,00	116.440.711.478,00	100,38	101.352.212.240,00

**5.1.1.1.1.3. Pajak Hiburan 24.000.000.000,00 24.640.500.573,00 102,67 20.344.872.277,00**

Pendapatan dari Pajak Hiburan melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023, yaitu mencapai sebesar 102,67%.

Pajak Hiburan terdiri dari :

a. Pajak Tontonan Film	13.900.000.000,00	13.018.563.871,00	93,66	10.978.793.316,00
- Pajak Tontonan Film	13.900.000.000,00	13.018.563.871,00	93,66	10.978.793.316,00
b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	93.949.000,00	302.547.036,00	322,03	111.785.325,00
- Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	93.949.000,00	302.547.036,00	322,03	111.785.325,00
c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	884.345.000,00	1.305.789.397,00	147,66	1.046.642.552,00
- Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	884.345.000,00	1.305.789.397,00	147,66	1.046.642.552,00
d. Pajak Permainan Biliar dan Bowling	237.300.000,00	287.530.245,00	121,17	151.557.129,00
- Pajak Permainan Biliar dan Bowling	237.300.000,00	287.530.245,00	121,17	151.557.129,00
e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan	7.707.676.000,00	8.591.189.211,00	111,46	7.017.768.800,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
Ketangkasan				
- Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	7.707.676.000,00	8.591.189.211,00	111,46	7.017.768.800,00
f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.176.730.000,00	1.134.880.813,00	96,44	1.038.325.155,00
- Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.176.730.000,00	1.134.880.813,00	96,44	1.038.325.155,00
<b>5.1.1.1.1.4. Pajak Reklame</b>	<b>29.000.000.000,00</b>	<b>30.600.868.066,00</b>	<b>105,52</b>	<b>28.888.722.160,86</b>
Pendapatan dari Pajak Reklame melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023, yaitu mencapai sebesar 105,52%.				
Pajak Reklame terdiri dari :				
a. Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	27.262.000.000,00	30.068.767.016,00	110,30	28.589.388.840,86
- Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	27.262.000.000,00	30.068.767.016,00	110,30	28.589.388.840,86
b. Pajak Reklame Kain	800.000.000,00	241.622.955,00	30,20	185.467.750,00
- Pajak Reklame Kain	800.000.000,00	241.622.955,00	30,20	185.467.750,00
c. Pajak Reklame Melekat/Stiker	20.000.000,00	28.569.045,00	142,85	102.656.250,00
- Pajak Reklame Melekat/Stiker	20.000.000,00	28.569.045,00	142,85	102.656.250,00
d. Pajak Reklame Berjalan	500.000.000,00	245.028.592,00	49,01	0,00
- Pajak Reklame Berjalan	500.000.000,00	245.028.592,00	49,01	0,00
e. Pajak Reklame Udara	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Pajak Reklame Udara	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
f. Pajak Reklame Film/Slide	400.000.000,00	16.880.458,00	4,22	11.209.320,00
- Pajak Reklame Film/Slide	400.000.000,00	16.880.458,00	4,22	11.209.320,00
<b>5.1.1.1.1.5. Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>160.000.000.000,00</b>	<b>127.887.253.845,00</b>	<b>79,93</b>	<b>117.411.221.038,00</b>
Permasalahan yang menyebabkan pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena tingginya target yang telah ditetapkan mengingat Pajak Penerangan Jalan ini menggunakan metode <i>Self Assesment</i> yang mana mekanisme penetapan pajak yang dihitung ditetapkan dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak sehingga Realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang diterima oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sepanjang Tahun Anggaran 2023 sudah sesuai dengan perhitungan Wajib Pajak.				
Pajak Penerangan Jalan terdiri dari :				
a. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	160.000.000.000,00	127.887.253.845,00	79,93	117.411.221.038,00
- Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	160.000.000.000,00	127.887.253.845,00	79,93	117.411.221.038,00
<b>5.1.1.1.1.6. Pajak Parkir</b>	<b>8.945.262.269,00</b>	<b>10.189.066.660,00</b>	<b>113,90</b>	<b>8.424.054.160,00</b>
Pendapatan dari Pajak Parkir melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023, yaitu mencapai sebesar 113,90%.				
Pajak Parkir terdiri dari :				
a. Pajak Parkir	8.945.262.269,00	10.189.066.660,00	113,90	8.424.054.160,00
- Pajak Parkir	8.945.262.269,00	10.189.066.660,00	113,90	8.424.054.160,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
<b>5.1.1.1.1.7. Pajak Air Tanah</b>	<b>3.100.000.000,00</b>	<b>3.891.528.162,88</b>	<b>125,53</b>	<b>3.097.380.853,00</b>
Pendapatan dari Pajak Air Tanah melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023, yaitu mencapai sebesar 125,53%.				
Pajak Air Tanah terdiri dari :				
a. Pajak Air Tanah	3.100.000.000,00	3.891.528.162,88	125,53	3.097.380.853,00
- Pajak Air Tanah	3.100.000.000,00	3.891.528.162,88	125,53	3.097.380.853,00
<b>5.1.1.1.1.8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>198.559.683,00</b>	<b>132,37</b>	<b>171.833.500,00</b>
Pendapatan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023, yaitu mencapai sebesar 132,37%.				
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terdiri dari :				
a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000,00	198.559.683,00	132,37	171.833.500,00
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	150.000.000,00	198.559.683,00	132,37	171.833.500,00
<b>5.1.1.1.1.9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)</b>	<b>115.000.000.000,00</b>	<b>84.902.732.315,00</b>	<b>73,83</b>	<b>83.809.344.520,00</b>
Permasalahan yang menyebabkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena :				
<ul style="list-style-type: none"><li>• kurangnya kesadaran sebagian Wajib Pajak yang memiliki karakteristik penunggak pajak, dimana dalam rentang waktu Tahun 2018 s.d. Tahun 2023 masih terdapat tunggakan PBBP2 sebesar Rp.186.534.312.814,00.</li><li>• adanya Objek Pajak yang tidak diketahui pemiliknya atau belum balik nama dan atau masih berupa tanah kosong yang tidak diketahui pemiliknya ataupun pemiliknya tidak berada atau berdomisili di wilayah tersebut.</li><li>• adanya kebijakan Walikota Bandar Lampung yang memberikan keringanan PBBP2 kepada wajib pajak dengan ketentuan untuk nilai PBBP2 s.d. Rp.100.000,00 diberikan potongan sebesar 100%, nilai PBBP2 Rp.100.001,00 s.d. Rp.300.000,00 diberikan potongan sebesar 30% dan nilai PBBP2 Rp.300.001,00 s.d. Rp.500.000,00 diberikan potongan sebesar 20%.</li></ul>				
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) terdiri dari :				
a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	115.000.000.000,00	84.902.732.315,00	73,83	83.809.344.520,00
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	115.000.000.000,00	84.902.732.315,00	73,83	83.809.344.520,00
<b>5.1.1.1.1.10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	<b>125.000.000.000,00</b>	<b>107.557.053.566,50</b>	<b>86,05</b>	<b>99.210.856.719,00</b>
Permasalahan yang menyebabkan pendapatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena tingginya target yang ditetapkan dan pendapatan dari BPHTB sangat dipengaruhi oleh adanya transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, baik melalui proses waris, pembagian hak bersama, hibah dan transaksi jual beli.				
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terdiri dari :				
a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak	125.000.000.000,00	107.557.053.566,50	86,05	99.210.856.719,00
- BPHTB-Pemindahan Hak	125.000.000.000,00	107.557.053.566,50	86,05	99.210.856.719,00
<b>5.1.1.1.2. Retribusi Daerah</b>	<b>79.484.673.205,48</b>	<b>32.809.743.878,00</b>	<b>41,28</b>	<b>20.313.700.256,75</b>
Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Retribusi Daerah untuk Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.12.496.043.621,25 atau sebesar 61,52% dibandingkan Realisasi Tahun 2022.				
Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :				



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
<b>5.1.1.1.2.1. Retribusi Jasa Umum</b>	<b>50.977.287.807,48</b>	<b>17.571.797.800,00</b>	<b>34,47</b>	<b>14.691.946.320,00</b>
Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :				
a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	33.519.333.000,00	13.537.550.300,00	40,39	10.760.342.500,00
Permasalahan yang mendasari pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena pada saat APBD-P ditetapkan pada Bulan November 2023, target APBD-P mengalami kenaikan dari APBD Murni yaitu dari sebesar Rp.13.519.333.000,00 menjadi sebesar Rp.33.519.333.000,00 sehingga tidak memungkinkan untuk Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai target yang ditetapkan pada APBD-P dalam waktu 2 ( <i>dua</i> ) bulan.				
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terdiri dari :				
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	33.519.333.000,00	13.537.550.300,00	40,39	10.760.342.500,00
b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.150.178.067,48	591.525.000,00	8,27	558.807.000,00
Permasalahan yang mendasari pendapatan dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena penetapan target tidak sebanding dengan realitas kapasitas lahan parkir yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Adanya pengalihan pengelolaan lahan parkir di beberapa pasar kepada PD Pasar Tapis Berseri dan ke BPPRD Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan penurunan realisasi pelayanan parkir, adanya penutupan ruas jalan di wilayah Pasar Pasir Gintung dan sekitarnya karena adanya pembangunan Pasar Rakyat Pasir Gintung, penyempitan lahan parkir yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima, penurunan jumlah kendaraan yang masuk wilayah Pasar Tengah dan Pasar Pagi Teluk Betung yang dikarenakan menurunnya jumlah pembeli karena maraknya belanja <i>online</i> dan Dinas Perhubungan pada Tahun 2023 telah melakukan penawaran pengelolaan parkir ke pihak ketiga ( <i>Secure Park</i> ) untuk wilayah Pasar Tengah tetapi belum ada yang berminat karena alasan keamanan investasi.				
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terdiri dari :				
- Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.150.178.067,48	591.525.000,00	8,27	558.807.000,00
c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.000.000.000,00	2.134.217.500,00	53,36	2.042.962.300,00
Permasalahan yang mendasari pendapatan dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena pada saat APBD-P ditetapkan pada Bulan November 2023, target APBD-P mengalami kenaikan dari APBD Murni yaitu dari sebesar Rp.2.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.4.000.000.000,00 sehingga tidak memungkinkan untuk Dinas Perhubungan untuk mencapai target yang ditetapkan pada APBD-P dalam waktu 2 ( <i>dua</i> ) bulan.				
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :				
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.000.000.000,00	2.134.217.500,00	53,36	2.042.962.300,00
d. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.431.474.100,00	476.767.500,00	33,31	468.347.000,00
Permasalahan yang mendasari pendapatan dari Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena pada saat APBD-P ditetapkan pada Bulan November 2023, target APBD-P mengalami kenaikan dari APBD Murni yaitu dari sebesar Rp.431.474.100,00 menjadi sebesar Rp.1.431.474.100,00 sehingga tidak memungkinkan untuk Dinas Pemadam Kebakaran untuk mencapai target yang ditetapkan pada APBD-P dalam waktu 2 ( <i>dua</i> ) bulan.				
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran terdiri dari :				
- Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	1.431.474.100,00	476.767.500,00	33,31	468.347.000,00
e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	30.000.000,00	89.641.500,00	298,81	61.730.500,00
Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023, yaitu mencapai sebesar 298,81%.				
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terdiri dari :				
- Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang,	30.000.000,00	89.641.500,00	298,81	61.730.500,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
dan Perlengkapannya				
f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	4.846.302.640,00	742.096.000,00	15,31	799.757.020,00
Permasalahan yang mendasari pendapatan dari Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena target pendapatan yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun APBD Kota Bandar Lampung terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan potensi yang ada.				
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi terdiri dari :				
- Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	4.846.302.640,00	742.096.000,00	15,31	799.757.020,00
<b>5.1.1.1.2.2. Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>7.000.646.166,00</b>	<b>4.131.940.100,00</b>	<b>59,02</b>	<b>3.818.041.643,00</b>
Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :				
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.455.379.385,00	2.022.825.440,00	82,38	1.735.298.240,00
Permasalahan yang mendasari pendapatan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, baik pada Sekretariat Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perdagangan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena adanya pengaruh pandemi Covid-19 sehingga pemanfaatan kekayaan daerah selama Tahun 2023 masih mengalami penurunan akibat berkurangnya kegiatan yang menggunakan fasilitas kekayaan daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung, baik dalam bidang infrastruktur maupun perdagangan.				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri dari :				
- Retribusi Penyewaan Bangunan	2.255.379.385,00	1.921.500.440,00	85,20	1.636.098.240,00
- Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	99.200.000,00
- Retribusi Pemakaian Alat	200.000.000,00	101.325.000,00	50,66	0,00
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.254.346.650,00	1.225.038.000,00	54,34	1.124.484.000,00
Permasalahan yang mendasari pendapatan dari Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena :				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak sedikit dari Wajib Retribusi (Pedagang) yang tidak dapat melanjutkan aktivitas niaga atau berdagang dikarenakan tutup atau bangkrut sehingga potensi penerimaan pelayanan pasar menjadi tidak maksimal. Perlu diketahui bahwa Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung saat ini hanya mengelola 8 (<i>delapan</i>) pasar tradisional, yaitu : Pasar Bambu Kuning, Pasar Bawah, Pasar Cimeng, Pasar Kangkung, Pasar Panjang, Pasar SMEP, Pasar Tamin dan Pasar Way Halim. Sedangkan 2 (<i>dua</i>) pasar tradisional, yaitu : Pasar Pasir Gintung dan Pasar Way Halim belum diserahkan kewenangan pengelolaannya oleh PD Pasar Tapis Berseri.</li> <li>• Adanya tunggakan setoran pihak ketiga yaitu PT Cahaya Karunia Baru sejak Bulan Mei sampai dengan Desember 2022 sejumlah Rp.87.360.000,00.</li> <li>• Adanya tunggakan setoran pihak ketiga yaitu PT Cahaya Karunia Baru/Pasar Gudang Lelang untuk Bulan Desember 2023 sejumlah Rp.10.920.000,00.</li> <li>• Adanya tunggakan royalti pengembang Pasar Tugu yaitu PT Prabu Makmur sejumlah Rp.646.216.890,00 dan pengembang Pasar Bambu Kuning yaitu PT Sanjaya Rezeki Mas sejumlah Rp.753.783.110,00.</li> </ul>				
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan terdiri dari :				
- Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	2.254.346.650,00	1.225.038.000,00	54,34	1.124.484.000,00
c. Retribusi Tempat Pelelangan	311.657.131,00	278.470.660,00	89,35	299.668.403,00
Permasalahan yang mendasari pendapatan dari Retribusi Tempat Pelelangan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena tempat pelelangan Ujung Bom dan Pabrik Es meminta dispensasi 1 ( <i>satu</i> ) bulan untuk perbaikan dermaga dan perbaikan mesin, sedangkan Retribusi Sewa Kios PT Natuna Samudera Lestari tidak membayar PAD selama Tahun Anggaran 2023 karena belum beroperasi.				
Retribusi Tempat Pelelangan terdiri dari :				



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
- Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	75.000.000,00	79.470.660,00	105,96	79.382.688,00
- Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	236.657.131,00	199.000.000,00	84,09	220.285.715,00
d. Retribusi Terminal	1.800.000.000,00	523.264.000,00	29,07	538.236.000,00
Permasalahan yang mendasari pendapatan dari Retribusi Terminal tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 antara lain adalah karena terdapat banyak jalan lingkaran luar kota yang dapat dilalui dan tidak menggunakan jasa terminal, semakin maraknya kendaraan <i>online</i> , adanya jalan tol Trans Sumatera dan sering terjadinya kelangkaan BBM atau Solar.				
Retribusi Terminal terdiri dari :				
- Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	1.800.000.000,00	523.264.000,00	29,07	538.236.000,00
e. Retribusi Rumah Potong Hewan	179.263.000,00	82.342.000,00	45,93	120.355.000,00
Permasalahan yang mendasari pendapatan dari Retribusi Rumah Potong Hewan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Pertanian, sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di RPH Way Laga Kota Bandar Lampung.				
Retribusi Rumah Potong Hewan terdiri dari :				
- Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	179.263.000,00	82.342.000,00	45,93	120.355.000,00
<b>5.1.1.1.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>21.506.739.232,00</b>	<b>11.106.005.978,00</b>	<b>51,64</b>	<b>1.803.712.293,75</b>
Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :				
a. Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	14.850.000,00	0,00	0,00	0,00
Permasalahan yang mendasari pendapatan dari Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena pengurusan izin trayek yang kurang efektif dan efisien sehingga menyebabkan para wajib retribusi kesulitan dalam mengurusnya dikarenakan tempat pendaftaran pengurusan izin trayek dan pembayaran dilakukan di lokasi yang berbeda. Selain itu juga dikarenakan banyaknya angkutan kota yang tidak memperpanjang izin trayek.				
Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum terdiri dari :				
- Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	14.850.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	21.491.889.232,00	11.106.005.978,00	51,68	1.803.712.293,75
Permasalahan yang mendasari pendapatan dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena masih kurangnya sosialisasi terhadap prosedur penerbitan persetujuan bangunan gedung sehingga masyarakat belum mengerti sepenuhnya terhadap Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ini.				
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung terdiri dari :				
- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	21.491.889.232,00	11.106.005.978,00	51,68	1.803.712.293,75
<b>5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>40.276.185.222,10</b>	<b>11.026.667.082,08</b>	<b>27,38</b>	<b>14.566.440.743,36</b>

Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp.3.539.773.661,28) atau sebesar (24,30%) dibandingkan Realisasi Tahun 2022.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
<b>5.1.1.1.3.1. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD</b>	<b>40.276.185.222,10</b>	<b>11.026.667.082,08</b>	<b>27,38</b>	<b>14.566.440.743,36</b>
Permasalahan yang menyebabkan Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena masih adanya BUMD seperti PDAM Way Rilau yang mengalami kerugian usaha sehingga belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal atas penyertaan modal dalam bentuk Deviden kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.				
Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD terdiri dari :				
a. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Lembaga Keuangan)	34.276.185.222,10	11.026.667.082,08	32,17	14.566.440.743,36
- Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Lembaga Keuangan)- PT BPD Lampung	13.000.000.000,00	7.217.718.421,08	55,52	7.681.819.576,36
- Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Lembaga Keuangan)- PT Bank Waway Lampung	13.000.000.000,00	1.965.833.847,00	15,12	5.939.549.366,00
- Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Lembaga Keuangan)- PT BPR Syariah B. Lampung	8.276.185.222,10	1.843.114.814,00	22,27	945.071.801,00
b. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Bidang Air Minum)	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Bidang Air Minum)- PDAM Way Rilau	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.1.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah</b>	<b>576.767.191.709,52</b>	<b>103.885.845.696,03</b>	<b>18,01</b>	<b>112.138.889.547,24</b>
Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp.8.253.043.851,21) atau sebesar (7,36%) dibandingkan Realisasi Tahun 2022.				
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :				
<b>5.1.1.1.4.1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>361.136.312.406,10</b>	<b>1.221.281.005,00</b>	<b>0,34</b>	<b>110.301.941,00</b>
Permasalahan yang menyebabkan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena hasil penjualan BMD ini tergantung kepada hasil lelang yang dilaksanakan lewat KPKNL.				
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari :				
a. Hasil Penjualan Tanah	359.786.312.406,10	0,00	0,00	0,00
- Hasil Penjualan Tanah	359.786.312.406,10	0,00	0,00	0,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
b. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.350.000.000,00	1.221.281.005,00	90,47	110.301.941,00
- Hasil Penjualan Alat Angkutan	1.200.000.000,00	1.122.059.672,00	93,50	0,00
- Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	150.000.000,00	99.221.333,00	66,15	110.301.941,00
<b>5.1.1.1.4.2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>51.900.000.000,00</b>	<b>468.300.000,00</b>	<b>0,90</b>	<b>265.240.000,00</b>
Permasalahan yang menyebabkan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena belum banyaknya permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang diajukan selama Tahun 2023.				
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari :				
a. Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	51.900.000.000,00	468.300.000,00	0,90	265.240.000,00
- Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	51.900.000.000,00	468.300.000,00	0,90	265.240.000,00
<b>5.1.1.1.4.3. Jasa Giro</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>736.437.658,38</b>	<b>4,91</b>	<b>1.701.093.435,11</b>
Permasalahan yang menyebabkan Penerimaan Jasa Giro tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena minimnya jumlah saldo kas milik Pemerintah Kota Bandar Lampung yang tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada PT Bank Lampung setiap bulannya karena selalu dipergunakan untuk membiayai kegiatan belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung, baik berupa Belanja Operasi, Belanja Modal maupun Belanja Tidak Terduga sehingga tidak ada dana yang mengendap.				
Jasa Giro terdiri dari :				
a. Jasa Giro Pada Kas Daerah	15.000.000.000,00	736.437.658,38	4,91	1.701.093.435,11
- Jasa Giro Pada Kas Daerah	15.000.000.000,00	736.437.658,38	4,91	1.701.093.435,11
<b>5.1.1.1.4.4. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,17</b>	<b>15.600.000,00</b>
Permasalahan yang menyebabkan Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena masih minimnya kesadaran dalam membayar Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah selama Tahun 2023.				
Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terdiri dari :				
a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	300.000.000,00	500.000,00	0,17	15.600.000,00
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	300.000.000,00	500.000,00	0,17	15.600.000,00
<b>5.1.1.1.4.5. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain</b>	<b>33.630.296.503,42</b>	<b>14.929.338.046,12</b>	<b>44,39</b>	<b>10.060.448.490,81</b>
Permasalahan yang menyebabkan Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena penerimaan ini merupakan penampungan dari setoran pengembalian belanja yang seharusnya disetorkan sebelum Tahun 2023 tetapi ternyata disetorkan pada Tahun 2023 sehingga sudah diakui sebagai pendapatan ataupun pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tetapi belum memiliki kode rekening pendapatan tersendiri.				
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain terdiri dari :				
a. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	33.630.296.503,42	14.929.338.046,12	44,39	10.060.448.490,81
- Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	33.630.296.503,42	14.929.338.046,12	44,39	10.060.448.490,81



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
<b>5.1.1.1.4.6. Pendapatan Denda Pajak Daerah</b>	<b>1.437.000.000,00</b>	<b>1.416.188.721,40</b>	<b>98,55</b>	<b>2.554.140.649,91</b>
Permasalahan yang menyebabkan Pendapatan Denda Pajak Daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena masih minimnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar tunggakan pajak sehingga denda yang diterima juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan.				
Pendapatan Denda Pajak Daerah terdiri dari :				
a. Pendapatan Denda Pajak Hotel	145.000.000,00	150.419.819,00	103,74	186.563.660,00
- Pendapatan Denda Pajak Hotel	145.000.000,00	150.419.819,00	103,74	186.563.660,00
b. Pendapatan Denda Pajak Restoran	300.000.000,00	329.103.406,10	109,70	1.307.072.403,00
- Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	300.000.000,00	329.103.406,10	109,70	1.307.072.403,00
c. Pendapatan Denda Pajak Hiburan	20.000.000,00	52.400.226,30	262,00	34.856.221,00
- Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	0,00	0,00	0,00	8.340,00
- Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	9.750.971,00
- Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0,00	0,00	0,00	13.538.891,00
- Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	327.822,00
- Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	20.000.000,00	52.400.226,30	262,00	11.230.197,00
d. Pendapatan Denda Pajak Reklame	450.000.000,00	357.898.567,00	79,53	561.319.670,51
- Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	450.000.000,00	357.898.567,00	79,53	561.313.860,51
- Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide	0,00	0,00	0,00	5.810,00
e. Pendapatan Denda Pajak Parkir	25.000.000,00	43.005.738,00	172,02	40.302.215,40
- Pendapatan Denda Pajak Parkir	25.000.000,00	43.005.738,00	172,02	40.302.215,40
f. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	400.000.000,00	359.641.730,00	89,91	267.938.174,00
- Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	400.000.000,00	359.641.730,00	89,91	267.938.174,00
g. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.000.000,00	6.147.246,00	87,82	4.757.795,00
- Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	7.000.000,00	6.147.246,00	87,82	4.757.795,00
h. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	90.000.000,00	117.571.989,00	130,64	151.330.511,00
- Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	90.000.000,00	117.571.989,00	130,64	151.330.511,00
<b>5.1.1.1.4.7. Pendapatan Dari Pengembalian</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Permasalahan yang menyebabkan Pendapatan Dari Pengembalian tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena semua transaksi Pendapatan dari Pengembalian merupakan *Contra Post*, baik *Contra Post* dari pengembalian belanja tahun berjalan maupun *Contra Post* dari pengembalian sisa UYHD (sisa UP) tahun berjalan.



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	<b>APBD-P Tahun 2023 (Rp.)</b>	<b>Realisasi Tahun 2023 (Rp.)</b>	<b>Persentase Capaian (%)</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 (Rp.)</b>
Pendapatan Dari Pengembalian terdiri dari :				
a. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.1.1.1.4.8. Pendapatan BLUD</b>	<b>103.363.582.800,00</b>	<b>85.113.800.265,13</b>	<b>82,34</b>	<b>97.432.065.030,41</b>
Permasalahan yang menyebabkan Pendapatan BLUD tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena untuk :				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan BLUD Puskesmas disebabkan terdapatnya : Piutang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) sebesar Rp.3.004.267.700,00, Piutang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp.392.218.800,00 dan Piutang Lainnya sebesar Rp.802.071.694,00.</li> <li>• Pendapatan BLUD RSUD A. Dadi Tjokrodipo disebabkan terdapatnya piutang yang belum dibayar sampai dengan akhir Tahun 2023 yang terdiri dari : Piutang P2KM Bulan Agustus 2022 s.d. Bulan Juli 2023 sebesar Rp.13.105.332.400,00, Piutang BPJS sebesar Rp.1.720.803.300,00 dan Piutang Lain-Lain sebesar Rp.50.224.500,00.</li> </ul>				
Pendapatan BLUD terdiri dari :				
a. Pendapatan BLUD	103.363.582.800,00	85.113.800.265,13	82,34	97.432.065.030,41
- Pendapatan BLUD	103.363.582.800,00	85.113.800.265,13	82,34	97.432.065.030,41
<b>Rincian atas Lain-Lain Pendapatan atau Penerimaan Daerah disajikan dalam Lampiran 22.</b>				
<b>5.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.613.700.815.595,00</b>	<b>1.605.118.002.681,00</b>	<b>99,47</b>	<b>1.528.150.364.576,00</b>
Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Pendapatan Transfer untuk Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.76.967.638.105,00 atau sebesar 5,04% dibandingkan Realisasi Tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2023, nilai transfer dari Pemerintah Pusat mengalami peningkatan yang salah satunya adalah karena adanya Dana DAU yang ditentukan kegunaannya ( <i>Specific Grant/SG</i> ) yang terdiri dari DAU <i>Spesific Grant</i> Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Kelurahan dan Penggajian PPK.				
Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :				
<b>5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.479.922.494.320,00</b>	<b>1.480.629.174.746,00</b>	<b>100,05</b>	<b>1.396.555.083.316,00</b>
Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.84.074.091.430,00 atau sebesar 6,02% dibandingkan Realisasi Tahun 2022.				
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :				
<b>5.1.1.2.1.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>1.474.442.242.320,00</b>	<b>1.475.148.922.746,00</b>	<b>100,05</b>	<b>1.387.763.408.316,00</b>
Pendapatan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023, yaitu mencapai sebesar 100,05%.				
Dana Perimbangan terdiri dari :				
a. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	70.634.480.320,00	73.117.341.055,00	103,52	72.068.413.357,00
Pendapatan dari Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023, yaitu mencapai sebesar 103,52%.				
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari :				
- DBH Pajak Bumi dan Bangunan	58.755.408,00	2.844.682.043,00	4.841,57	6.463.432.750,00
- DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	49.327.000.087,00
- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	55.640.450.364,00	54.809.141.834,00	98,51	0,00
- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	397.913.208,00	406.011.218,00	102,04	323.349.126,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	6.951.213.891,00	7.173.505.873,00	103,20	9.693.563.425,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.406.753.269,00	891.013.261,00	63,34	3.565.035.969,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	916.239,00	270.615.462,00	29.535,47	641.669.000,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5.217.714.466,00	5.238.815.153,00	100,40	96.052.000,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	960.763.475,00	1.483.556.211,00	154,41	1.958.311.000,00
<b>b. Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>1.056.050.459.000,00</b>	<b>1.064.924.059.102,00</b>	<b>100,84</b>	<b>994.485.941.727,00</b>
Pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023, yaitu mencapai sebesar 100,84%.				
Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung selama Tahun 2023, keseluruhannya merupakan DAU Murni sebesar Rp.1.064.924.059.102,00, melebihi pagu APBD-P dikarenakan pada Bulan Desember 2023, Pemerintah Pusat memberikan DAU Tambahan untuk THR bagi ASN Guru Daerah sebesar Rp.9.800.879.000,00.				
<b>c. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>	<b>40.036.963.000,00</b>	<b>39.502.740.170,00</b>	<b>98,67</b>	<b>41.810.272.846,00</b>
Permasalahan yang mendasari Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah dimungkinkan karena penyaluran DAK Fisik berdasarkan pada kinerja pelaporan penggunaan DAK Fisik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada Pemerintah Pusat.				
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terdiri dari :				
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	776.332.400,00
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.904.521.000,00	3.786.308.500,00	96,97	4.455.961.700,00
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.101.863.000,00	2.039.140.000,00	97,02	11.189.899.600,00
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	260.330.000,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	110.021.000,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	5.535.127.130,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	1.041.051.400,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	3.012.676.436,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	248.929.000,00	184.800.000,00	74,24	973.747.080,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	2.130.060.000,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	809.213.000,00	802.935.000,00	99,22	0,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	<b>APBD-P Tahun 2023 (Rp.)</b>	<b>Realisasi Tahun 2023 (Rp.)</b>	<b>Persentase Capaian (%)</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 (Rp.)</b>
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	32.972.437.000,00	32.689.556.670,00	99,14	0,00
- DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	3.709.493.300,00
- DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	4.269.240.800,00
- DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	4.346.332.000,00
<b>d. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>e. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>	<b>307.720.340.000,00</b>	<b>297.604.782.419,00</b>	<b>96,71</b>	<b>279.398.780.386,00</b>

Permasalahan yang mendasari Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah dimungkinkan karena penyaluran DAK Non Fisik berdasarkan pada kinerja pelaporan penggunaan DAK Non Fisik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada Pemerintah Pusat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terdiri dari :

- DAK Non Fisik-BOS Reguler	124.197.000.000,00	124.199.200.000,00	100,00	124.414.550.712,00
- DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.015.000.000,00	2.895.000.000,00	96,02	60.000.000,00
- DAK Non Fisik-TPG PNSD	120.332.336.000,00	120.332.335.000,00	100,00	113.180.239.857,00
- DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.640.250.000,00	1.266.418.538,00	27,29	3.253.250.000,00
- DAK Non Fisik-BOP PAUD	13.407.000.000,00	13.318.874.366,00	99,34	10.908.588.000,00
- DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	5.234.100.000,00	5.009.300.000,00	95,71	4.537.100.000,00
- DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	28.147.857.000,00	24.954.125.315,00	88,65	20.004.710.300,00
- DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	2.127.167.817,00
- DAK Non Fisik-PK2UKM	410.170.000,00	389.358.000,00	94,93	383.841.500,00
- DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	302.600.000,00	133.782.000,00	44,21	296.159.200,00
- DAK Non Fisik-BOKB-KB	7.410.152.000,00	4.528.249.200,00	61,11	0,00
- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	403.715.000,00	92,00	222.523.000,00
- DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	185.075.000,00	174.425.000,00	94,25	10.650.000,00

Selain nilai tersebut, terdapat Pendapatan DAK Non Fisik-BOS Reguler dan Pendapatan DAK BOP PAUD untuk sekolah swasta masing-masing sebesar Rp.186.567.000,00 dan Rp.99.426.000,00 yang tidak tercatat di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) karena Belanja Hibah belum dianggarkan.

<b>5.1.1.2.1.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>5.480.252.000,00</b>	<b>5.480.252.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.791.675.000,00</b>
--	-------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - Dana Insentif Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung selama Tahun 2023 telah sesuai dengan target yang dianggarkan dalam APBD-P Tahun 2023.

Dana Insentif Daerah terdiri dari :

<b>a. Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>5.480.252.000,00</b>	<b>5.480.252.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.791.675.000,00</b>
- Dana Insentif Daerah (DID)	5.480.252.000,00	5.480.252.000,00	100,00	8.791.675.000,00
<b>b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	<b>APBD-P</b> <b>Tahun 2023</b> <b>(Rp.)</b>	<b>Realisasi</b> <b>Tahun 2023</b> <b>(Rp.)</b>	<b>Persentase</b> <b>Capaian</b> <b>(%)</b>	<b>Realisasi</b> <b>Tahun 2022</b> <b>(Rp.)</b>
<b>5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>133.778.321.275,00</b>	<b>124.488.827.935,00</b>	<b>93,06</b>	<b>131.595.281.260,00</b>

Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp.7.106.453.325,00) atau sebesar (5,40%) dibandingkan Realisasi Tahun 2022.

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

<b>5.1.1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>133.778.321.275,00</b>	<b>124.488.827.935,00</b>	<b>93,06</b>	<b>131.595.281.260,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil terdiri dari :				
<b>a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>133.778.321.275,00</b>	<b>124.488.827.935,00</b>	<b>93,06</b>	<b>131.595.281.260,00</b>

Permasalahan yang mendasari Pendapatan Bagi Hasil Pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 adalah karena masih terdapatnya piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Propinsi Lampung, yaitu piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Triwulan I, piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2023 serta Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV Tahun 2023.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdiri dari :

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	31.000.000.000,00	32.606.305.818,00	105,18	23.680.804.596,00
- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23.000.000.000,00	19.163.141.226,00	83,32	23.805.386.548,00
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	28.786.768.622,00	26.068.786.260,00	90,56	43.259.450.421,00
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	150.000.000,00	99.518.509,00	66,35	126.839.147,00
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	50.841.552.653,00	46.551.076.122,00	91,56	40.722.800.548,00

<b>5.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

<b>5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

<b>5.1.1.3.1.1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat terdiri dari :

<b>a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>5.1.1.3.2. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

	<b>APBD-P</b> <b>Tahun 2023</b> <b>(Rp.)</b>	<b>Realisasi</b> <b>Tahun 2023</b> <b>(Rp.)</b>	<b>Persentase</b> <b>Capaian</b> <b>(%)</b>	<b>Realisasi</b> <b>Tahun 2022</b> <b>(Rp.)</b>
--	--	---	---	---

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

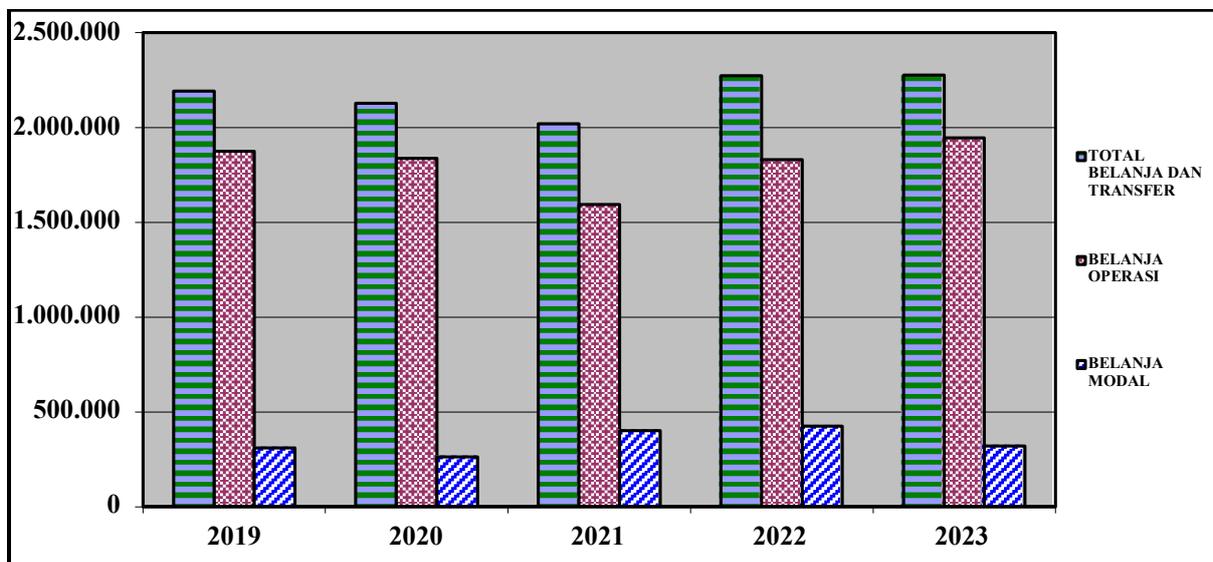
<b>5.1.1.3.2.1. Lain-Lain Pendapatan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Lain-Lain Pendapatan terdiri dari :				
a. Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00

**b. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Belanja Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan juga termasuk belanja transfer adalah merupakan pos belanja daerah.

Dari gambar di bawah terlihat bahwa untuk Total Belanja Daerah dan Transfer Kota Bandar Lampung selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu Tahun 2019-2023 cenderung mengalami fluktuasi. Contohnya pada Tahun 2022 terjadi peningkatan Total Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp.255.228.442.025,79 dengan persentase peningkatan sebesar 12,65% dibandingkan Tahun 2021 dan pada Tahun 2023 terjadi peningkatan Total Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp.4.097.850.233,33 dengan persentase peningkatan sebesar 0,18% dibandingkan Tahun 2022.

**Gambar 5.2. Realisasi Total Belanja dan Transfer, Belanja Operasi dan Belanja Modal Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023 (juta rupiah)**



Ditinjau dari kontribusi masing-masing pos Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah dan Transfer Kota Bandar Lampung selama periode waktu tersebut, pos Belanja Daerah yang memberikan kontribusi tertinggi adalah pos Belanja Operasi, dimana pada Tahun 2021 memberikan kontribusi sebesar 78,93%, Tahun 2022 memberikan kontribusi sebesar 80,47% dan Tahun 2023 memberikan kontribusi sebesar 85,37% terhadap Total Belanja Daerah dan Transfer Kota Bandar Lampung.



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Sementara itu, pos Belanja Modal memberikan kontribusi sebesar 19,86% pada Tahun 2021, sebesar 18,68% pada Tahun 2022 dan sebesar 14,17% pada Tahun 2023 terhadap Total Belanja Daerah dan Transfer Kota Bandar Lampung.

Secara lebih rinci, berikut adalah pos-pos laporan realisasi anggaran belanja untuk Tahun 2023 dan 2022, yaitu :

	<b>APBD-P</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>	<b>Realisasi</b>
	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Capaian</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp.)</b>	<b>(Rp.)</b>	<b>(%)</b>	<b>(Rp.)</b>
<b>5.1.2. BELANJA dan TRANSFER</b>	<b>2.927.770.619.245,00</b>	<b>2.277.717.412.233,33</b>	<b>77,80</b>	<b>2.273.619.562.000,00</b>

<b>5.1.2.1. BELANJA OPERASI</b>	<b>2.472.333.619.909,91</b>	<b>1.944.418.592.178,31</b>	<b>78,65</b>	<b>1.829.677.868.665,85</b>
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------

Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Belanja Operasi untuk Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.114.740.723.512,46 atau sebesar 6,27% dibandingkan Realisasi Tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan pada Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sementara itu, Realisasi Belanja Bunga dan Belanja Subsidi mengalami penurunan.

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :

<b>5.1.2.1.1. Belanja Pegawai</b>	<b>1.110.714.494.025,20</b>	<b>928.558.595.633,97</b>	<b>83,60</b>	<b>863.375.394.263,07</b>
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------

Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Belanja Pegawai untuk Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.65.183.201.370,90 atau sebesar 7,55% dibandingkan Realisasi Tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan anggaran untuk Belanja Pegawai pada Tahun 2023 sehingga realisasinya juga ikut meningkat, terutama adanya peningkatan anggaran untuk Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :

<b>5.1.2.1.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>703.391.717.685,34</b>	<b>576.015.539.438,00</b>	<b>81,89</b>	<b>567.001.616.893,00</b>
a. Belanja Gaji Pokok ASN	513.627.911.839,45	440.260.815.288,00	85,72	426.544.079.515,00
- Belanja Gaji Pokok PNS	449.654.958.839,45	383.753.460.088,00	85,34	412.472.506.815,00
- Belanja Gaji Pokok PPPK	63.972.953.000,00	56.507.355.200,00	88,33	14.071.572.700,00
b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN	46.189.920.868,00	37.449.584.021,00	81,08	35.802.898.851,00
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	37.102.107.448,00	32.899.662.833,00	88,67	34.706.320.313,00
- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.087.813.420,00	4.549.921.188,00	50,07	1.096.578.538,00
c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN	14.541.228.560,00	11.176.369.950,00	76,86	11.198.880.000,00
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14.541.228.560,00	11.176.369.950,00	76,86	11.198.880.000,00
d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN	32.381.876.860,00	28.729.627.150,00	88,72	24.319.264.068,00
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	26.082.352.860,00	23.219.833.150,00	89,03	24.319.264.068,00
- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6.299.524.000,00	5.509.794.000,00	87,46	0,00
e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.242.407.530,00	5.834.861.200,00	70,79	7.195.030.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.380.287.530,00	5.485.006.200,00	74,32	6.315.635.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	862.120.000,00	349.855.000,00	40,58	879.395.000,00
f. Belanja Tunjangan Beras ASN	29.154.089.451,00	23.484.225.388,00	80,55	22.205.564.306,00
- Belanja Tunjangan Beras PNS	22.815.311.691,00	19.994.740.108,00	87,64	21.346.952.786,00
- Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.338.777.760,00	3.489.485.280,00	55,05	858.611.520,00
g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan	644.041.261,00	493.996.452,00	76,70	570.067.721,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
Khusus ASN				
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	644.041.261,00	493.996.452,00	76,70	570.067.721,00
h. Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.387.782,00	5.713.708,00	68,12	5.629.116,00
- Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.980.762,00	5.111.748,00	85,47	5.439.566,00
- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.407.020,00	601.960,00	25,01	189.550,00
i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	53.899.083.533,89	24.973.567.222,00	46,33	39.160.203.316,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	50.819.083.533,89	22.691.612.350,00	44,65	38.445.931.196,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.080.000.000,00	2.281.954.872,00	74,09	714.272.120,00
j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.175.695.000,00	901.694.765,00	76,69	0,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.020.000.000,00	786.092.844,00	77,07	0,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	155.695.000,00	115.601.921,00	74,25	0,00
k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.527.075.000,00	2.705.084.294,00	76,69	0,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.060.000.000,00	2.358.278.532,00	77,07	0,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	467.075.000,00	346.805.762,00	74,25	0,00
<b>5.1.2.1.1.2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>111.958.706.895,00</b>	<b>83.354.569.574,00</b>	<b>74,45</b>	<b>67.282.018.006,00</b>
a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	111.102.356.895,00	82.851.060.806,00	74,57	67.282.018.006,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	105.609.856.895,00	82.790.568.066,00	78,39	67.282.018.006,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.492.500.000,00	60.492.740,00	1,10	0,00
b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	471.350.000,00	262.426.230,00	55,68	0,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	471.350.000,00	262.426.230,00	55,68	0,00
c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	385.000.000,00	241.082.538,00	62,62	0,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	385.000.000,00	241.082.538,00	62,62	0,00
<b>5.1.2.1.1.3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>198.746.461.491,00</b>	<b>175.522.379.714,00</b>	<b>88,31</b>	<b>125.174.477.247,00</b>
a. Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah	30.811.724.194,00	18.537.666.718,00	60,16	21.055.433.963,00
- Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Hotel	2.000.000.000,00	1.761.028.468,00	88,05	1.126.481.320,00
- Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Restoran	5.550.000.000,00	5.237.084.507,00	94,36	3.623.526.874,00
- Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.150.000.000,00	1.052.149.111,00	91,49	872.985.629,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
- Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Reklame	1.798.000.000,00	1.030.792.758,00	57,33	1.592.201.034,00
- Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	7.500.000.000,00	4.410.508.674,00	58,81	6.144.186.820,00
- Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Parkir	500.468.000,00	405.740.677,00	81,07	263.852.279,00
- Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Air Tanah	250.000.000,00	140.050.658,00	56,02	158.380.239,00
- Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.000.000,00	7.088.669,00	35,44	5.256.644,00
- Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.200.000.000,00	2.099.927.793,00	33,87	3.698.695.462,00
- Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.843.256.194,00	2.393.295.403,00	40,96	3.569.867.662,00
b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	150.368.958.240,00	146.152.597.996,00	97,20	93.554.405.784,00
- Belanja TPG PNSD	150.368.958.240,00	146.152.597.996,00	97,20	93.554.405.784,00
c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4.929.000.000,00	2.429.000.000,00	49,28	1.062.475.000,00
- Belanja Tamsil Guru PNSD	4.929.000.000,00	2.429.000.000,00	49,28	1.062.475.000,00
d. Belanja Honorarium	12.227.679.057,00	8.135.465.000,00	66,53	9.502.162.500,00
- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.387.229.057,00	7.436.965.000,00	65,31	8.836.112.500,00
- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	510.450.000,00	368.750.000,00	72,24	339.100.000,00
- Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	330.000.000,00	329.750.000,00	99,92	326.950.000,00
e. Belanja Jasa Pengelolaan BMD	409.100.000,00	267.650.000,00	65,42	0,00
- Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	409.100.000,00	267.650.000,00	65,42	0,00
<b>5.1.2.1.1.4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD</b>	<b>37.527.784.407,00</b>	<b>36.082.854.551,00</b>	<b>96,15</b>	<b>34.144.580.806,00</b>
a. Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.111.110.000,00	99,72	1.114.260.000,00
- Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.111.110.000,00	99,72	1.114.260.000,00
b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	162.428.000,00	111.197.100,00	68,46	105.338.100,00
- Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	162.428.000,00	111.197.100,00	68,46	105.338.100,00
c. Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.137.520,00	128.255.820,00	82,14	127.821.300,00
- Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.137.520,00	128.255.820,00	82,14	127.821.300,00
d. Belanja Uang Paket DPRD	111.426.000,00	95.193.000,00	85,43	95.508.000,00
- Belanja Uang Paket DPRD	111.426.000,00	95.193.000,00	85,43	95.508.000,00
e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.731.082.500,00	1.611.109.500,00	93,07	1.615.677.000,00
- Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.731.082.500,00	1.611.109.500,00	93,07	1.615.677.000,00
f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	198.046.800,00	145.520.550,00	73,48	144.333.000,00
- Belanja Tunjangan Alat	198.046.800,00	145.520.550,00	73,48	144.333.000,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
Kelengkapan DPRD				
g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.790.600.000,00	99,67	8.820.000.000,00
- Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.790.600.000,00	99,67	8.820.000.000,00
h. Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.190.300.000,00	99,33	2.205.000.000,00
- Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.190.300.000,00	99,33	2.205.000.000,00
i. Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	143.500.000,00	61.679.353,00	42,98	483.406,00
- Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	143.500.000,00	61.679.353,00	42,98	483.406,00
j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	12.202.592.692,00	11.991.389.228,00	98,27	10.725.360.000,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi DPRD	243.992.692,00	113.089.228,00	46,35	0,00
- Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	11.946.000.000,00	11.878.300.000,00	99,43	10.725.360.000,00
k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.179.240.000,00	9.840.200.000,00	96,67	9.190.800.000,00
- Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.179.240.000,00	9.840.200.000,00	96,67	9.190.800.000,00
l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	504.070.895,00	6.300.000,00	1,25	0,00
- Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	504.070.895,00	6.300.000,00	1,25	0,00
<b>5.1.2.1.1.5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>	<b>237.411.824,00</b>	<b>171.883.940,00</b>	<b>72,40</b>	<b>165.968.699,00</b>
a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.561.500,00	54.600.000,00	88,69	54.600.000,00
- Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.561.500,00	54.600.000,00	88,69	54.600.000,00
b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100,00	6.636.000,00	84,70	6.636.000,00
- Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100,00	6.636.000,00	84,70	6.636.000,00
c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	98.280.000,00
- Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	98.280.000,00
d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.008.448,00	6.083.280,00	75,96	6.083.280,00
- Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.008.448,00	6.083.280,00	75,96	6.083.280,00
e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.311.776,00	364.420,00	5,77	367.479,00
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.311.776,00	364.420,00	5,77	367.479,00
f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.050.000,00	1.840,00	0,18	1.940,00
- Belanja Pembulatan Gaji	1.050.000,00	1.840,00	0,18	1.940,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	<b>APBD-P Tahun 2023 (Rp.)</b>	<b>Realisasi Tahun 2023 (Rp.)</b>	<b>Persentase Capaian (%)</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 (Rp.)</b>
KDH/WKDH				
g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH	51.381.000,00	5.469.120,00	10,64	0,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH	51.381.000,00	5.469.120,00	10,64	0,00
h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	132.000,00	112.320,00	85,09	0,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	132.000,00	112.320,00	85,09	0,00
i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	395.000,00	336.960,00	85,31	0,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	395.000,00	336.960,00	85,31	0,00
<b>5.1.2.1.1.6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH</b>	<b>1.625.880.000,00</b>	<b>1.425.880.000,00</b>	<b>87,70</b>	<b>1.294.860.000,00</b>
a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	425.880.000,00	425.880.000,00	100,00	360.360.000,00
- Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	425.880.000,00	425.880.000,00	100,00	360.360.000,00
b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	83,33	934.500.000,00
- Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	83,33	934.500.000,00
<b>5.1.2.1.1.7. Belanja Pegawai BOS</b>	<b>28.473.415.000,00</b>	<b>28.450.184.633,00</b>	<b>99,92</b>	<b>31.985.754.346,00</b>
a. Belanja Pegawai BOS	28.473.415.000,00	28.450.184.633,00	99,92	31.985.754.346,00
- Belanja Pegawai BOS	28.473.415.000,00	28.450.184.633,00	99,92	31.985.754.346,00
<b>5.1.2.1.1.8. Belanja Pegawai BLUD</b>	<b>28.753.116.722,86</b>	<b>27.535.303.783,97</b>	<b>95,76</b>	<b>36.326.118.266,07</b>
a. Belanja Pegawai BLUD	28.753.116.722,86	27.535.303.783,97	95,76	36.326.118.266,07
- Belanja Pegawai BLUD	28.753.116.722,86	27.535.303.783,97	95,76	36.326.118.266,07
<b>5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.227.577.406.009,71</b>	<b>901.228.134.949,34</b>	<b>73,42</b>	<b>870.981.734.775,78</b>

Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.30.246.400.173,56 atau sebesar 3,47% dibandingkan Realisasi Tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan pada Realisasi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS dan Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :

<b>5.1.2.1.2.1. Belanja Barang</b>	<b>273.698.744.489,43</b>	<b>197.303.480.067,00</b>	<b>72,09</b>	<b>184.203.394.917,00</b>
a. Belanja Barang Pakai Habis	273.698.744.489,43	197.303.480.067,00	72,09	184.160.569.917,00
- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	37.545.033.898,00	25.467.390.320,00	67,83	34.572.977.800,00
- Belanja Bahan-Bahan Kimia	195.600.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	27.102.626.396,00	22.724.147.844,00	83,84	15.449.620.262,00
- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	289.618.810,00	280.855.250,00	96,97	349.341.500,00
- Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
- Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	165.304.800,00	136.335.000,00	82,47	93.413.000,00
- Belanja Bahan-Bahan/Bibit	25.000.000,00	24.900.000,00	99,60	19.200.000,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
Ternak/Bibit Ikan				
- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	20.023.596.252,00	16.191.543.088,00	80,86	29.430.078.072,00
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.249.982.250,50	968.756.555,00	43,06	1.569.770.986,00
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	373.839.600,00	99.865.479,00	26,71	97.215.800,00
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	244.450.725,00	88.295.000,00	36,12	121.654.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.554.243.228,19	3.700.380.808,00	66,62	3.389.075.713,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.203.870.730,81	2.644.107.989,50	82,53	2.344.213.819,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	13.730.102.081,67	9.901.095.853,50	72,11	10.173.419.145,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	398.744.382,00	308.294.500,00	77,32	339.830.000,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.057.850.629,76	3.514.820.465,00	86,62	2.398.608.230,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.841.933.047,50	1.496.760.232,00	81,26	1.080.724.201,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.405.901.385,00	5.301.614.532,00	98,07	4.500.143.624,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.062.400,00	0,00	0,00	10.091.800,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00	0,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.451.680.000,00	1.106.621.400,00	76,23	1.190.342.500,00
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	535.246.000,00	240.004.500,00	44,84	99.772.300,00
- Belanja Obat-Obatan-Obat	6.369.808.259,00	5.920.132.879,00	92,94	3.377.878.925,00
- Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.782.886.746,00	2.782.886.746,00	100,00	1.713.623.920,00
- Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	21.755.930.572,00	7.489.493.575,00	34,43	6.934.475.175,00
- Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	78.913.853.148,00	61.299.693.950,00	77,68	39.335.159.825,00
- Belanja Natura dan Pakan-Natura	420.000.000,00	380.232.120,00	90,53	419.898.000,00
- Belanja Natura dan Pakan-Pakan	15.000.000,00	14.998.000,00	99,99	26.950.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.094.842.375,00	8.870.884.831,00	58,77	9.544.344.150,00
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.122.104.472,00	7.506.314.150,00	82,29	5.142.876.070,00
- Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	506.180.000,00	49.884.800,00	9,86	26.185.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan	531.830.500,00	462.066.500,00	86,88	1.373.103.000,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
Kesehatan				
- Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.050.138.070,00	5.717.270.000,00	71,02	2.449.438.300,00
- Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	214.000.000,00	171.700.000,00	80,23	167.175.000,00
- Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	62.500.000,00	18.900.000,00	30,24	196.925.000,00
- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	207.500.000,00	183.450.000,00	88,41	361.125.000,00
- Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.768.599.702,00	771.459.000,00	43,62	306.225.500,00
- Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	216.000.000,00	183.500.000,00	84,95	183.050.000,00
- Belanja Pakaian Teknik	56.310.000,00	26.844.200,00	47,67	120.350.000,00
- Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	98.500.000,00	28.308.000,00	28,74	31.280.000,00
- Belanja Pakaian Adat Daerah	586.500.000,00	349.350.000,00	59,57	614.400.000,00
- Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.917.374.029,00	532.047.500,00	27,75	4.106.348.500,00
- Belanja Pakaian Olahraga	415.200.000,00	262.100.000,00	63,13	369.360.800,00
- Belanja Pakaian Paskibraka	57.750.000,00	57.750.000,00	100,00	40.600.000,00
- Belanja Pakaian Jas/Safari	120.250.000,00	18.625.000,00	15,49	68.385.000,00
b. Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	42.825.000,00
- Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	42.825.000,00
<b>5.1.2.1.2.2. Belanja Jasa</b>	<b>571.449.948.043,34</b>	<b>477.197.420.911,00</b>	<b>83,51</b>	<b>460.390.738.231,05</b>
a. Belanja Jasa Kantor	486.348.121.898,34	423.535.611.049,00	87,08	395.991.606.976,05
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8.081.569.814,00	5.690.929.836,00	70,42	3.544.197.922,05
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.393.042.695,00	11.555.370.600,00	62,82	9.921.680.000,00
- Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.796.600.000,00	1.650.600.000,00	91,87	929.100.000,00
- Honorarium Rohaniwan	21.300.000,00	7.400.000,00	34,74	4.700.000,00
- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	311.507.113,00	223.600.000,00	71,78	140.400.000,00
- Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	20.901.824,00	500.000,00	2,39	392.560.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.556.210.000,00	4.796.550.000,00	86,33	180.000.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.519.056.675,00	2.532.767.967,00	71,97	9.918.338.478,00
- Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	104.000.000,00	0,00	0,00	74.639.600,00
- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	168.798.792,00	97.650.000,00	57,85	99.900.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	49.027.500.000,00	42.008.250.000,00	85,68	38.474.250.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Pemadam	1.265.200.000,00	1.263.600.000,00	99,87	0,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
Kebakaran dan Penyelamatan				
- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.325.800.000,00	1.691.375.000,00	72,72	1.280.050.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	44.400.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	18.750.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	161.905.150.000,00	142.807.000.000,00	88,20	142.857.800.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	7.056.733.928,00	6.031.900.000,00	85,48	4.844.490.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	75.223.700.000,00	64.184.750.000,00	85,33	58.800.000.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.205.829.037,00	3.546.000.000,00	84,31	3.759.000.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.459.420.863,00	3.842.355.663,00	86,16	3.284.006.137,00
- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.039.355.000,00	4.499.316.000,00	89,28	3.971.160.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Caraka	29.700.000,00	22.500.000,00	75,76	9.900.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Supir	376.000.000,00	336.000.000,00	89,36	341.000.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	875.250.000,00	781.450.000,00	89,28	922.300.000,00
- Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	66.400.000,00	53.200.000,00	80,12	60.050.000,00
- Belanja Jasa Tata Rias	33.150.000,00	12.000.000,00	36,20	4.000.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.573.472.067,00	3.208.237.590,00	89,78	2.869.409.364,00
- Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	25.010.000,00	23.870.200,00	95,44	49.187.000,00
- Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	15.750.000,00
- Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	189.380.000,00	110.181.000,00	58,18	36.400.000,00
- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.010.837.182,00	582.420.000,00	57,62	10.100.000,00
- Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	91.000.000,00	57.500.000,00	63,19	53.537.430,00
- Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	30.000.000,00	26.952.596,00	89,84	24.386.382,00
- Belanja Jasa Kalibrasi	4.000.000,00	925.000,00	23,13	74.615.000,00
- Belanja Jasa Pengolahan Sampah	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Jasa Pengukuran Tanah	171.517.300,00	1.600.000,00	0,93	33.241.760,00
- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	6.705.133.309,00	5.357.254.443,00	79,90	4.229.110.544,00
- Belanja Tagihan Telepon	847.126.618,00	415.372.902,00	49,03	384.653.870,00
- Belanja Tagihan Air	867.146.366,00	658.660.900,00	75,96	536.456.200,00
- Belanja Tagihan Listrik	10.599.900.289,33	8.891.141.458,00	83,88	5.834.703.780,00
- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.958.436.721,00	2.318.662.000,00	78,37	1.785.155.000,00
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.377.310.365,00	4.870.525.465,00	76,37	6.570.950.257,00
- Belanja Paket/Pengiriman	54.585.275,00	24.158.000,00	44,26	275.000,00
- Belanja Penambah Daya	17.000.000,00	6.743.650,00	39,67	0,00
- Belanja Registrasi/Keanggotaan	50.000.000,00	40.000.000,00	80,00	40.000.000,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	938.040.600,41	305.206.326,00	32,54	264.165.565,00
- Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	93.819.048.343,00	92.957.967.953,00	99,08	85.157.272.187,00
- Belanja Ganti Rugi Kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Lembur	7.906.851.721,60	6.013.166.500,00	76,05	4.202.915.500,00
- Belanja Medical Check Up	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.111.622.645,00	17.730.339.950,00	70,61	27.148.015.393,00
- Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan Bagi PBI	50.400.000,00	50.400.000,00	100,00	0,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	20.943.618.200,00	14.510.889.800,00	69,29	24.504.708.032,00
- Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.994.604.445,00	2.374.447.600,00	79,29	1.600.435.200,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	955.491.159,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	500.000.000,00	311.270.400,00	62,25	355.102,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	528.000.000,00	389.088.000,00	73,69	0,00
- Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	95.000.000,00	94.244.150,00	99,20	87.025.900,00
c. Belanja Sewa Tanah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	40.000.000,00
- Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
- Belanja Sewa Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.040.153.005,00	6.396.528.300,00	63,71	3.809.994.975,00
- Belanja Sewa Excavator	399.000.000,00	397.118.000,00	99,53	398.384.000,00
- Belanja Sewa Compacting Equipment	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00
- Belanja Sewa Electric Generating Set	536.000.000,00	164.600.000,00	30,71	23.400.000,00
- Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	105.440.968,00	57.800.000,00	54,82	30.280.000,00
- Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.465.000.000,00	1.386.264.000,00	94,63	0,00
- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	704.772.772,00	331.150.000,00	46,99	928.255.000,00
- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	167.400.000,00	133.022.000,00	79,46	145.162.000,00
- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
- Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Sewa Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	1.200.000,00	24,00	0,00
- Belanja Sewa Mebel	332.148.000,00	64.670.000,00	19,47	32.947.498,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
- Belanja Sewa Alat Pendingin	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	340.875.000,00	146.619.300,00	43,01	289.160.000,00
- Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	500.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	1.300.000,00	1.280.000,00	98,46	0,00
- Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangannya	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
- Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	261.500.000,00	203.450.000,00	77,80	204.162.500,00
- Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	705.000.000,00	253.000.000,00	35,89	24.000.000,00
- Belanja Sewa Peralatan Umum	4.777.516.265,00	3.251.855.000,00	68,07	1.655.423.977,00
- Belanja Sewa Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
- Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.609.370.862,00	2.016.193.349,00	55,86	4.140.490.322,00
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.191.545.577,00	1.338.845.000,00	61,09	1.607.245.500,00
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.187.818.771,00	623.035.914,00	52,45	1.192.869.712,00
- Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	1.292.425.110,00
- Belanja Sewa Taman	87.606.514,00	54.312.435,00	62,00	23.150.000,00
- Belanja Sewa Hotel	131.800.000,00	0,00	0,00	24.800.000,00
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00
f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	26.900.000,00	24.500.000,00	91,08	45.650.000,00
- Belanja Sewa Audio Visual	1.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
- Belanja Sewa Alat Musik	25.000.000,00	24.500.000,00	98,00	24.700.000,00
- Belanja Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	900.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	36.799.015.723,00	20.844.311.200,00	56,64	24.396.107.396,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	39.591.500,00	38.891.500,00	98,23	107.529.150,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	444.535.000,00	425.585.000,00	95,74	2.157.001.700,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	50.000.000,00	49.783.500,00	99,57	0,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	497.768.700,00	388.921.800,00	78,13	195.586.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain	3.501.858.625,00	2.547.891.750,00	72,76	2.549.632.000,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
Rekayasa Untuk Konstruksi Pondasi serta Struk				
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	3.168.770.000,00	2.131.146.280,00	67,25	3.477.674.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	9.664.252.300,00	5.336.604.140,00	55,22	4.543.615.800,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektronik	471.000.000,00	194.423.810,00	41,28	345.249.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Untuk Proses Industrial dan Produksi	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi	29.835.440,00	29.824.000,00	99,96	0,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.689.445.000,00	959.445.000,00	56,79	0,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	5.000.000,00	4.861.800,00	97,24	186.194.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	8.123.680.580,00	4.510.240.420,00	55,52	3.972.600.800,00
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	5.020.613.700,00	2.414.951.700,00	48,10	3.791.530.346,00
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	2.553.235.500,00	1.499.085.500,00	58,71	2.415.102.600,00
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	19.850.000,00	19.850.000,00	100,00	0,00
- Belanja Jasa Konsultansi Spesialis- Jasa Pembuatan Peta	400.000.000,00	0,00	0,00	389.880.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Spesialis- Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	56.500.000,00	15.280.000,00	27,04	0,00
- Belanja Jasa Konsultansi Spesialis- Jasa Pengujian dan Analisa Sistem	149.514.000,00	148.931.000,00	99,61	98.830.000,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	<b>APBD-P</b> <b>Tahun 2023</b> <b>(Rp.)</b>	<b>Realisasi</b> <b>Tahun 2023</b> <b>(Rp.)</b>	<b>Persentase</b> <b>Capaian</b> <b>(%)</b>	<b>Realisasi</b> <b>Tahun 2022</b> <b>(Rp.)</b>
Mekanikal dan Elektrikal				
- Belanja Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan	804.365.378,00	99.394.000,00	12,36	158.182.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	29.200.000,00	29.200.000,00	100,00	0,00
h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.829.202.210,00	1.913.697.775,00	67,64	2.572.537.500,00
- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	75.128.550,00	74.524.550,00	99,20	471.015.500,00
- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000,00	99.828.900,00	99,83	0,00
- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	100.000.000,00	99.719.600,00	99,72	97.963.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	50.863.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	391.000.000,00	219.455.500,00	56,13	567.791.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.468.785.000,00	1.077.213.365,00	73,34	1.287.188.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	25.425.660,00	25.425.660,00	100,00	0,00
- Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	318.000.000,00	317.530.200,00	99,85	0,00
- Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	148.580.000,00
i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.218.264.941,00	1.216.250.000,00	99,83	0,00
- Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	399.914.941,00	399.900.000,00	99,99	0,00
- Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	818.350.000,00	816.350.000,00	99,76	0,00
j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.447.296.759,00	3.499.989.288,00	64,25	2.246.335.669,00
- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.353.411.401,00	2.677.666.028,00	61,51	2.087.352.223,00
- Belanja Sosialisasi	33.090.358,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Bimbingan Teknis	553.250.000,00	327.618.260,00	59,22	158.983.446,00
- Belanja Diklat Kepemimpinan	507.545.000,00	494.705.000,00	97,47	0,00
<b>5.1.2.1.2.3. Belanja Pemeliharaan</b>	<b>22.391.873.677,80</b>	<b>15.295.169.225,00</b>	<b>68,31</b>	<b>24.795.942.065,00</b>
a. Belanja Pemeliharaan Tanah	116.489.999,00	62.534.687,00	53,68	43.410.972,00
- Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	16.489.999,00	12.703.000,00	77,03	12.703.000,00
- Belanja Pemeliharaan Tanah- Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	50.000.000,00	49.831.687,00	99,66	30.707.972,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
- Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Untuk Taman	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.362.452.809,61	2.271.995.097,00	52,08	2.418.904.600,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	101.000.000,00	1.000.000,00	0,99	34.190.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.070.000,00	1.560.000,00	30,77	2.300.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.290.881.793,52	624.823.830,00	48,40	767.899.400,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	61.410.442,00	6.800.000,00	11,07	14.955.355,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	76.923.160,00	23.295.000,00	30,28	46.560.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	27.300.000,00	2.690.000,00	9,85	3.380.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	116.292.280,00	88.710.000,00	76,28	0,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	75.994.426,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	109.813.000,00	40.510.000,00	36,89	1.910.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	80.140.812,00	0,00	0,00	1.854.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	21.950.000,00	14.700.000,00	66,97	21.750.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-	9.350.000,00	750.000,00	8,02	20.575.000,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
Mesin Ketik				
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.500.000,00	2.701.185,00	49,11	1.500.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	110.663.550,00	80.484.800,00	72,73	67.709.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	73.004.051,00	21.800.000,00	29,86	19.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	18.172.000,00	12.587.336,00	69,27	15.953.645,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	798.578.937,09	552.794.166,00	69,22	373.081.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	65.191.000,00	4.932.000,00	7,57	5.644.500,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.316.000,00	11.975.000,00	78,19	7.190.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	188.714.500,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	575.000,00	200.000,00	34,78	900.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	88.804.200,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	10.749.100,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	175.745.000,00	170.630.000,00	97,09	227.480.000,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	544.095.886,00	324.228.000,00	59,59	257.477.000,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit	93.225.000,00	58.060.000,00	62,28	106.785.000,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
Lainnya				
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	145.359.226,00	119.445.780,00	82,17	62.620.000,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	89.610.000,00	64.155.000,00	71,59	19.044.000,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	46.950.000,00	30.113.000,00	64,14	34.335.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	0,00	0,00	0,00	19.130.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	8.392.146,00	8.050.000,00	95,92	0,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.463.000,00
c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.072.002.731,19	11.374.918.775,00	70,77	19.463.315.493,00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.435.493.991,19	2.555.127.060,00	57,61	1.670.429.808,00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	388.553.000,00	175.257.400,00	45,11	15.800.000,00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	74.038.800,00	74.038.800,00	100,00	0,00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	9.300.146.940,00	7.916.337.715,00	85,12	16.973.714.660,00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	11.931.500,00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	100.000.000,00	49.517.000,00	49,52	24.013.750,00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	376.220.000,00	168.930.000,00	44,90	209.430.000,00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan	1.337.550.000,00	435.710.800,00	32,58	489.899.775,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya				
- Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas- Pagar	40.000.000,00	0,00	0,00	68.096.000,00
d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.644.178.138,00	1.488.920.666,00	90,56	2.870.311.000,00
- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	617.515.100,00	616.605.000,00	99,85	0,00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	200.000.000,00	188.898.950,00	94,45	0,00
- Belanja Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Permukaan	91.163.038,00	90.150.000,00	98,89	34.400.000,00
- Belanja Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Lain-Instalasi Lain	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	53.000.000,00	44.520.500,00	84,00	26.570.000,00
- Belanja Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	582.500.000,00	523.919.216,00	89,94	2.784.741.000,00
- Belanja Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	50.000.000,00	24.827.000,00	49,65	24.600.000,00
e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	196.750.000,00	96.800.000,00	49,20	0,00
- Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	196.750.000,00	96.800.000,00	49,20	0,00
<b>5.1.2.1.2.4. Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>62.203.208.083,00</b>	<b>39.304.311.088,00</b>	<b>63,19</b>	<b>33.628.873.862,00</b>
a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.753.208.083,00	39.070.439.313,00	63,27	33.628.873.862,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.693.992.034,16	18.505.564.538,00	64,49	13.299.914.344,00
- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.236.306.533,00	11.012.255.000,00	54,42	14.839.814.939,00
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.368.202.148,00	7.962.297.393,00	76,80	4.003.757.500,00
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.453.707.367,84	1.590.322.382,00	64,81	1.485.387.079,00
b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	450.000.000,00	233.871.775,00	51,97	0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa- Luar Negeri	450.000.000,00	233.871.775,00	51,97	0,00
<b>5.1.2.1.2.5. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>186.644.690.348,00</b>	<b>74.460.062.086,00</b>	<b>39,86</b>	<b>73.578.008.866,00</b>
a. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.845.794.000,00	1.021.328.750,00	9,64	224.515.000,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	<b>APBD-P</b> <b>Tahun 2023</b> <b>(Rp.)</b>	<b>Realisasi</b> <b>Tahun 2023</b> <b>(Rp.)</b>	<b>Persentase</b> <b>Capaian</b> <b>(%)</b>	<b>Realisasi</b> <b>Tahun 2022</b> <b>(Rp.)</b>
- Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.566.004.000,00	848.485.000,00	54,18	215.015.000,00
- Belanja Penghargaan Atas Suatu Prestasi	59.700.000,00	52.243.750,00	87,51	9.500.000,00
- Belanja Beasiswa	8.220.090.000,00	120.600.000,00	0,58	0,00
<b>b. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>176.798.896.348,00</b>	<b>73.438.733.336,00</b>	<b>41,54</b>	<b>73.353.493.866,00</b>
- Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	135.206.051.348,00	56.826.523.336,00	42,03	59.383.393.866,00
- Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat	41.592.845.000,00	16.612.210.000,00	39,94	13.970.100.000,00
<b>5.1.2.1.2.6. Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>44.922.946.704,00</b>	<b>44.828.762.571,00</b>	<b>99,79</b>	<b>41.735.432.740,00</b>
a. Belanja Barang dan Jasa BOS	44.922.946.704,00	44.828.762.571,00	99,79	41.735.432.740,00
- Belanja Barang dan Jasa BOS	44.922.946.704,00	44.828.762.571,00	99,79	41.735.432.740,00
<b>5.1.2.1.2.7. Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>66.265.994.664,14</b>	<b>52.838.929.001,34</b>	<b>79,74</b>	<b>52.649.344.094,73</b>
a. Belanja Barang dan Jasa BLUD	66.265.994.664,14	52.838.929.001,34	79,74	52.649.344.094,73
- Belanja Barang dan Jasa BLUD	66.265.994.664,14	52.838.929.001,34	79,74	52.649.344.094,73
<b>5.1.2.1.3. Belanja Bunga</b>	<b>12.000.000.000,00</b>	<b>8.753.140.284,00</b>	<b>72,94</b>	<b>10.265.113.770,00</b>
Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Belanja Bunga untuk Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp.1.511.973.486,00) atau sebesar (14,73%) dibandingkan Realisasi Tahun 2022. Hal ini terjadi karena dari 2 ( <i>dua</i> ) Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PT SMI (Persero), telah dilakukan pelunasan pembayaran pokok dan bunga pinjaman daerah untuk Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 31 dan 32 Tanggal 05 Mei 2017 pada Bulan Oktober Tahun 2022 sehingga pada Tahun 2023 hanya menyisakan pembayaran bunga pinjaman untuk Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor PERJ-220/SMI/1221 Tanggal 29 Desember 2021 yang mengakibatkan jumlah Realisasi Belanja Bunga yang harus dibayarkan pada Tahun 2023 mengalami penurunan.				
Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :				
<b>5.1.2.1.3.1. Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>12.000.000.000,00</b>	<b>8.753.140.284,00</b>	<b>72,94</b>	<b>9.443.863.770,00</b>
a. Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat Atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	12.000.000.000,00	8.753.140.284,00	72,94	9.443.863.770,00
- Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat Atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	12.000.000.000,00	8.753.140.284,00	72,94	9.443.863.770,00
<b>5.1.2.1.3.2. Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.250.000,00</b>
a. Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	821.250.000,00
- Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	821.250.000,00
<b>5.1.2.1.4. Belanja Subsidi</b>	<b>2.400.114.174,00</b>	<b>1.209.596.500,00</b>	<b>50,40</b>	<b>2.458.574.500,00</b>

Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Belanja Subsidi untuk Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp.1.248.978.000,00) atau sebesar (50,80%) dibandingkan Realisasi Tahun 2022. Hal ini terjadi karena Belanja Subsidi hanya terealisasi pada Dinas Perdagangan.

Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
<b>5.1.2.1.4.1. Belanja Subsidi Kepada BUMN</b>	<b>1.900.114.174,00</b>	<b>1.209.596.500,00</b>	<b>63,66</b>	<b>2.296.574.500,00</b>
a. Belanja Subsidi kepada BUMN	1.900.114.174,00	1.209.596.500,00	63,66	2.296.574.500,00
- Belanja Subsidi kepada BUMN	1.900.114.174,00	1.209.596.500,00	63,66	2.296.574.500,00
<b>5.1.2.1.4.2. Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000.000,00</b>
a. Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00	0,00	162.000.000,00
- Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00	0,00	162.000.000,00
<b>5.1.2.1.4.3. Belanja Subsidi Kepada Koperasi</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. Belanja Subsidi Kepada Koperasi	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Subsidi Kepada Koperasi	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.1.2.1.5. Belanja Hibah</b>	<b>119.391.939.549,00</b>	<b>104.622.124.811,00</b>	<b>87,63</b>	<b>82.597.051.357,00</b>
Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Belanja Hibah untuk Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.22.025.073.454,00 atau sebesar 26,67% dibandingkan Realisasi Tahun 2022. Hal ini terjadi terutama karena adanya peningkatan pada Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum yaitu pemberian hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sehubungan akan diselenggarakannya PEMILU Serentak pada Tahun 2024.				
Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :				
<b>5.1.2.1.5.1. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>6.263.124.933,00</b>	<b>3.378.791.259,00</b>	<b>53,95</b>	<b>3.399.431.704,00</b>
a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	6.263.124.933,00	3.378.791.259,00	53,95	3.399.431.704,00
- Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	6.263.124.933,00	3.378.791.259,00	53,95	3.399.431.704,00
<b>5.1.2.1.5.2. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum</b>	<b>81.745.132.216,00</b>	<b>69.868.335.552,00</b>	<b>85,47</b>	<b>49.027.498.000,00</b>
a. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	63.252.846.400,00	51.822.061.186,00	81,93	33.867.610.000,00
- Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	62.587.296.400,00	51.181.186.186,00	81,78	33.517.610.000,00
- Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	665.550.000,00	640.875.000,00	96,29	350.000.000,00
b. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
c. Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.413.785.816,00	18.018.674.366,00	97,85	15.159.888.000,00
- Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.329.800.000,00	18.018.674.366,00	98,30	15.159.888.000,00
- Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	83.985.816,00	0,00	0,00	0,00
d. Beban Hibah Kepada Koperasi	28.500.000,00	27.600.000,00	96,84	0,00
- Belanja Hibah Barang Kepada Koperasi	28.500.000,00	27.600.000,00	96,84	0,00
<b>5.1.2.1.5.3. Belanja Hibah Dana BOS</b>	<b>29.646.600.000,00</b>	<b>29.646.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28.858.514.653,00</b>
a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta	29.646.600.000,00	29.646.600.000,00	100,00	28.858.514.653,00
- Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta	29.646.600.000,00	29.646.600.000,00	100,00	28.858.514.653,00
<b>5.1.2.1.5.4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</b>	<b>1.737.082.400,00</b>	<b>1.728.398.000,00</b>	<b>99,50</b>	<b>1.311.607.000,00</b>
a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.737.082.400,00	1.728.398.000,00	99,50	1.311.607.000,00
- Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.737.082.400,00	1.728.398.000,00	99,50	1.311.607.000,00
<b>5.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>249.666.152,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>18,83</b>	<b>0,00</b>
Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.47.000.000,00 atau sebesar 100% dibandingkan Realisasi Tahun 2022. Hal ini terjadi karena pada Tahun 2022 tidak ada Realisasi Belanja Bantuan Sosial, baik kepada individu, keluarga maupun lembaga. Sedangkan pada Tahun 2023, Realisasi Belanja Bantuan Sosial diperuntukkan untuk Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya). Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :				
<b>5.1.2.1.6.1. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu</b>	<b>72.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	72.600.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	72.600.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.1.2.1.6.2. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Keluarga	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Keluarga	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.1.2.1.6.3. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)</b>	<b>137.066.152,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>34,29</b>	<b>0,00</b>
a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	137.066.152,00	47.000.000,00	34,29	0,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
- Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	137.066.152,00	47.000.000,00	34,29	0,00
<b>5.1.2.2. BELANJA MODAL</b>	<b>441.312.683.965,09</b>	<b>322.688.320.055,02</b>	<b>73,12</b>	<b>424.750.976.273,15</b>
Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Belanja Modal untuk Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp.102.062.656.218,13) atau sebesar (24,03%) dibandingkan Realisasi Tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya penurunan pada Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Sementara itu hanya Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang mengalami peningkatan.				
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :				
<b>5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>84.626.083.744,09</b>	<b>66.160.112.894,02</b>	<b>78,18</b>	<b>39.214.431.118,00</b>
Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.26.945.681.776,02 atau sebesar 68,71% dibandingkan Realisasi Tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan realisasi pada beberapa Belanja Modal Peralatan dan Mesin, seperti : Belanja Modal Alat Besar, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, Belanja Modal Komputer, Belanja Modal Rambu-Rambu, Belanja Modal Peralatan Olahraga, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.				
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :				
<b>5.1.2.2.2.1. Belanja Modal Alat Besar</b>	<b>448.648.060,00</b>	<b>349.605.000,00</b>	<b>77,92</b>	<b>98.200.000,00</b>
a. Belanja Modal Alat Besar Darat	203.305.000,00	203.305.000,00	100,00	0,00
- Belanja Modal Mesin Proses	203.305.000,00	203.305.000,00	100,00	0,00
b. Belanja Modal Alat Bantu	245.343.060,00	146.300.000,00	59,63	98.200.000,00
- Belanja Modal Electric Generating Set	9.000.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00
- Belanja Modal Pompa	236.343.060,00	146.300.000,00	61,90	73.700.000,00
<b>5.1.2.2.2.2. Belanja Modal Alat Angkutan</b>	<b>18.350.265.194,00</b>	<b>9.956.600.000,00</b>	<b>54,26</b>	<b>12.353.731.480,00</b>
a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	16.850.265.194,00	9.956.600.000,00	59,09	12.065.922.480,00
- Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.055.741.200,00	1.974.040.000,00	96,03	2.842.200.000,00
- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.289.800.000,00	1.281.800.000,00	99,38	1.815.000.000,00
- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.425.000.000,00	1.413.000.000,00	19,03	3.342.828.400,00
- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.579.723.994,00	3.910.510.000,00	85,39	553.724.080,00
- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	1.000.500.000,00
- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.500.000.000,00	1.377.250.000,00	91,82	2.511.670.000,00
b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.500.000.000,00	0,00	0,00	287.809.000,00
- Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.500.000.000,00	0,00	0,00	287.809.000,00
<b>5.1.2.2.2.3. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>226.244.330,00</b>	<b>85.125.000,00</b>	<b>37,63</b>	<b>5.820.860.920,00</b>
a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	168.744.330,00	65.125.000,00	38,59	3.370.631.000,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
- Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00	0,00	3.251.156.000,00
- Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus	16.000.000,00	15.750.000,00	98,44	0,00
- Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	152.744.330,00	49.375.000,00	32,33	119.475.000,00
b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
c. Belanja Modal Alat Ukur	32.500.000,00	20.000.000,00	61,54	2.450.229.920,00
- Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	27.000.000,00	20.000.000,00	74,07	25.721.046,00
- Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	2.374.559.774,00
- Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	5.500.000,00	0,00	0,00	49.949.100,00
<b>5.1.2.2.2.4. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>12.220.588.419,00</b>	<b>7.963.469.400,00</b>	<b>65,16</b>	<b>3.675.082.539,00</b>
a. Belanja Modal Alat Kantor	905.440.872,00	527.010.200,00	58,20	480.142.489,00
- Belanja Modal Mesin Ketik	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
- Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	27.100.000,00	27.100.000,00	100,00	11.650.000,00
- Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	95.500.000,00
- Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	318.850.000,00	270.140.000,00	84,72	49.500.000,00
- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	555.990.872,00	226.270.200,00	40,70	323.492.489,00
b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.855.934.830,00	4.989.274.900,00	63,51	1.907.750.050,00
- Belanja Modal Mebel	4.849.769.213,00	3.933.209.000,00	81,10	382.118.500,00
- Belanja Modal Alat Pembersih	426.056.083,00	52.500.000,00	12,32	41.100.000,00
- Belanja Modal Alat Pendingin	1.243.764.641,00	523.700.000,00	42,11	804.435.000,00
- Belanja Modal Alat Dapur	187.650.000,00	72.350.000,00	38,56	108.500.000,00
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.143.969.893,00	407.515.900,00	35,62	547.436.550,00
- Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.725.000,00	0,00	0,00	24.160.000,00
c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.459.212.717,00	2.447.184.300,00	70,74	1.287.190.000,00
- Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	750.230.420,00	554.050.000,00	73,85	280.675.000,00
- Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	71.046.592,00	13.500.000,00	19,00	6.500.000,00
- Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	794.958.408,00	671.863.000,00	84,52	248.495.000,00
- Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	723.214.130,00	579.725.000,00	80,16	217.770.000,00
- Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	30.364.810,00	3.100.000,00	10,21	0,00
- Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	540.420.017,00	306.330.000,00	56,68	114.420.000,00
- Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	548.978.340,00	318.616.300,00	58,04	419.330.000,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	<b>APBD-P Tahun 2023 (Rp.)</b>	<b>Realisasi Tahun 2023 (Rp.)</b>	<b>Persentase Capaian (%)</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 (Rp.)</b>
<b>5.1.2.2.2.5. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar</b>	<b>3.492.901.053,36</b>	<b>2.397.471.000,00</b>	<b>68,64</b>	<b>763.601.000,00</b>
a. Belanja Modal Alat Studio	3.451.172.132,36	2.392.471.000,00	69,32	732.951.000,00
- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	365.712.889,36	295.340.000,00	80,76	479.691.000,00
- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.346.790.000,00	1.887.457.000,00	80,43	0,00
- Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	299.010.888,00	123.354.000,00	41,25	50.600.000,00
- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	439.658.355,00	86.320.000,00	19,63	202.660.000,00
b. Belanja Modal Alat Komunikasi	35.000.000,00	5.000.000,00	14,29	30.650.000,00
- Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	13.000.000,00	0,00	0,00	30.650.000,00
- Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
c. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	6.728.921,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Modal Peralatan Komunikasi Untuk Dokumentasi	6.728.921,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.1.2.2.2.6. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>25.659.286.120,00</b>	<b>25.588.803.600,00</b>	<b>99,73</b>	<b>2.884.253.816,00</b>
a. Belanja Modal Alat Kedokteran	25.659.286.120,00	25.588.803.600,00	99,73	2.358.812.330,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	5.527.062.735,00	5.464.303.600,00	98,86	2.358.812.330,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	20.132.223.385,00	20.124.500.000,00	99,96	0,00
b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	525.441.486,00
- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	525.441.486,00
<b>5.1.2.2.2.7. Belanja Modal Alat Laboratorium</b>	<b>47.826.746,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>8,15</b>	<b>33.297.657,00</b>
a. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	33.297.657,00
- Belanja Modal System/Power Supply	0,00	0,00	0,00	33.297.657,00
b. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	37.264.369,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Modal Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	37.264.369,00	0,00	0,00	0,00
c. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	6.662.377,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Modal Peralatan Umum	3.177.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Modal Photo and Film Equipment	3.485.377,00	0,00	0,00	0,00
d. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	0,00
- Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	0,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
<b>5.1.2.2.2.8. Belanja Modal Komputer</b>	<b>6.964.669.185,73</b>	<b>4.991.449.678,00</b>	<b>71,67</b>	<b>3.829.054.564,00</b>
a. Belanja Modal Komputer Unit	4.926.499.307,73	3.740.722.928,00	75,93	2.862.038.137,23
- Belanja Modal Komputer Jaringan	59.500.000,00	59.000.000,00	99,16	0,00
- Belanja Modal Personal Computer	3.885.542.054,73	3.004.528.928,00	77,33	2.449.253.137,23
- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	981.457.253,00	677.194.000,00	69,00	412.785.000,00
b. Belanja Modal Peralatan Komputer	2.038.169.878,00	1.250.726.750,00	61,37	967.016.426,77
- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.675.644.332,00	1.065.971.750,00	63,62	837.222.454,00
- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	362.525.546,00	184.755.000,00	50,96	129.793.972,77
<b>5.1.2.2.2.9. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja</b>	<b>194.829.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.770.000,00</b>
a. Belanja Modal Alat Pelindung	194.829.600,00	0,00	0,00	196.770.000,00
- Belanja Modal Sabuk Pengaman	5.884.600,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	188.945.000,00	0,00	0,00	196.770.000,00
<b>5.1.2.2.2.10. Belanja Modal Alat Peraga</b>	<b>103.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	103.680.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	103.680.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.1.2.2.2.11. Belanja Modal Rambu-Rambu</b>	<b>202.254.350,00</b>	<b>198.000.000,00</b>	<b>97,90</b>	<b>197.600.000,00</b>
a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	202.254.350,00	198.000.000,00	97,90	197.600.000,00
- Belanja Modal Rambu Bersuar	198.500.000,00	198.000.000,00	99,75	0,00
- Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	3.754.350,00	0,00	0,00	197.600.000,00
<b>5.1.2.2.2.12. Belanja Modal Peralatan Olahraga</b>	<b>169.800.000,00</b>	<b>168.550.000,00</b>	<b>99,26</b>	<b>0,00</b>
a. Belanja Modal Peralatan Olahraga	169.800.000,00	168.550.000,00	99,26	0,00
- Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	169.800.000,00	168.550.000,00	99,26	0,00
<b>5.1.2.2.2.13. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS</b>	<b>9.490.777.523,00</b>	<b>9.490.777.523,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.605.489.768,00</b>
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	9.490.777.523,00	9.490.777.523,00	100,00	8.605.489.768,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	9.490.777.523,00	9.490.777.523,00	100,00	8.605.489.768,00
<b>5.1.2.2.2.14. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>	<b>7.054.313.163,00</b>	<b>4.966.361.693,02</b>	<b>70,40</b>	<b>756.489.374,00</b>
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.054.313.163,00	4.966.361.693,02	70,40	756.489.374,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.054.313.163,00	4.966.361.693,02	70,40	756.489.374,00
<b>5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>120.121.291.117,00</b>	<b>60.661.295.098,00</b>	<b>50,50</b>	<b>152.562.250.068,15</b>

Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp.91.900.954.970,15) atau sebesar (60,24%) dibandingkan Realisasi Tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya efisiensi pada Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan, yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung.





## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :				
<b>5.1.2.2.3.1. Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	<b>118.416.592.867,00</b>	<b>59.249.581.812,00</b>	<b>50,03</b>	<b>151.953.334.453,15</b>
a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	118.416.592.867,00	59.249.581.812,00	50,03	151.953.334.453,15
- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	93.956.030.902,00	42.074.649.322,00	44,78	106.674.956.563,15
- Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	3.649.757.500,00	2.333.961.500,00	63,95	0,00
- Belanja Modal Bangunan Kesehatan	6.105.388.015,00	4.202.272.190,00	68,83	1.801.395.065,00
- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	14.459.130.900,00	10.402.161.850,00	71,94	41.021.221.620,00
- Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	246.285.550,00	236.536.950,00	96,04	1.099.388.450,00
- Belanja Modal Bangunan Industri	0,00	0,00	0,00	1.206.372.755,00
- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
<b>5.1.2.2.3.2. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	<b>716.664.000,00</b>	<b>716.664.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>426.050.950,00</b>
a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	716.664.000,00	716.664.000,00	100,00	426.050.950,00
- Belanja Modal Pagar	716.664.000,00	716.664.000,00	100,00	426.050.950,00
<b>5.1.2.2.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>	<b>988.034.250,00</b>	<b>695.049.286,00</b>	<b>70,35</b>	<b>182.864.665,00</b>
a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	988.034.250,00	695.049.286,00	70,35	182.864.665,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	988.034.250,00	695.049.286,00	70,35	182.864.665,00
<b>5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>220.464.254.180,00</b>	<b>180.801.808.230,00</b>	<b>82,01</b>	<b>212.429.244.155,00</b>
Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp.31.627.435.925,00) atau sebesar (14,89%) dibandingkan Realisasi Tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya efisiensi pada Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, seperti : Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bangunan Air dan Belanja Modal Jaringan.				
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :				
<b>5.1.2.2.4.1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan</b>	<b>188.794.652.385,00</b>	<b>153.619.741.335,00</b>	<b>81,37</b>	<b>165.863.776.010,00</b>
a. Belanja Modal Jalan	172.045.569.135,00	146.338.088.735,00	85,06	159.919.070.580,00
- Belanja Modal Jalan Kota	41.309.545.210,00	33.007.204.135,00	79,90	90.077.137.555,00
- Belanja Modal Jalan Lainnya	130.736.023.925,00	113.330.884.600,00	86,69	69.841.933.025,00
b. Belanja Modal Jembatan	16.749.083.250,00	7.281.652.600,00	43,47	5.944.705.430,00
- Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Kota	16.749.083.250,00	7.281.652.600,00	43,47	5.944.705.430,00
<b>5.1.2.2.4.2. Belanja Modal Bangunan Air</b>	<b>31.340.416.295,00</b>	<b>26.904.294.095,00</b>	<b>85,85</b>	<b>45.030.755.270,00</b>
a. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	16.856.357.215,00	13.334.861.465,00	79,11	32.989.911.695,00
- Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	16.856.357.215,00	13.334.861.465,00	79,11	32.989.911.695,00
b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	14.466.699.080,00	13.561.979.280,00	93,75	11.456.473.670,00
- Belanja Modal Bangunan Pengaman	14.466.699.080,00	13.561.979.280,00	93,75	11.456.473.670,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
Pengamanan Sungai/Pantai				
c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	9.906.650,00	0,00	0,00	322.529.800,00
- Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	9.906.650,00	0,00	0,00	322.529.800,00
d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor	7.453.350,00	7.453.350,00	100,00	261.840.105,00
- Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	7.453.350,00	7.453.350,00	100,00	261.840.105,00
<b>5.1.2.2.4.3. Belanja Modal Instalasi</b>	<b>58.061.500,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>56,84</b>	<b>0,00</b>
a. Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	35.000.000,00	33.000.000,00	94,29	0,00
- Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Induk	35.000.000,00	33.000.000,00	94,29	0,00
b. Belanja Modal Instalasi Pengaman	23.061.500,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	23.061.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.1.2.2.4.4. Belanja Modal Jaringan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.367.000,00</b>
a. Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	1.491.367.000,00
- Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.491.367.000,00
<b>5.1.2.2.4.5. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD</b>	<b>271.124.000,00</b>	<b>244.772.800,00</b>	<b>90,28</b>	<b>43.345.875,00</b>
a. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	271.124.000,00	244.772.800,00	90,28	43.345.875,00
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	271.124.000,00	244.772.800,00	90,28	43.345.875,00
<b>5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>16.101.054.924,00</b>	<b>15.065.103.833,00</b>	<b>93,57</b>	<b>20.545.050.932,00</b>
Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp.5.479.947.099,00) atau sebesar (26,67%) dibandingkan Realisasi Tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya efisiensi pada Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.				
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :				
<b>5.1.2.2.5.1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan</b>	<b>77.000.000,00</b>	<b>73.861.300,00</b>	<b>95,92</b>	<b>46.000.000,00</b>
a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	75.000.000,00	73.861.300,00	98,48	46.000.000,00
- Belanja Modal Buku Umum	75.000.000,00	73.861.300,00	98,48	46.000.000,00
b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Modal Audio Visual	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.1.2.2.5.2. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga</b>	<b>1.260.294.151,00</b>	<b>276.902.500,00</b>	<b>21,97</b>	<b>157.213.739,00</b>
a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.225.500.000,00	242.502.500,00	19,79	157.213.739,00
- Belanja Modal Alat Musik	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	61.513.739,00
- Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	1.185.500.000,00	242.502.500,00	20,46	95.700.000,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	<b>APBD-P Tahun 2023 (Rp.)</b>	<b>Realisasi Tahun 2023 (Rp.)</b>	<b>Persentase Capaian (%)</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 (Rp.)</b>
b. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	34.794.151,00	34.400.000,00	98,87	0,00
- Belanja Modal Barang Kerajinan	34.794.151,00	34.400.000,00	98,87	0,00
<b>5.1.2.2.5.3. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud</b>	<b>54.500.000,00</b>	<b>11.736.000,00</b>	<b>21,53</b>	<b>0,00</b>
a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	54.500.000,00	11.736.000,00	21,53	0,00
- Belanja Modal Software	54.500.000,00	11.736.000,00	21,53	0,00
<b>5.1.2.2.5.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS</b>	<b>14.678.260.773,00</b>	<b>14.677.875.273,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	14.678.260.773,00	14.677.875.273,00	99,99	0,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	14.678.260.773,00	14.677.875.273,00	99,99	0,00
<b>5.1.2.2.5.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>24.728.760,00</b>	<b>79,77</b>	<b>7.052.029.689,00</b>
a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	31.000.000,00	24.728.760,00	79,77	7.052.029.689,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	31.000.000,00	24.728.760,00	79,77	7.052.029.689,00

**5.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 14.124.315.370,00 10.610.500.000,00 75,12 19.190.717.061,00**

Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Belanja Tidak Terduga untuk Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp.8.580.217.061,00) atau sebesar (44,71%) dibandingkan Realisasi Tahun 2022. Hal ini terjadi karena pada Tahun 2023, pandemi Covid-19 sudah mulai menghilang dan kebijakan sehubungan dengan pandemi Covid-19 tersebut sudah mulai dihentikan sehingga Realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2023 ini lebih kepada bantuan untuk korban bencana, seperti : banjir dan kebakaran, bantuan kematian, bantuan biaya akomodasi untuk pengobatan masyarakat tidak mampu yang harus melanjutkan pengobatan di Jakarta dan belanja untuk penyelenggaraan MTQ.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :

<b>5.1.2.3.1. Belanja Tidak Terduga</b>	<b>14.124.315.370,00</b>	<b>10.610.500.000,00</b>	<b>75,12</b>	<b>19.190.717.061,00</b>
<b>5.1.2.3.1.1. Belanja Tidak Terduga</b>	<b>14.124.315.370,00</b>	<b>10.610.500.000,00</b>	<b>75,12</b>	<b>19.190.717.061,00</b>
a. Belanja Tidak Terduga	14.124.315.370,00	10.610.500.000,00	75,12	19.190.717.061,00
- Belanja Tidak Terduga	14.124.315.370,00	10.610.500.000,00	75,12	19.190.717.061,00

Dari nilai Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 tersebut, terdapat pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk pelaksanaan MTQ Tahun 2023 yang tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp.726.318.902,00. Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menindaklanjutinya dengan mengembalikan kelebihan pembayaran dengan melakukan penyetoran ke Kas Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.138.800.000,00 dengan nomor STS 33/STS/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 dan melalui Bendahara Kegiatan MTQ sebesar Rp.587.518.902,00 dengan nomor STS 045/415/I.02/4/2024 Tanggal 24 April 2024.

**5.1.2.4. BELANJA TRANSFER 0,00 0,00 0,00 0,00**

Seperti tahun sebelumnya, pada Tahun 2023 ini juga tidak dianggarkan adanya Belanja Transfer.

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :

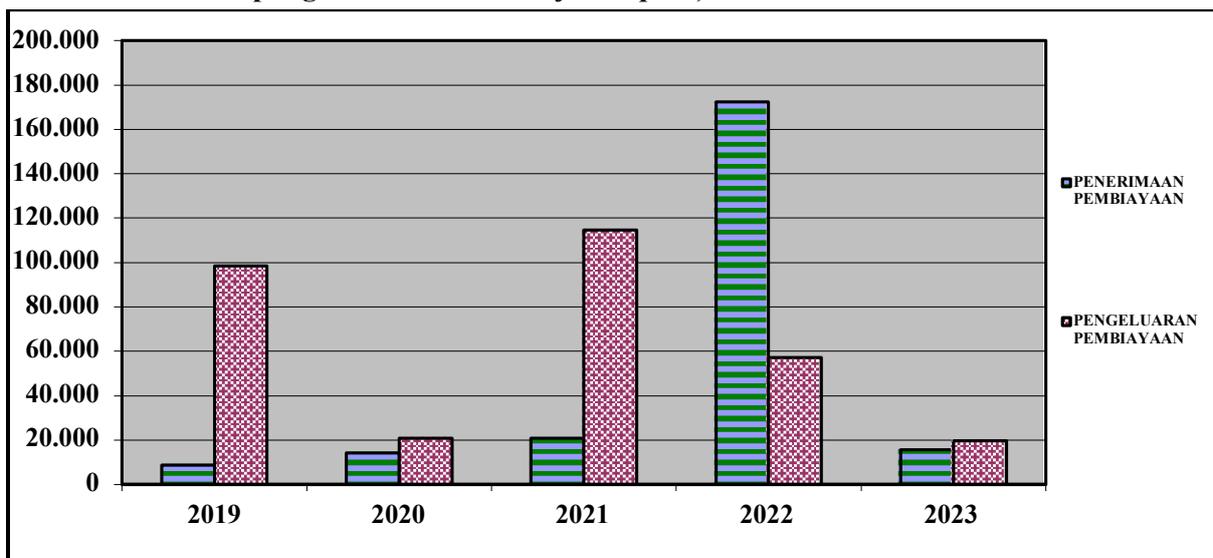
<b>5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**c. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah daerah, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan di Kota Bandar Lampung berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu dan hutang, sedangkan pengeluaran pembiayaan berasal dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran hutang.

**Gambar 5.3. Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023 (juta rupiah)**



Secara lebih rinci, berikut adalah pos-pos laporan realisasi anggaran pembiayaan untuk Tahun 2023 dan 2022, yaitu :

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
5.1.3. PEMBIAYAAN DAERAH	(2.653.508.756,10)	(4.181.236.216,58)	157,57	115.100.254.965,69

5.1.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.596.491.243,90	15.596.491.243,90	38,42	172.367.833.090,69
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------	--------------------

Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	<b>APBD-P Tahun 2023 (Rp.)</b>	<b>Realisasi Tahun 2023 (Rp.)</b>	<b>Persentase Capaian (%)</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 (Rp.)</b>
(Rp.156.771.341.846,79) atau sebesar (90,95%) dibandingkan Realisasi Tahun 2022. Hal ini dapat terjadi terutama karena pada Tahun 2022 adanya Realisasi Pinjaman dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) PT SMI berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor PERJ-220/SMI/1221 Tanggal 29 Desember 2021 yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dampak pandemi Covid-19 dan adanya Realisasi Pinjaman dari PT BPR Waway Lampung (Perseroda) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja-PDRS antara PT BPR Waway Lampung (Perseroda) dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 29925-2022 Tanggal 26 April 2022. Sementara itu pada Tahun 2023, Penerimaan Pembiayaan hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).				
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :				
<b>5.1.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	<b>15.596.491.243,90</b>	<b>15.596.491.243,90</b>	<b>100,00</b>	<b>15.600.869.420,54</b>
Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya untuk Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp.4.378.176,64) atau sebesar (0,03%) dibandingkan Realisasi Tahun 2022.				
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :				
<b>5.1.3.1.1.1. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran</b>	<b>15.596.491.243,90</b>	<b>15.596.491.243,90</b>	<b>100,00</b>	<b>15.600.869.420,54</b>
a. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	15.596.491.243,90	15.596.491.243,90	100,00	15.600.869.420,54
- Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	15.596.491.243,90	15.596.491.243,90	100,00	15.600.869.420,54
<b>5.1.3.1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.766.963.670,15</b>
Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah untuk Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp.156.766.963.670,15) atau sebesar (100%) dibandingkan Realisasi Tahun 2022. Hal ini dapat terjadi terutama karena pada Tahun 2022 adanya Realisasi Pinjaman dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) PT SMI berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor PERJ-220/SMI/1221 Tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.147.766.963.670,15 yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dampak pandemi Covid-19 dan adanya Realisasi Pinjaman dari PT BPR Waway Lampung (Perseroda) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja-PDRS antara PT BPR Waway Lampung (Perseroda) dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 29925-2022 Tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.9.000.000.000,00.				
Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :				
<b>5.1.3.1.2.1. Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Pusat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.766.963.670,15</b>
a. Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	147.766.963.670,15
- Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	147.766.963.670,15
<b>5.1.3.1.2.2. Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Pinjaman Daerah Dari LKB-BUMD-Jangka Pendek	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.1.3.1.2.3. Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000.000,00</b>
a. Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
- Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00

**5.1.3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 43.250.000.000,00 19.777.727.460,48 45,73 57.267.578.125,00**

Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Pengeluaran Pembiayaan untuk Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp.37.489.850.664,52) atau sebesar (65,46%) dibandingkan Realisasi Tahun 2022. Hal ini terjadi karena pada Tahun 2022 telah dilunasinya Pinjaman Daerah Kota Bandar Lampung pada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI - Persero) berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 31 dan 32 Tanggal 05 Mei 2017 di Bulan Oktober Tahun 2022 dan pelunasan Pinjaman Daerah Kota Bandar Lampung pada PT BPR Waway Lampung (Perseroda) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja-PDRS antara PT BPR Waway Lampung (Perseroda) dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 29925-2022 Tanggal 26 April 2022. Sementara itu pada Tahun 2023, Pengeluaran Pembiayaan hanya berasal dari Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena belum ada Realisasi dari Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) PT SMI berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor PERJ-220/SMI/1221 Tanggal 29 Desember 2021 yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dampak pandemi Covid-19 karena pada Tahun 2023 ini masih termasuk dalam masa tenggang atau *grace periode* pembayaran cicilan pokok pinjaman yang akan berakhir pada Bulan April Tahun 2024.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :

**5.1.3.2.1. Penyertaan Modal Daerah 23.250.000.000,00 19.777.727.460,48 85,07 4.000.000.000,00**

Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Penyertaan Modal Daerah untuk Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.15.777.727.460,48 atau sebesar 394,44% dibandingkan Realisasi Tahun 2022.

Realisasi Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :

**5.1.3.2.1.1. Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 23.250.000.000,00 19.777.727.460,48 85,07 4.000.000.000,00**

a. Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD	23.250.000.000,00	19.777.727.460,48	85,07	4.000.000.000,00
- Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD	23.250.000.000,00	19.777.727.460,48	85,07	4.000.000.000,00

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :

a. PT BPD Lampung	0,00	0,00	
b. BUMD-PDAM Way Rilau	16.930.727.460,48	3.500.000.000,00	
c. PT BPR Syariah B. Lampung	1.736.500.000,00	0,00	
d. PT Bank Waway Lampung	210.500.000,00	0,00	
e. PD Kebersihan Tapis Berseri	400.000.000,00	500.000.000,00	
f. PD Pasar Tapis Berseri	500.000.000,00	0,00	

**5.1.3.2.2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 20.000.000.000,00 0,00 0,00 53.267.578.125,00**

Dibandingkan Realisasi Tahun 2022 maka Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo untuk Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp.53.267.578.125,00) atau sebesar (100%) dibandingkan Realisasi Tahun 2022.

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :

**5.1.3.2.2.1. Pembayaran Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Pusat 20.000.000.000,00 0,00 0,00 53.267.578.125,00**

Pada Tahun 2023 ini, belum ada Realisasi dari Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) PT SMI berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor PERJ-220/SMI/1221 Tanggal 29 Desember 2021 yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dampak pandemi Covid-19 karena pada Tahun 2023 ini masih termasuk dalam masa tenggang atau *grace periode* pembayaran cicilan pokok pinjaman yang akan berakhir pada Bulan April Tahun 2024. Sementara itu, Realisasi Pembayaran Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2022 berasal dari pelunasan Pinjaman Daerah Kota Bandar Lampung pada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI - Persero) dan pelunasan Pinjaman Daerah Kota Bandar Lampung pada PT BPR Waway Lampung (Perseroda).



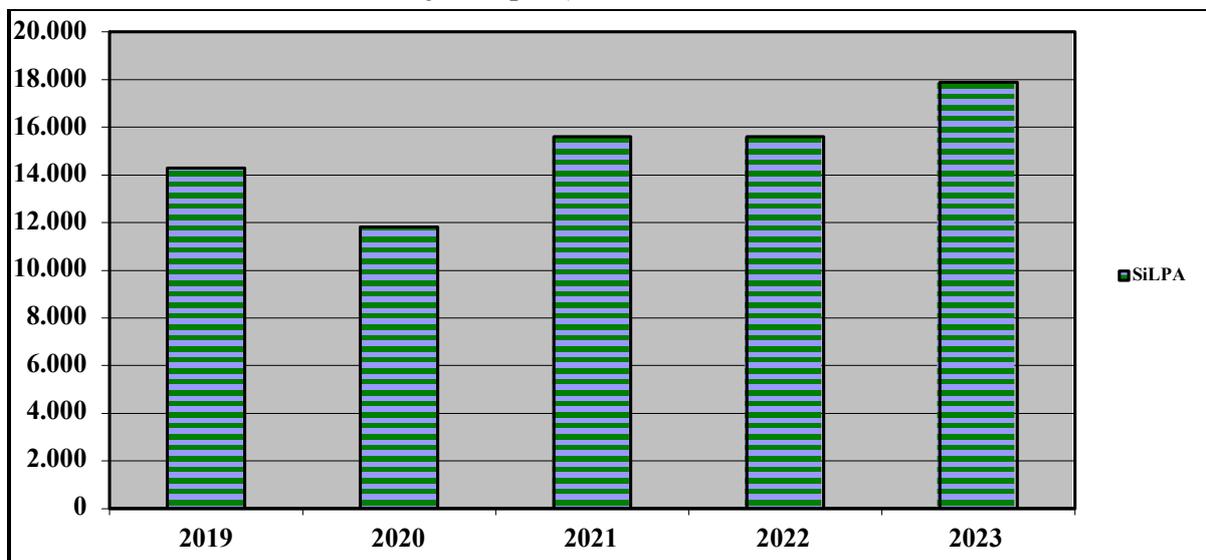
	APBD-P Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
a. Pembayaran Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	20.000.000.000,00	0,00	0,00	53.267.578.125,00
- Pembayaran Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	20.000.000.000,00	0,00	0,00	53.267.578.125,00

**d. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan dan belanja dalam LRA serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Dari gambar di bawah terlihat Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kota Bandar Lampung selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu Tahun 2019-2023. Untuk Tahun 2019-2023, SiLPA Kota Bandar Lampung terus mengalami fluktuasi. Realisasi SiLPA Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp.15.600.869.420,54 pada Tahun 2021, sebesar Rp.15.596.491.243,90 pada Tahun 2022 dan sebesar Rp.17.895.574.758,58 pada Tahun 2023.

**Gambar 5.4. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023 (juta rupiah)**





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Secara lebih rinci, berikut adalah pos-pos laporan realisasi anggaran SiLPA untuk Tahun 2023 dan 2022, yaitu :

	<b>APBD-P Tahun 2023 (Rp.)</b>	<b>Realisasi Tahun 2023 (Rp.)</b>	<b>Persentase Capaian (%)</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 (Rp.)</b>
<b>5.1.4. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>17.895.574.758,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596.491.243,90</b>
Saldo tersebut merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :				
a. Kas di Kas Daerah	0,00	148.271.656,52	0,00	89.532.806,64
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	116.827.672,00	0,00	375.169,00
c. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Kas di BLUD RSUD	0,00	3.012.290.446,12	0,00	11.617.415.952,18
e. Kas di BLUD Puskesmas	0,00	11.302.947.762,94	0,00	3.889.167.316,08
f. Kas BOK	0,00	3.315.237.221,00	0,00	0,00

Pemerintah Kota Bandar Lampung menyajikan Utang Belanja Tahun 2023 sebesar Rp.285.322.273.741,66. Utang tersebut merupakan kewajiban atas Beban Belanja Tahun 2022 dan 2023 yang belum dapat dibayarkan melalui APBD Tahun 2023. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya pada LRA tercatat sebesar Rp.15.596.491.243,90 yang nilainya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Utang Belanja sehingga belum dapat menutupi keseluruhan Utang Belanja. Kondisi ini menunjukkan Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengalami defisit riil pada Tahun 2023 sebesar (Rp.267.426.698.983,08). Adapun perhitungannya sebagai berikut :

<b>KETERANGAN</b>		<b>TAHUN 2023</b>	<b>TAHUN 2022</b>	<b>TAHUN 2021</b>
a.	Realisasi Pendapatan	Rp.2.299.794.223.208,49	Rp.2.174.115.798.278,21	Rp.2.127.749.572.151,91
b.	SiLPA T.A. Sebelumnya	Rp. 15.596.491.243,90	Rp. 15.600.869.420,54	Rp. 11.810.432.867,84
c.	Penerimaan Pembiayaan (Pinjaman)	<u>Rp. 0,00 +</u>	<u>Rp. 156.766.963.670,15 +</u>	<u>Rp. 9.000.000.000,00 +</u>
d.	Dana yang Tersedia untuk Belanja (a+b+c)	Rp.2.315.390.714.452,39	Rp.2.346.483.631.368,90	Rp.2.148.560.005.019,75
e.	Realisasi Belanja	Rp.2.277.717.412.233,33	Rp.2.273.619.562.000,00	Rp.2.018.391.119.974,21



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

KETERANGAN		TAHUN 2023	TAHUN 2022	TAHUN 2021
f.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 19.777.727.460,48	Rp. 57.267.578.125,00	Rp. 114.568.015.625,00
g.	Utang Belanja	<u>Rp. 285.322.273.741,66 +</u>	<u>Rp. 357.686.363.398,48 +</u>	<u>Rp. 653.315.841.610,26 +</u>
h.	Beban Belanja Pemda (e+f+g)	<u>Rp.2.582.817.413.435,47 -</u>	<u>Rp.2.688.573.503.523,48 -</u>	<u>Rp.2.786.274.977.209,47 -</u>
i.	Defisit Riil Pemda (d-h)	(Rp. 267.426.698.983,08)	(Rp. 342.089.872.154,58)	(Rp. 637.714.972.189,72)

Meskipun demikian, Pemerintah Kota Bandar Lampung masih memiliki Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Triwulan I sampai dengan III dan Pajak Rokok sampai dengan Triwulan IV yang seharusnya dapat diterima Tahun 2023 sebesar Rp.106.965.752.681,00.

Defisit riil ini terjadi dari tahun ke tahun dengan nilai yang menurun. Nilai defisit Tahun 2023 lebih rendah jika dibandingkan dengan defisit riil Tahun 2022 atau turun sebesar (Rp.74.663.173.171,50).



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp.)</b>	<b>(Rp.)</b>
<b>5.2.1. SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL</b>	<b>15.596.491.243,90</b>	<b>15.600.869.420,54</b>
5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	15.596.491.243,90	15.600.869.420,54
<b>5.2.3. SUB TOTAL (5.2.1.-5.2.2.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	17.895.574.758,58	15.596.491.243,90
<b>5.2.5. SUB TOTAL (5.2.3.+5.2.4.)</b>	<b>17.895.574.758,58</b>	<b>15.596.491.243,90</b>
5.2.6. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
5.2.7. Lain-Lain	0,00	0,00
<b>5.2.8. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5.2.3.+5.2.5.+5.2.6.+5.2.7.)</b>	<b>17.895.574.758,58</b>	<b>15.596.491.243,90</b>



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**3. Penjelasan Pos-Pos Neraca Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

	Per 31 Desember 2023 (Rp.)	Per 31 Desember 2022 (Rp.)
<b>5.3.1. ASET</b>	<b>6.588.059.307.452,35</b>	<b>6.399.993.929.140,18</b>
<b>5.3.1.1. ASET LANCAR</b>	<b>382.527.484.680,16</b>	<b>267.679.413.843,92</b>
<b>5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas</b>		
<b>5.3.1.1.1.a. Kas di Kas Daerah</b>	<b>148.271.656,52</b>	<b>89.532.806,64</b>

Merupakan saldo kas yang ada pada Bendahara Umum Daerah (BUD) per 31 Desember 2023, berupa Rekening Giro Bank Lampung Nomor 380.00.09.00002.2. a.n. Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandar Lampung.

Dari saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.148.271.656,52 tersebut, terdapat penggunaannya untuk membiayai belanja-belanja yang tidak sesuai dengan juknis penggunaan dana-dana tersebut.

Pemerintah Kota Bandar Lampung selama Tahun 2023 menerima DAK melalui rekening Kas Daerah sebesar Rp.176.554.895.223,00 yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp.39.502.740.170,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp.137.052.155.053,00. Dana DAK yang belum digunakan hingga 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.21.021.164.113,00 yang seharusnya tercatat sebagai sisa saldo kas DAK dengan perincian sebagai berikut.

**Perhitungan Sisa Dana DAK Fisik dan DAK Non Fisik Per 31 Desember 2023**

Uraian	Saldo per 1 Januari 2023 (Rp)	DAK 2022 Digunakan Tahun 2023 (Rp)	Penerimaan Tahun 2023 (Rp)	Pengembalian TPG (Rp)	Pengurangan DAU (Rp)	Pengeluaran Tahun 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8=2-3+4+5-6-7</i>
DAK Fisik	12.986.497.180,00	11.240.658.555,00	39.502.740.170,00	0,00	0,00	34.710.473.735,00	6.538.105.060,00
DAK Non Fisik	39.171.398.247,00	0,00	137.052.155.053,00	26.870.944,00	927.278.898,00	160.840.086.293,00	14.483.059.053,00
TPG PNSD	30.751.355.864,00	0,00	120.332.335.000,00	26.870.944,00	0,00	146.179.468.940,00	4.931.092.868,00
Tamsil	2.472.025.000,00	0,00	1.266.418.538,00	0,00	0,00	2.429.000.000,00	1.309.443.538,00
BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOK	1.903.470.685,00	0,00	9.823.872.315,00	0,00	0,00	7.337.727.987,00	4.389.615.013,00
BOK Tambahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOKB	2.881.902.800,00	0,00	4.528.249.200,00	0,00	0,00	3.773.840.000,00	3.636.312.000,00
Adminduk	821.181.898,00	0,00	0,00	0,00	821.181.898,00	0,00	0,00
Dana Pelayanan Kepariwisata	106.097.000,00	0,00	0,00	0,00	106.097.000,00	0,00	0,00
Dana PK2UKM	20.812.000,00	0,00	389.358.000,00	0,00	0,00	393.742.200,00	16.427.800,00
Dana FPM	168.818.000,00	0,00	133.782.000,00	0,00	0,00	234.080.000,00	68.520.000,00
Dana PPPA	35.085.000,00	0,00	403.715.000,00	0,00	0,00	401.216.716,00	37.583.284,00
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.650.000,00	0,00	174.425.000,00	0,00	0,00	91.010.450,00	94.064.550,00
<b>Jumlah</b>	<b>52.157.895.427,00</b>	<b>11.240.658.555,00</b>	<b>176.554.895.223,00</b>	<b>26.870.944,00</b>	<b>927.278.898,00</b>	<b>195.550.560.028,00</b>	<b>21.021.164.113,00</b>



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Selain itu, dana PEN yang belum digunakan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.756.829.900,00 yang seharusnya tercatat sebagai sisa saldo kas PEN dengan perincian sebagai berikut.

### Perhitungan Sisa Dana PEN Per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai Pinjaman PT SMI yang masuk ke Kas Daerah (Rp)	SP2D Pembayaran Kepada Pihak Ketiga Tahun 2022 (Rp)	SP2D Pembayaran Kepada Pihak Ketiga Tahun 2023 (Rp)	Sisa Dana PEN per 31 Desember 2023 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=2-3-4</i>
Tahap I	65.124.284.900,00	54.433.709.630,00	9.933.745.370,00	756.829.900,00
Tahap II	82.642.678.770,15	81.362.525.285,15	1.280.153.485,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>147.766.963.670,15</b>	<b>135.796.234.915,15</b>	<b>11.213.898.855,00</b>	<b>756.829.900,00</b>

Selain itu, sisa DAU yang ditentukan penggunaannya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.58.386.163.766,00 yang seharusnya tercatat sebagai saldo kas DAU yang ditentukan penggunaannya, dengan perincian sebagai berikut.

### Perhitungan Sisa Dana DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Per 31 Desember 2023

Bidang	Penerimaan pada Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Penggunaan pada Tahun 2023 (Rp)	Sisa Dana DAU yang Ditentukan Penggunaannya per 31 Desember 2023 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=2-3</i>
Penggajian Formasi PPPK	35.342.580.000,00	5.438.362.949,00	29.904.217.051,00
Pendanaan Kelurahan	25.200.000.000,00	25.200.000.000,00	0,00
Bidang Pendidikan	65.485.919.000,00	59.692.158.125,00	5.793.760.875,00
Bidang Kesehatan	67.879.905.000,00	45.191.719.160,00	22.688.185.840,00
Bidang Pekerjaan Umum	7.300.000.000,00	7.300.000.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>201.208.404.000,00</b>	<b>142.822.240.234,00</b>	<b>58.386.163.766,00</b>

Berdasarkan penjelasan di atas, seharusnya terdapat sisa DAK, dana PEN dan DAU yang ditentukan penggunaannya yang seharusnya tercatat di dalam saldo Kas di Kas Daerah masing-masing sebesar Rp.21.021.164.113,00, Rp.756.829.900,00 dan Rp.58.386.163.766,00. Namun demikian, saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 diketahui hanya tersedia sebesar Rp.148.271.656,52. Kondisi ini menunjukkan bahwa sisa DAK, dana PEN dan DAU yang ditentukan penggunaannya tersebut telah digunakan untuk kegiatan lain sebesar Rp.80.015.886.112,48 (Rp.21.021.164.113,00 + Rp.756.829.900,00 + Rp.58.386.163.766,00 – Rp.148.271.656,52).



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	<b>Per 31 Desember 2023</b>	<b>Per 31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp.)</b>	<b>(Rp.)</b>
<b>5.3.1.1.1.b. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>116.827.672,00</b>	<b>375.169,00</b>
Merupakan saldo kas per 31 Desember 2023 yang terdapat pada Bendahara Pengeluaran yang terdiri atas :		
a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	104.626.323,00	0,00
Adalah saldo kas di Bendahara Pengeluaran Badan KESBANGPOL yang merupakan sisa UP Tahun 2023 yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Badan Kesbangpol sehingga merupakan kas tekor sebesar Rp.104.637.752,00 dan baru disetorkan sebesar Rp.11.429,00 ke Kas Daerah per 31 Desember 2023. Sisa UP sebesar Rp.104.626.323,00 tersebut telah disetorkan ke kas daerah pada Tanggal 22 April 2024 sebesar Rp.8.000.000,00 dengan nomor STS 002/STS/IV.05/2024, Tanggal 23 April 2024 sebesar Rp.5.248.750,00 dengan nomor STS 003/STS/IV.05/2024 dan sebesar Rp.40.000.000,00 dengan nomor STS 004/STS/IV.05/2024 serta Tanggal 24 April 2024 sebesar Rp.51.377.573,00 dengan nomor STS 005/STS/IV.05/2024.		
b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12.161.349,00	0,00
Adalah saldo kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pemadam Kebakaran yang merupakan sisa UP yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2023. Sisa UP sebesar Rp.12.161.349,00 tersebut telah disetorkan ke kas daerah pada Tanggal 5 Januari 2024 sebesar Rp.7.411.332,00 dan Tanggal 30 Januari 2024 sebesar Rp.4.750.017,00.		
c. Kecamatan Sukabumi	40.000,00	0,00
Adalah saldo kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Sukabumi yang merupakan kekurangan setoran sisa UP Tahun 2023 yang seharusnya berjumlah sebesar Rp.50.798,00, baru disetorkan sebesar Rp.10.798,00 ke Kas Daerah per 31 Desember 2023. Sisa UP sebesar Rp.40.000,00 tersebut telah disetorkan ke kas daerah pada Tanggal 8 Januari 2024.		
d. Dinas PU	0,00	375.169,00
<b>5.3.1.1.1.c. Kas di BLUD</b>	<b>14.315.238.209,06</b>	<b>15.506.583.268,26</b>
Merupakan saldo kas per 31 Desember 2023 yang terdapat pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan BLUD Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terdiri atas :		
a. Kas di BLUD RSUD :	3.012.290.446,12	11.617.415.952,18
1) Saldo rekening bank pada BLUD RSUD A. Dadi Tjokrodipo :	2.808.545.565,41	11.305.341.578,47
a) Bank Mandiri No Rek. 114-00-0753248-7	642.894.018,05	2.985.394.447,02
b) Bank Mandiri No Rek. 114-00-0724773-0	1.107.586.940,56	5.418.284.589,85
c) Bank Waway No Rek. 001.10.06210	1.058.064.606,80	2.901.662.541,60



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	<b>Per 31 Desember 2023</b>	<b>Per 31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp.)</b>	<b>(Rp.)</b>
2) Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD A. Dadi Tjokrodipo	27.082.538,71	8.560.938,71
3) Dana Talangan	176.662.342,00	303.513.435,00
b. Kas di BLUD Puskesmas :	11.302.947.762,94	3.889.167.316,08
1) Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas	285.067.652,96	
2) Saldo kas pada Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas	670.000,00	
3) Saldo kas BLUD Puskesmas di Bank Lampung	11.007.061.592,86	
4) Saldo kas BLUD Puskesmas di Bank Mandiri	10.148.517,12	
<b>5.3.1.1.1.d. Kas di Bendahara BOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Telah dilakukan koreksi terhadap saldo kas di Bendahara BOS PAUD, SD dan SMP Swasta sebesar Rp.355.782.550,00 per 31 Desember 2023. Adapun rincian koreksi dari saldo kas tersebut terdiri atas :		
a. Saldo Dana BOS PAUD TK Mawar Benza Labuhan Ratu dan TK Al Hairiah Rajabasa yang belanjanya belum dianggarkan sehingga dilakukan koreksi.		99.426.000,00
b. Saldo Dana BOS SD Miftahul Jannah.		189.500.000,00
c. Saldo Dana BOS SMP Xaverius 1.		61.648.550,00
d. Saldo Dana BOS SMP Budaya yang telah tutup, telah disetorkan ke Kas Negara melalui Kas Daerah Kota Bandar Lampung per 31 Desember 2023.		5.208.000,00
<b>5.3.1.1.1.e. Kas Lainnya</b>	<b>117.040.000,00</b>	<b>208.448.071,00</b>
Merupakan saldo kas yang berasal dari utang belanja gaji pokok PNS a.n. Ahmad Tarmizi pada Kecamatan Kemiling per 31 Desember 2023.		
<b>5.3.1.1.1.f. Kas Dana BOK Puskesmas</b>	<b>3.315.237.221,00</b>	<b>0,00</b>
Merupakan saldo kas yang berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang terdapat pada 31 (tiga puluh satu) Puskesmas se-Kota Bandar Lampung per 31 Desember 2023. <i>Rincian atas Rekapitulasi Saldo Kas disajikan dalam Lampiran 1.</i>		
<b>5.3.1.1.2. Piutang Pajak Daerah</b>	<b>406.451.654.804,00</b>	<b>377.239.876.665,00</b>
Piutang Pajak merupakan tagihan/tunggakan atas pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terdiri atas :		
a. Piutang Pajak Hotel	38.253.717,00	16.669.098,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	<b>Per 31 Desember 2023</b>	<b>Per 31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp.)</b>	<b>(Rp.)</b>
b. Piutang Pajak Restoran	760.724.004,00	282.387.005,00
c. Piutang Pajak Hiburan	26.334.649,00	0,00
d. Piutang Pajak Reklame	2.972.150.685,00	3.101.383.448,00
e. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	402.575.766.130,00	373.760.157.260,00
f. Piutang Pajak Air Tanah	19.389.718,00	18.801.833,00
g. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	35.792.250,00	39.224.250,00
h. Piutang Pajak Parkir	23.243.651,00	21.253.771,00
i. Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT PLN (Persero) Wilayah Lampung Area Tanjungkarang, Nomor 15/PK/HK/2012 Nomor 106/SPK/160/Area TK/2012 Tanggal 12 April 2012 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa “PLN wajib menyetorkan hasil pemungutan PPI ke Kas Daerah paling lambat Tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan setelah bulan pemungutan ke rekening PT Bank Lampung...dst”, atas hal tersebut maka Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak mencantumkan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Bulan Desember 2022 sebagai Piutang Pajak Penerangan Jalan.

***Rincian atas Piutang Pajak disajikan dalam Lampiran 2.***

**5.3.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah 6.897.346.305,00 7.129.428.543,00**

Merupakan tagihan atau tunggakan atas SKR yang telah diterbitkan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan dan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdiri atas :

a. Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	452.634.380,00	1.784.967.117,00
b. Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	748.372.549,00	0,00
c. Piutang Retribusi Izin Gangguan/HO	171.460.000,00	171.460.000,00
d. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	94.055.000,00	230.190.000,00
e. Piutang Retribusi Sewa Rusunawa	322.500.000,00	332.250.000,00
f. Piutang Retribusi Pasar	1.221.509.350,00	723.746.400,00
1) Pasar Kangkung	192.500.000,00	192.500.000,00

Piutang Retribusi di Pasar Kangkung didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Cahaya Karunia Baru Nomor 600/370/10/2008, 034/SPT-CKB/IX/2008 yang terdiri dari Piutang Sewa Bangunan sebesar Rp.68.200.000,00 dan Piutang Penyediaan Fasilitas Pasar sebesar





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Per 31 Desember 2023 (Rp.)	Per 31 Desember 2022 (Rp.)
Rp.124.300.000,00.		
2) Gudang Lelang	416.835.000,00	405.915.000,00
Piutang Retribusi di Pasar Gudang Lelang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Cahaya Karunia Baru Nomor 05 Tahun 2007, 050/SU/CKB/X/2007 yang terdiri dari Piutang Sewa Bangunan sebesar Rp.37.440.000,00 dan Piutang Penyediaan Fasilitas Pasar sebesar Rp.379.395.000,00.		
3) Piutang Retribusi Sewa	568.174.350,00	125.331.400,00
Merupakan penambahan piutang retribusi sewa toko atau ruko karena terdapat toko atau ruko yang belum membayar sampai dengan Bulan Desember 2023 pada Dinas Perdagangan.		
4) Piutang Retribusi Sewa (Peralihan dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bandar Lampung)	44.000.000,00	0,00
Merupakan penambahan piutang retribusi sewa toko atau ruko karena terdapat toko atau ruko yang belum membayar yang merupakan peralihan dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bandar Lampung ke Dinas Perdagangan sampai dengan Bulan Desember 2023.		
g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	3.886.815.026,00	3.886.815.026,00
<i>Rincian atas Piutang Retribusi disajikan dalam Lampiran 3.</i>		
<b>5.3.1.1.4. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629.150.970,00</b>
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk tahun ini tidak dicatat sebagai piutang karena belum memiliki dasar untuk pencatatannya. <i>Rincian atas Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan dalam Lampiran 4.</i>		
<b>5.3.1.1.5. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah</b>	<b>39.107.033.222,96</b>	<b>9.311.726.495,19</b>
Merupakan saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 yang terdiri atas :		
a. Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD yang terdiri atas :		
1) Piutang Royalti Pasar	5.096.216.890,00	5.096.216.890,00
Merupakan Piutang Royalti Pasar yang berasal dari piutang kerjasama pembangunan dan pengelolaan pasar oleh pihak ketiga dengan kewajiban pembayaran hak royalti kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung sampai dengan 31 Desember 2023.		
2) Piutang Pendapatan Denda Pasar	4.144.850.000,00	3.995.150.000,00
Merupakan Piutang Pendapatan Denda Pasar yang berasal dari keterlambatan pembayaran kontribusi yang belum terbayarkan oleh PT SENJAYA REJEKI MAS		



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	(Rp.)	(Rp.)
sampai dengan 31 Desember 2023.		
3) Piutang HGB di atas HPL	6.642.200.000,00	0,00
Merupakan piutang pemanfaatan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Kota Bandar Lampung sampai dengan 31 Desember 2023. Dari nilai HGB di Atas HPL tersebut terdapat senilai Rp.3.726.960.000,00 yang asetnya sudah diambil alih oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.		
Pada Tahun 2022, Piutang HGB di atas HPL disajikan sebagai bagian dari Piutang Lainnya.		
b. Piutang Pendapatan Denda Pajak	1.270.388.281,00	208.170.373,28
Merupakan Piutang Pendapatan Denda Pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2023.		
c. Piutang Pendapatan Denda pada Dinas Pekerjaan Umum	26.420.333,19	3.414.136,09
Merupakan Piutang Pendapatan Denda pada Dinas Pekerjaan Umum yang berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum yang belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2023.		
d. Piutang Pendapatan Denda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	138.592.724,77	6.878.181,16
Merupakan Piutang Pendapatan Denda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2023.		
e. Piutang Koreksi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	1.896.914,66
Merupakan Saldo Piutang Koreksi atas Saldo Remunerasi pada Rekening Treasury Deposit Facility (TDF) pada T.A. 2022.		
f. Piutang BLUD	21.788.364.994,00	0,00
Saldo Piutang BLUD merupakan saldo dari pengajuan klaim oleh BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang hingga 31 Desember 2023 belum terbayar terdiri atas :		
1) Piutang BPJS Puskesmas	1.194.290.494,00	0,00
2) Piutang Jamkeskot	18.811.646.500,00	0,00
3) Piutang BPJS/JKN	1.720.806.300,00	0,00
4) Piutang Pemeriksaan MCU Anggota DPRD Kota Bandar Lampung	47.224.500,00	0,00
5) Piutang Parkir (RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo)	14.397.200,00	0,00
Pada Tahun 2022, Piutang BLUD disajikan sebagai bagian dari Piutang Lainnya.		
<b><i>Rincian atas Piutang Lain-Lain PAD yang Sah disajikan dalam Lampiran 5.</i></b>		



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	<b>Per 31 Desember 2023</b>	<b>Per 31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp.)</b>	<b>(Rp.)</b>
<b>5.3.1.1.6. Piutang Transfer Antar Daerah</b>	<b>106.965.752.681,00</b>	<b>71.743.832.472,00</b>
Merupakan saldo tagihan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2023 yang terdiri atas :		
a. Bagi Hasil Pajak PKB	28.106.764.703,00	24.256.427.292,00
b. Bagi Hasil Pajak BBN-KB	17.475.426.135,00	12.588.787.792,00
c. Bagi Hasil Pajak PBB-KB	53.268.807.376,00	26.068.786.260,00
d. Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	168.705.767,00	69.503.551,00
e. Bagi Hasil Pajak Rokok	7.946.048.700,00	8.760.327.577,00
Rincian Piutang Dana Bagi Hasil tersebut adalah merupakan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak PKB Triwulan II, III dan IV T.A. 2023, Pajak BBN-KB Triwulan II, III dan IV T.A. 2023, Pajak PBB-KB Triwulan I, II, III dan IV T.A. 2023, Pajak Air Permukaan Triwulan II, III dan IV T.A. 2023 dan Pajak Rokok Triwulan IV T.A. 2023 yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.		
<i>Rincian atas Piutang Transfer Antar Daerah disajikan dalam Lampiran 6.</i>		
<b>5.3.1.1.7. Piutang Lainnya</b>	<b>2.314.755.251,00</b>	<b>9.653.607.251,00</b>
Merupakan saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 yang terdiri atas :		
a. Piutang BLUD	0,00	227.852.000,00
Saldo Piutang BLUD merupakan saldo dari pengajuan klaim oleh BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang hingga 31 Desember 2023 belum terbayar terdiri atas :		
1) Piutang BPJS Puskesmas	0,00	216.454.800,00
2) Piutang Jamkeskot	0,00	0,00
3) Piutang BPJS/JKN	0,00	0,00
4) Piutang Pemeriksaan MCU Anggota DPRD Kota Bandar Lampung	0,00	0,00
5) Piutang Parkir (RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo)	0,00	11.397.200,00
b. Piutang HGB di Atas HPL	0,00	7.110.500.000,00
Merupakan piutang pemanfaatan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.		
c. Bagian Lancar TGR	2.314.755.251,00	2.315.255.251,00
Merupakan saldo tagihan Pemerintah Kota Bandar Lampung per 31 Desember 2023 atas terjadinya tuntutan ganti rugi yang telah terbit surat ketetapannya.		
<i>Rincian atas Piutang Lainnya disajikan dalam Lampiran 7.</i>		
<b>5.3.1.1.8. Penyisihan Piutang</b>	<b>(277.016.510.378,57)</b>	<b>(290.383.762.169,00)</b>
Rincian Penyisihan Piutang yang terdiri atas :		
a. Penyisihan Piutang Pajak	(260.250.734.319,00)	(273.288.703.062,00)
Rincian Penyisihan Piutang Pajak yang terdiri atas :		
1) Penyisihan Piutang Pajak	(191.269,00)	(0,00)



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	<b>Per 31 Desember 2023</b>	<b>Per 31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp.)</b>	<b>(Rp.)</b>
Hotel		
2) Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(38.607.344,00)	(4.076.772,00)
3) Penyisihan Piutang Hiburan	(131.673,00)	(0,00)
4) Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(174.914.926,00)	(177.985.429,00)
5) Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(259.997.745.639,00)	(273.076.008.688,00)
6) Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(2.603.175,00)	(1.952.473,00)
7) Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(35.792.250,00)	(28.633.800,00)
8) Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(748.043,00)	(45.900,00)
b. Penyisihan Piutang Retribusi	(5.027.359.169,57)	(4.888.342.217,00)
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi yang terdiri atas :		
1) Penyisihan Piutang Retribusi Pasar	(445.643.700,75)	(386.567.000,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Pasar terdiri atas Penyisihan Piutang Sewa Bangunan sebesar Rp.138.895.700,75 dan Penyisihan Piutang Penyediaan Fasilitas Pasar sebesar Rp.306.748.000,00		
2) Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	(3.866.443.566,00)	(3.874.365.898,00)
3) Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	(9.430.000,00)	(16.610.000,00)
4) Penyisihan Piutang Sewa Rusunawa	(207.150.000,00)	(244.980.000,00)
5) Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	(323.496.849,50)	(194.359.319,00)
6) Penyisihan Piutang Retribusi Izin Gangguan/HO	(171.460.000,00)	(171.460.000,00)
7) Penyisihan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	(3.735.053,32)	(0,00)



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Per 31 Desember 2023 (Rp.)	Per 31 Desember 2022 (Rp.)
c. Penyisihan Piutang Royalti Pasar	(5.096.216.890,00)	(5.096.216.890,00)
Merupakan penyisihan piutang yang terdapat pada Dinas Perdagangan.		
d. Penyisihan Piutang HGB di atas HPL	(6.642.200.000,00)	(7.110.500.000,00)
Merupakan penyisihan piutang pemanfaatan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.		
<i>Rincian atas Penyisihan Piutang disajikan dalam Lampiran 8.</i>		
<b>5.3.1.1.9. Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>1.143.851.897,39</b>	<b>1.275.273.129,73</b>
Merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 atas sewa gedung/kantor pada 13 OPD, yaitu : Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Sekretariat Pemerintah Kota Bandar Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Telukbetung Timur, Kecamatan Labuhan Ratu dan Kecamatan Langkapura.		
<i>Rincian atas Beban Dibayar Dimuka disajikan dalam Lampiran 9.</i>		
<b>5.3.1.1.10. Persediaan</b>	<b>78.650.986.138,80</b>	<b>59.275.341.172,10</b>
Merupakan saldo Persediaan Barang pada OPD dan BLUD per 31 Desember 2023 yang terdiri atas :		
a. Persediaan Barang Pakai Habis	78.650.986.138,80	59.275.341.172,10
b. Persediaan Barang Tak Pakai Habis	0,00	0,00
c. Persediaan Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00
Dari Persediaan Barang pada OPD dan BLUD tersebut, termasuk didalamnya Persediaan Barang Lainnya Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sebesar Rp.57.029.198.697,00 sampai dengan 31 Desember 2023.		
<i>Rincian atas Persediaan Barang pada OPD dan BLUD serta Persediaan Barang Lainnya Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum disajikan dalam Lampiran 10.</i>		
<b>5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>277.708.446.849,43</b>	<b>303.637.782.632,09</b>
<b>5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen</b>	<b>1.603.566.211,83</b>	<b>1.612.345.490,18</b>
<b>5.3.1.2.1. 1. Dana Bergulir</b>	<b>1.603.566.211,83</b>	<b>1.612.345.490,18</b>
Nilai bersih Dana Bergulir yang dapat direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri atas :		
a. Dinas Koperasi dan UKM	135.199.343,00	145.228.535,00
Pemberian Dana Bergulir oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM ini merupakan perkuatan permodalan dalam bentuk Pinjaman Modal Bergulir kepada Pengusaha Mikro melalui KSP/USP. Adapun total Dana Bergulir Koperasi yang		



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Per 31 Desember 2023**      **Per 31 Desember 2022**  
**(Rp.)**                                      **(Rp.)**

telah digulirkan dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2008 berjumlah sebesar Rp.1.350.000.000,00 yang diberikan pada dua puluh tujuh koperasi, dimana masing-masing koperasi mendapat pinjaman sebesar Rp.50.000.000,00 dan penyalurannya dilakukan dalam tiga periode, yaitu :

- 1) Penyaluran Dana Bergulir Koperasi yang pertama dilakukan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor : 166A/06/HK/2002 Tanggal 04 Juli 2002 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Modal Produktif Proyek Peningkatan Kinerja/Pemberdayaan Pengusaha Kecil Menengah Koperasi (PKMK) Kota Bandar Lampung Tahun 2002 bagi dua kluster dan satu koperasi.
- 2) Penyaluran yang kedua dilakukan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor : 214/06/HK/2007 Tanggal 05 Juni 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Untuk Koperasi T.A. 2007 Kota Bandar Lampung bagi sembilan belas koperasi.
- 3) Penyaluran yang ketiga dilakukan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor : 419/06/HK/2008 Tanggal 07 Januari 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Untuk Koperasi T.A. 2008 bagi lima koperasi.

Dari jumlah total Dana Bergulir tersebut, telah berhasil disetorkan kembali ke Kas Daerah sebesar Rp.727.218.174,00. Adapun sisanya, karena dalam perjalanannya banyak dari koperasi tersebut yang melakukan tunggakan setoran pengembalian Dana Bergulir dan banyak juga dari koperasi tersebut yang sudah tidak beroperasi lagi maka berdampak pada macetnya dana kredit yang digulirkan. Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2023, sisa Dana Bergulir (Pokok) Koperasi yang masih ada di koperasi dan PT Bank Waway Lampung berjumlah sebesar Rp.622.781.826,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dana Bergulir Koperasi Macet : Rp. 487.582.483,00
- 2) Tabungan/Angsuran Koperasi di Bank Waway : Rp. 135.199.343,00

Dari data tersebut di atas maka jumlah Investasi Non Permanen dari Dana Bergulir Koperasi sampai dengan Tanggal 31 Desember 2023 berjumlah sebesar Rp.135.199.343,00. Akan tetapi, jumlah Investasi Permanen sebesar itu belum dapat diakui secara penuh oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung karena masih dalam bentuk Tabungan Angsuran Dana Bergulir Koperasi di PT Bank Waway Lampung, tidak dapat dicairkan karena tabungan tersebut masih atas nama masing-masing koperasi yang mendapatkan Dana Bergulir dan banyak dari koperasi tersebut yang sudah tidak beroperasi lagi.

b. Investasi pada Kredit Ekonomi                                      1.468.366.868,83                                      1.467.116.955,18  
Kerakyatan (EKOR)

Kredit EKOR ini merupakan dana Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dipinjamkan kepada penerima kredit untuk tambahan modal usaha dengan sistem Dana Bergulir dengan jangka waktu maksimal dua tahun. Berdasarkan Surat Wali Kota Bandar Lampung Nomor : 700.280.III.15.2014 Tanggal 30 April 2013 dan Nomor :





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Per 31 Desember 2023**      **Per 31 Desember 2022**  
**(Rp.)**                                      **(Rp.)**

700.280.a.III.15.2014 Tanggal 30 Mei 2014 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung T.A. 2013 maka Dana Bergulir EKOR yang semula berjumlah sebesar Rp.6.500.000.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.3.169.791.854,00. Dari jumlah tersebut, sampai dengan Tanggal 31 Desember 2023, telah dilakukan penyaluran Dana Bergulir EKOR dengan jumlah total sebesar Rp.1.850.916.322,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Dana Bergulir EKOR Macet di Debitur :
  - Dana Macet (Periode 2006 - 2010) : Rp. 936.839.491,00
  - Dana Macet (Periode 2011 - 2016) : Rp. 725.918.573,00
  - Dana Macet (Periode 2017 - 2021) : Rp. 36.333.215,00
  - Jumlah Dana Bergulir EKOR Macet di Debitur : Rp. 1.699.091.279,00
- 2). Dana Bergulir EKOR di Debitur :
  - Dana Lancar : Rp. 145.075.054,00
  - Dana Kurang Lancar : Rp. 4.416.659,00
  - Dana Diragukan : Rp. 2.333.330,00
  - Jumlah Dana Bergulir EKOR di Debitur : Rp. 151.825.043,00
- 3). Penyisihan Dana Bergulir EKOR yang Belum Diperhitungkan :
  - Dana Lancar (0 – 1 Tahun, penyisihan sebesar 0,5%) : (Rp. 725.375,27)
  - Dana Kurang Lancar (Lebih dari 1 – 3 Tahun, penyisihan sebesar 10%) : (Rp. 441.665,90)
  - Dana Diragukan (Lebih dari 3 – 5 Tahun, penyisihan sebesar 50%) : (Rp. 1.166.665,00)
  - Jumlah Penyisihan Dana Bergulir EKOR yang Belum Diperhitungkan : (Rp. 2.333.706,17)

Dari jumlah Dana Bergulir EKOR yang telah disalurkan tersebut, terdapat dana bergulir yang belum diperhitungkan penyisihannya sebesar (Rp.2.333.706,17).

Adapun sisa Dana Bergulir EKOR pada PT Bank Waway Lampung atau yang belum disalurkan ke debitur per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.318.875.532,00.

Berdasarkan hal tersebut maka jumlah Investasi Permanen dari Dana Bergulir EKOR sampai dengan Tanggal 31 Desember 2023 berjumlah sebesar Rp.1.468.366.868,83, tidak termasuk nasabah macet.

*Rincian atas Perhitungan Dana Bergulir disajikan dalam Lampiran 11.*

<b>5.3.1.2.2. Investasi Permanen</b>	<b>276.104.880.637,60</b>	<b>302.025.437.141,91</b>
<b>5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</b>	<b>276.104.880.637,60</b>	<b>302.025.437.141,91</b>

Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah akumulasi Penyertaan Modal pada BUMD/Badan Usaha Lain yang terdiri atas :

<b>a. PT BPD Lampung</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>25.000.000.000,00</b>
--------------------------	--------------------------	--------------------------





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Per 31 Desember 2023**      **Per 31 Desember 2022**  
**(Rp.)**                                      **(Rp.)**

Kepemilikan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PT BPD Lampung per 31 Desember 2023 adalah sebesar 5,95% sehingga penyajian dan perhitungan Investasi Permanen pada PT BPD Lampung menggunakan metode biaya (*cost method*). Berdasarkan Laporan Keuangan PT BPD Lampung per 31 Desember 2023 *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan, diketahui data sebagai berikut :

1) Jumlah Setoran Modal		
Pemerintah Kota B. Lampung	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
2) Jumlah Total Lembar Saham		
Seri A Prioritas	2.500.000 lembar	2.500.000 lembar
3) Jumlah Prosentase	5,95%	5,99%
Kepemilikan		

**b. PDAM Way Rilau**                                      **98.275.492.301,37**                                      **132.759.186.446,89**

Kepemilikan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PDAM Way Rilau per 31 Desember 2023 adalah sebesar 100% sehingga penyajian dan perhitungan Investasi Permanen pada PDAM Way Rilau menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Way Rilau per 31 Desember 2023 *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan, Rugi Tahun 2023 adalah sebesar (Rp.51.414.421.606,00) setelah sebelumnya juga mengalami kerugian. Selain itu, Deviden yang disetorkan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.0,00. Dengan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 sebesar Rp.16.930.727.460,48 maka perhitungan Nilai Investasi Permanen pada PDAM Way Rilau per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.98.275.492.301,37.

**c. PT BPR Syariah Bandar Lampung**                                      **27.137.809.644,78**                                      **23.355.212.306,67**

Kepemilikan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PT BPR Syariah Bandar Lampung per 31 Desember 2023 adalah sebesar 92,83% sehingga penyajian dan perhitungan Investasi Permanen pada PT BPR Syariah Bandar Lampung menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Berdasarkan Laporan Keuangan PT BPR Syariah Bandar Lampung per 31 Desember 2023 *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Zubaidi, Komaruddin, diketahui data sebagai berikut :

1) Jumlah Setoran Modal		
Pemerintah Kota B. Lampung	14.478.500.000,00	14.478.500.000,00
2) Jumlah Total Lembar Saham	28.957 lembar	28.957 lembar
3) Jumlah Prosentase	92,83%	92,83%
Kepemilikan Saham		

PT BPR Syariah Bandar Lampung melaporkan Laba Tahun 2023 sebesar Rp.4.189.606.972,00. Selain itu, Deviden yang disetorkan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.843.114.814,00. Dengan





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Per 31 Desember 2023**      **Per 31 Desember 2022**  
**(Rp.)**                                      **(Rp.)**

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 sebesar Rp.1.736.500.000,00 maka perhitungan Nilai Investasi Permanen pada PT BPR Syariah Bandar Lampung per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.27.137.809.644,78.

- d. PT Bank Waway Lampung**                                      **124.905.606.312,06**                                      **120.122.861.993,31**  
Kepemilikan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PT Bank Waway Lampung per 31 Desember 2023 adalah sebesar 99,92% sehingga penyajian dan perhitungan Investasi Permanen pada PT Bank Waway Lampung menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank Waway Lampung per 31 Desember 2023 *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Weddie Andriyanto & Muhaemin, Laba Tahun 2023 adalah sebesar Rp.6.543.312.816,00. Selain itu, Deviden yang disetorkan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.965.833.847,00. Dengan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 sebesar Rp.210.500.000,00 maka perhitungan Nilai Investasi Permanen pada PT Bank Waway Lampung per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.124.905.606.312,06.
- e. PD Kebersihan Tapis Berseri**                                      **462.296.185,59**                                      **459.794.868,24**  
Kepemilikan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PD Kebersihan Tapis Berseri per 31 Desember 2023 adalah sebesar 100% sehingga penyajian dan perhitungan Investasi Permanen pada PD Kebersihan Tapis Berseri menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Berdasarkan Laporan Keuangan PD Kebersihan Tapis Berseri per 31 Desember 2023 *unaudited*, rugi Tahun 2023 adalah sebesar (Rp.366.997.582,65). Selain itu, Deviden yang disetorkan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.30.501.100,00. Dengan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 sebesar Rp.400.000.000,00 maka perhitungan Nilai Investasi Permanen pada PD Kebersihan Tapis Berseri per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.462.296.185,59.
- f. PD Pasar Tapis Berseri**                                      **323.676.193,80**                                      **328.381.526,80**  
Kepemilikan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PD Pasar Tapis Berseri per 31 Desember 2023 adalah sebesar 100% sehingga penyajian dan perhitungan Investasi Permanen pada PD Pasar Tapis Berseri menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Berdasarkan Laporan Keuangan PD Pasar Tapis Berseri per 31 Desember 2023 *unaudited*, rugi Tahun 2023 adalah sebesar (Rp.504.705.333,00). Selain itu, Deviden yang disetorkan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.0,00. Dengan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 sebesar Rp.500.000.000,00 maka perhitungan Nilai Investasi Permanen pada PD Pasar Tapis Berseri per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.323.676.193,80.
- Rincian atas Perhitungan Investasi Permanen disajikan dalam Lampiran 12.**



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	<b>Per 31 Desember 2023</b>	<b>Per 31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp.)</b>	<b>(Rp.)</b>
<b>5.3.1.3. ASET TETAP</b>	<b>5.887.475.511.619,67</b>	<b>5.801.431.419.264,08</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023.		
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp.5.887.475.511.619,67 merupakan nilai buku aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp.8.542.283.315.799,37 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.654.807.804.179,69 dengan rincian sebagai berikut :		
Penambahan Aset Tetap sebesar Rp.1.558.241.916.985,25 dapat dijelaskan sebagai berikut :		
- Belanja Modal	154.726.093.508,00	118.126.520.752,00
- Hibah	8.220.581.154,00	1.485.897.108,00
- Hutang Belanja Modal Tahun 2022	0,00	128.434.804.665,59
- Hutang Belanja Modal Tahun 2023	103.509.275.938,80	0,00
- Belanja Pemeliharaan	4.210.158.093,00	13.919.370.910,00
- Hutang Belanja Pemeliharaan	1.923.725.725,00	4.350.761.330,00
- Konsultan Perencanaan	5.149.227.792,12	4.055.240.758,39
- Hutang Konsultan Perencanaan	4.827.144.189,00	5.092.519.570,88
- Konsultan Pengawasan	466.185.027,72	915.322.299,95
- Hutang Konsultan Pengawasan	6.036.251.410,03	4.931.616.772,39
- Dana BOS yang Menjadi Aset	24.168.652.796,00	21.895.297.272,00
- Aset Lainnya (TGR, Aset Tidak Berwujud)	0,00	0,00
- BLUD	5.549.826.471,02	8.034.729.603,00
- Aset yang Belum Tercatat	43.564.509.280,00	2.726.256.000,00
- Koreksi Atas Kesalahan Pencatatan	1.000.371.840.657,26	11.783.465.971,00
- Aset Tetap Dari Kontruksi Dalam Pengerjaan	20.864.571.912,78	63.188.041.581,31
- Reklas (Bertambah)	759.215.071,00	50.874.036.119,00
- Fasum dan Fasos	5.390.065.000,00	795.223.086.000,00
- Mutasi	168.504.592.959,51	88.851.071.417,96
- NUSP	0,00	0,00
	<b>1.558.241.916.985,25</b>	<b>1.323.888.038.131,47</b>
Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp.1.258.399.216.916,28 dapat dijelaskan sebagai berikut :		
- Ekstracountabel Tahun 2022	0,00	344.974.835,00
- Ekstracountabel Tahun 2023	4.848.176.530,80	0,00
- STS	2.872.276.617,31	3.742.847.008,90
- Penghapusan	39.433.528.658,68	18.900.795.470,00
- Tidak Masuk SK Penghapusan (Koreksi)	0,00	0,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Per 31 Desember 2023 (Rp.)	Per 31 Desember 2022 (Rp.)
- Reklas ke Aset Lainnya	5.165.922.025,00	904.780.500,00
- Hibah ke Pihak Ketiga	13.447.639.736,56	1.989.029.380,09
- Tidak Menjadi Aset Tetap	141.390.074,50	286.154.765,00
- Persediaan	36.900.000,00	28.242.725,00
- Koreksi Atas Kesalahan Pencatatan	996.470.918.031,90	65.152.354.347,33
- Kontruksi Dalam Pengerjaan yang Menjadi Aktiva Tetap	26.946.444.838,02	65.724.083.467,31
- Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	531.427.444,00	536.487.564,00
- Kesalahan Penganggaran	0,00	0,00
- Mutasi	<u>168.504.592.959,51</u>	<u>88.851.071.417,96</u>
	<b>1.258.399.216.916,28</b>	<b>246.460.821.480,59</b>

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 adalah sebesar Rp.322.688.320.055,02. Realisasi Belanja Modal tersebut yang tercatat sebagai tambahan aset hanya sebesar Rp.184.444.572.775,02. Selisih sebesar Rp.138.243.747.280,00 adalah merupakan pembayaran realisasi Utang Belanja Modal Tahun 2022.

**RINCIAN ASET TETAP**

NAMA BIDANG BARANG	SALDO AWAL	JUMLAH		SALDO 31 DESEMBER 2023
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
<b>Tanah</b>	<b>2.838.651.823.505,00</b>	9.412.373.174,00	<b>3.848.282.087,00</b>	<b>2.844.215.914.592,00</b>
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>581.391.483.219,92</b>	95.460.013.546,02	<b>51.228.689.164,58</b>	<b>625.622.807.601,36</b>
<i>Penyusutan</i>	<i>449.992.229.900,67</i>	<i>47.117.627.027,67</i>	-	<i>473.922.146.780,31</i>
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>1.550.560.275.426,32</b>	234.670.506.662,74	<b>134.285.251.503,85</b>	<b>1.650.945.530.585,21</b>
<i>Penyusutan</i>	<i>294.480.599.569,17</i>	<i>40.833.509.130,07</i>	-	<i>343.479.011.297,12</i>
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>3.040.580.766.068,67</b>	1.137.886.291.295,04	<b>1.014.299.686.242,93</b>	<b>3.164.167.371.120,77</b>
<i>Penyusutan</i>	<i>1.692.413.715.778,42</i>	<i>142.739.993.545,46</i>	-	<i>1.833.077.937.865,81</i>
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>138.868.264.475,05</b>	14.998.682.434,00	<b>13.736.000,00</b>	<b>153.853.210.909,05</b>
<i>Penyusutan</i>	<i>4.122.651.218,06</i>	<i>206.057.018,39</i>	-	<i>4.328.708.236,45</i>
<b>Kontruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>92.388.003.035,44</b>	65.814.049.873,45	<b>54.723.571.917,92</b>	<b>103.478.480.990,97</b>
<b>Jumlah</b>	<b>8.242.440.615.730,40</b>	<b>1.558.241.916.985,25</b>	<b>1.258.399.216.916,28</b>	<b>8.542.283.315.799,37</b>
<i>Jumlah Penyusutan</i>	<i>2.441.009.196.466,32</i>	<i>230.897.186.721,59</i>	-	<i>2.654.807.804.179,69</i>
<b>ASET TETAP</b>	<b>5.801.431.419.264,08</b>	<b>1.327.344.730.263,66</b>	<b>1.258.399.216.916,28</b>	<b>5.887.475.511.619,67</b>

*Rincian atas Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 termasuk mutasi dari hibah barang yang masuk dan keluar disajikan dalam Lampiran 13.*



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	<b>Per 31 Desember 2023</b>	<b>Per 31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp.)</b>	<b>(Rp.)</b>
<b>5.3.1.3.1. Tanah</b>	<b>2.844.215.914.592,00</b>	<b>2.838.651.823.505,00</b>
Dibandingkan nilai Tanah per 31 Desember 2022, untuk nilai Tanah per 31 Desember 2023 terdapat perubahan dengan rincian sebagai berikut :		
Penambahan nilai Tanah sebesar Rp.9.412.373.174,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :		
Hibah/Fasum		5.390.065.000,00
Koreksi Atas Kesalahan Pencatatan		1.675.560.000,00
Reklasifikasi/ (BERTAMBAH)		366.874.087,00
Mutasi		<u>1.979.874.087,00</u>
		<b>9.412.373.174,00</b>
Pengurangan nilai Tanah sebesar Rp.3.848.282.087,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :		
Reklasifikasi Menjadi Aset Lainnya (TGR, Kerjasama Dengan Pihak Ketiga, Sudah Diusulkan Penghapusan)		153.848.000,00
Koreksi Atas Kesalahan Pencatatan (Berkurang)		1.714.560.000,00
Mutasi		<u>1.979.874.087,00</u>
		<b>3.848.282.087,00</b>
Dari nilai Tanah tersebut, terdapat empat bidang tanah yang sedang dimitrakan dengan pihak ketiga, yaitu :		
1. Pembangunan renovasi Pasar Baru Panjang oleh PT Halita Prima Jaya Utama,		
2. Pembangunan gedung parkir dan prasarana pendukung lainnya di Pasar Bambu Kuning Plaza oleh PT Senjaya Rezeki Mas,		
3. Pembangunan kembali kios/los amparan bagian belakang Pasar Tugu Tanjung Agung Tanjung Karang Timur oleh PT Prabu Makmur, dan		
4. Pembangunan Rumah Toko (Ruko) Jalan Ikan Bawal dan Jalan Ikan Simba Teluk Betung Selatan oleh PT Satria Sukarso Waway.		
<b>5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin</b>	<b>625.622.807.601,36</b>	<b>581.391.483.219,92</b>
Terdiri atas :		
a. Alat-Alat Besar	17.199.791.110,00	21.616.976.110,00
b. Alat-Alat Angkutan	169.623.629.090,00	165.517.545.967,00
c. Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.958.018.342,00	7.818.658.542,00
d. Alat-Alat Pertanian	2.590.932.000,00	2.559.401.000,00
e. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	151.092.948.841,13	144.504.879.312,61
f. Alat-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	12.231.896.440,40	11.410.867.075,40
g. Alat-Alat Kedokteran dan Kesehatan	142.052.425.943,78	112.154.948.676,08
h. Alat-Alat Laboratorium	34.242.096.614,93	33.879.070.452,37
i. Alat-Alat Keamanan/Persenjataan	1.263.349.500,00	1.093.779.500,00
j. Komputer	83.548.270.396,68	77.378.680.316,02



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	<b>Per 31 Desember 2023</b>	<b>Per 31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp.)</b>	<b>(Rp.)</b>
k. Alat Keselamatan Kerja	149.089.800,00	122.729.000,00
l. Rambu-Rambu	2.441.261.463,44	2.243.261.463,44
m. Peralatan Olahraga	1.229.098.059,00	1.090.685.805,00

Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) saat ini seluruhnya telah disimpan oleh Bidang Aset BPKAD Kota Bandar Lampung.

Dibandingkan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022, untuk nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 terdapat perubahan dengan rincian sebagai berikut :

Penambahan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp.95.460.013.546,02 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Belanja Modal Tahun 2023	40.192.323.718,00
Hutang Belanja Modal Tahun 2023	11.054.424.903,00
Belanja Pemeliharaan 2023	24.034.860,00
Dana BOS	9.598.530.162,00
Dana BLUD	4.616.078.835,02
Hibah	8.208.581.154,00
Reklasifikasi	316.190.984,00
Mutasi dari OPD Lain	<u>21.449.848.930,00</u>
	<b>95.460.013.546,02</b>

Pengurangan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp.51.228.689.164,58 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ekstracountabel	4.748.299.462,80
Tidak Menjadi Aset Tetap Karena Kesalahan Penganggaran	141.390.074,50
STS (Pengembalian Belanja Ke Kas Daerah), LHP BPK, Pengurangan Volume Pekerjaan	75.904.021,34
Penghapusan	18.030.437.511,94
Reklas ke Aset Lainnya	5.000.388.025,00
Hibah	1.308.521.139,00
Persediaan	34.900.000,00
Koreksi Kesalahan Pencatatan	328.220.000,00
Reklas	110.830.000,00
Mutasi ke OPD Lain	<u>21.449.848.930,00</u>
	<b>51.228.689.164,58</b>



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Per 31 Desember 2023**      **Per 31 Desember 2022**

**(Rp.)**

**(Rp.)**

**RINCIAN PERALATAN DAN MESIN**

NAMA BIDANG BARANG	SALDO AWAL	JUMLAH		SALDO 31 DESEMBER 2023
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
Alat Besar	21.616.976.110,00	228.285.000,00	4.645.470.000,00	17.199.791.110,00
Alat Angkutan	165.517.545.967,00	36.090.754.840,00	31.984.671.717,00	169.623.629.090,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.818.658.542,00	161.061.800,00	21.702.000,00	7.958.018.342,00
Alat Pertanian	2.559.401.000,00	49.575.000,00	18.044.000,00	2.590.932.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	144.504.879.312,61	14.882.132.597,74	8.294.063.069,22	151.092.948.841,13
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	11.410.867.075,40	1.259.582.315,00	438.552.950,00	12.231.896.440,40
Alat Kedokteran dan Kesehatan	112.154.948.676,08	32.783.832.027,50	2.886.354.759,80	142.052.425.943,78
Alat Laboratorium	33.879.070.452,37	743.281.691,50	380.255.528,94	34.242.096.614,93
Alat Persenjataan	1.093.779.500,00	184.729.000,00	15.159.000,00	1.263.349.500,00
Komputer	77.378.680.316,02	8.668.996.220,28	2.499.406.139,62	83.548.270.396,68
Alat Eksplorasi	-	-	-	-
Alat Pengeboran	-	-	-	-
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	-	-	-
Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
Alat Keselamatan Kerja	122.729.000,00	34.810.800,00	8.450.000,00	149.089.800,00
Alat Peraga	-	34.680.000,00	34.680.000,00	-
Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-
Rambu-Rambu	2.243.261.463,44	198.000.000,00	-	2.441.261.463,44
Peralatan Olahraga	1.090.685.805,00	140.292.254,00	1.880.000,00	1.229.098.059,00
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>581.391.483.219,92</b>	<b>95.460.013.546,02</b>	<b>51.228.689.164,58</b>	<b>625.622.807.601,36</b>
<i>Penyusutan</i>	<i>473.922.146.780,31</i>	<i>47.117.627.027,67</i>	-	<i>473.922.146.780,31</i>
<b>Aset Tetap</b>	<b>107.469.336.439,61</b>	<b>48.342.386.518,35</b>	<b>51.228.689.164,58</b>	<b>151.700.660.821,05</b>

<b>5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>1.650.945.530.585,21</b>	<b>1.550.560.275.426,32</b>
Terdiri atas :		
a. Bangunan Gedung	1.620.438.052.727,84	1.520.159.620.543,03
b. Bangunan Monumen	1.326.146.758,61	2.005.367.090,61
c. Bangunan Menara	445.506.000,00	445.506.000,00
d. Tugu Titik Kontrol/Pasti	28.735.825.098,76	27.949.781.792,68



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Per 31 Desember 2023**      **Per 31 Desember 2022**  
**(Rp.)**                                      **(Rp.)**

Dibandingkan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022, untuk nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 terdapat perubahan dengan rincian sebagai berikut :

Penambahan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp.234.670.506.662,74 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Belanja Modal Tahun 2023	20.053.904.890,00
Hutang Belanja Modal Tahun 2023	21.666.570.110,00
Realisasi Pemeliharaan	4.186.123.233,00
Hutang Pemeliharaan Tahun 2023	1.923.725.725,00
Konsultan Perencanaan	946.798.517,84
Hutang Konsultan Perencanaan Tahun 2023	179.552.750,00
Konsultan Pengawasan	71.847.027,72
Hutang Konsultan Pengawasan Tahun 2023	1.434.077.752,00
BLUD	862.352.736,00
Hibah	12.000.000,00
Aset Tetap Yang Belum Tercatat	43.564.509.280,00
Koreksi	3.313.704.943,61
Aset Tetap Dari KDP	10.613.310.948,14
Mutasi Dari OPD Lain	<u>125.842.028.749,43</u>
	<b>234.670.506.662,74</b>

Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp.134.285.251.503,85 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ekstracountabel	99.877.068,00
Tidak Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran, Dihilangkan, BHP)	0,00
STS Pengembalian	417.584.558,45
Penghapusan	3.817.336.491,74
Hibah ke Pihak Ketiga	2.491.797.338,23
Koreksi	1.196.029.854,00
Reklas	420.597.444,00
Mutasi ke OPD Lain	<u>125.842.028.749,43</u>
	<b>134.285.251.503,85</b>



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Per 31 Desember 2023**      **Per 31 Desember 2022**  
**(Rp.)**                                      **(Rp.)**

**RINCIAN GEDUNG DAN BANGUNAN**

NAMA BIDANG BARANG	SALDO AWAL	JUMLAH		SALDO 31 DESEMBER 2023
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
Bangunan Gedung	1.520.159.620.543,03	232.353.966.595,66	132.075.534.410,85	1.620.438.052.727,84
Bangunan Monumen	2.005.367.090,61	907.343.572,00	1.586.563.904,00	1.326.146.758,61
Bangunan Menara	445.506.000,00	-	-	445.506.000,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	27.949.781.792,68	1.409.196.495,08	623.153.189,00	28.735.825.098,76
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>1.550.560.275.426,32</b>	<b>234.670.506.662,74</b>	<b>134.285.251.503,85</b>	<b>1.650.945.530.585,21</b>
<i>Penyusutan</i>	<i>343.479.011.297,12</i>	<i>40.833.509.130,07</i>	-	<i>343.479.011.297,12</i>
<b>Aset Tetap</b>	<b>1.207.081.264.129,20</b>	<b>193.836.997.532,67</b>	<b>134.285.251.503,85</b>	<b>1.307.466.519.288,09</b>

<b>5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>3.164.167.371.120,77</b>	<b>3.040.580.766.068,67</b>
Terdiri atas :		
a. Jalan dan Jembatan	2.723.467.670.967,99	2.598.524.914.877,55
b. Bangunan Air/Irigasi	375.429.719.281,76	369.089.076.915,72
c. Instalasi	22.678.902.813,00	31.801.127.573,00
d. Jaringan	42.591.078.058,02	41.165.646.702,40

Dibandingkan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022, untuk nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 terdapat perubahan dengan rincian sebagai berikut :

Penambahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.1.137.886.291.295,04 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Belanja Modal Tahun 2023	92.169.758.510,00
Hutang Belanja Modal Tahun 2023	28.919.853.890,00
Hutang Pemeliharaan Tahun 2023	0,00
Konsultan Perencanaan	2.866.987.409,03
Hutang Konsultan Perencanaan Tahun 2023	444.380.309,39
Konsultan Pengawasan	394.338.000,00
Hutang Konsultan Pengawasan Tahun 2023	3.096.397.340,08
BOS	27.000.000,00
BLUD	71.394.900,00
Koreksi Atas Kesalahan Pencatatan (BERTAMBAH)	985.085.930.549,95
Aset Tetap dari KDP	5.501.259.193,50
Reklasifikasi/ (BERTAMBAH)	76.150.000,00
Mutasi Dari OPD Lain	<u>19.232.841.193,08</u>
	<b>1.137.886.291.295,04</b>





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Per 31 Desember 2023**      **Per 31 Desember 2022**  
**(Rp.)**                                      **(Rp.)**

Pengurangan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.1.014.299.686.242,93 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hibah	9.402.289.259,33
Koreksi Atas Kesalahan Pencatatan (Berkurang)	985.664.555.790,52
Reklasifikasi (BERKURANG)	0,00
Mutasi ke OPD Lain	<u>19.232.841.193,08</u>
	<b>1.014.299.686.242,93</b>

**RINCIAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**

NAMA BIDANG BARANG	SALDO AWAL	JUMLAH		SALDO 31 DESEMBER 2023
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
Jalan dan Jembatan	2.598.524.914.877,55	1.069.748.695.699,41	944.805.939.608,97	2.723.467.670.967,99
Bangunan Air/Irigasi	369.089.076.915,72	58.726.797.840,01	52.386.155.473,97	375.429.719.281,76
Instalasi	31.801.127.573,00	373.359.400,00	9.495.584.160,00	22.678.902.813,00
Jaringan	41.165.646.702,40	9.037.438.355,61	7.612.006.999,99	42.591.078.058,02
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>3.040.580.766.068,67</b>	<b>1.137.886.291.295,04</b>	<b>1.014.299.686.242,93</b>	<b>3.164.167.371.120,77</b>
<i>Penyusutan</i>	<i>1.833.077.937.865,81</i>	<i>142.739.993.545,46</i>	-	<i>1.833.077.937.865,81</i>
<b>Aset Tetap</b>	<b>1.207.502.828.202,86</b>	<b>995.146.297.749,58</b>	<b>1.014.299.686.242,93</b>	<b>1.331.089.433.254,96</b>

<b>5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>153.853.210.909,05</b>	<b>138.868.264.475,05</b>
Terdiri atas :		
a. Bahan Perpustakaan	148.618.483.699,00	134.141.116.265,00
b. Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	4.901.755.460,05	4.394.176.460,05
c. Tanaman	332.971.750,00	332.971.750,00

Dibandingkan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022, untuk nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 terdapat perubahan dengan rincian sebagai berikut :

Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.14.998.682.434,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Belanja Modal Tahun 2023	296.999.800,00
Hutang	158.560.000,00
BOS	<u>14.543.122.634,00</u>
	<b>14.998.682.434,00</b>

Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.13.736.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Reklafikasi Menjadi Aset Lainnya (TGR, Kerjasama	11.736.000,00
--	---------------









**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Per 31 Desember 2023 (Rp.)	Per 31 Desember 2022 (Rp.)
<b>5.3.1.4. ASET LAINNYA</b>	<b>40.347.864.303,09</b>	<b>27.245.313.400,09</b>
Terdiri atas :		
a. Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
b. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga/Kerjasama Pemanfaatan	12.857.132.774,09	12.857.132.774,09
Dari nilai tersebut, terdapat kemitraan dengan pihak ketiga yang masih dalam masa konsesi, antara lain yaitu :		
1. Pembangunan Renovasi Pasar Baru Panjang dengan PT. Halita Primajaya Utama Nomor kontrak 54/SK/HPJU/V/2009, Nilai Kontrak 11.741.260.000,00 masa konsesi sampai dengan 12 Juni 2029.		
2. Gedung parkir dan prasarana pendukung lainnya pasar bambu kuning plaza oleh PT Senjaya Nomor kontrak 029/SRM/DIR/X/2012, Nilai Kontrak 29.200.000.000,00 masa konsesi sampai dengan 8 Agustus 2032.		
3. Pembangunan kembali kios/los hampan bagian belakang pasar tugu PT Prabu Makmur Nomor Kontrak: 01.1/PK/HK/2013 , Nilai Kontrak 14.473.636.000,00 masa konsesi sampai dengan 25 Februari 2033.		
4. Pembangunan ruko jalan ikan bawal, jalan ikan simba teluk betung selatan oleh PT Satria Sukarso Waway Nomor kontrak 18.1/PK/HK/2015 Nilai Kontrak 15.424.693.000,00, masa konsesi sampai dengan 19 September 2039.		
5. Sedangkan untuk asset dan Bangunan Basement Yunna Hotel, terdapat Kerjasama Sewa Menyewa Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Lahan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Nomor 01/ Teluk Betung dengan PT. Niaga Mitra Nusaraharja, Nomor 07.1/PK/HK/2014, tgl 20 Februari 2014 Masa Konsensi selama Jangka Hak Guna Bangunan. Sedangkan dokumen yang terkait dengan perjanjian kerjasama pembangunannya belum ditemukan.		
c. Aset Tidak Berwujud	860.621.000,00	848.885.000,00
d. Aset Lain-Lain	27.418.100.029,00	13.539.295.626,00
Dari nilai tersebut, terdapat delapan unit kendaraan bermotor yang dicatat dengan nilai Rp.1,00. Kendaraan tersebut merupakan aset yang diperoleh dari hibah pihak ketiga namun belum dilengkapi dengan dokumen hibah sehingga nilai perolehannya tidak diketahui.		
e. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(787.989.500,00)	0,00
<b>Rincian atas Aset Lainnya disajikan dalam Lampiran 16.</b>		
<b>5.3.2. KEWAJIBAN</b>	<b>447.557.467.769,21</b>	<b>517.082.912.544,03</b>
<b>5.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>336.732.247.971,06</b>	<b>369.315.948.873,88</b>
<b>5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</b>	<b>1.729.280.788,00</b>	<b>33.603.471,00</b>
Merupakan utang PFK yang berasal dari Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar 4% untuk		



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Per 31 Desember 2023**      **Per 31 Desember 2022**  
**(Rp.)**                                      **(Rp.)**

Bulan Desember 2023. Adapun untuk T.A. 2022, Utang PFK sebesar Rp.33.603.471,00 adalah Utang PFK yang terdapat pada Dinas Pertanian sebesar Rp.5.214.137,00 yang berupa pembayaran Tambahan Penghasilan ASN Bulan Juli 2022 namun terdapat beberapa ASN yang terpaksa harus dibayarkan secara tunai atau tidak *payroll* melalui Bank Lampung, telah dibayarkan kepada yang bersangkutan pada Tanggal 03 Januari 2023 dan pada Sekretariat Dewan sebesar Rp.28.389.334,00 yang berupa pencairan SP2D akan tetapi belum diserahkan kepada yang bersangkutan, telah dibayarkan kepada yang bersangkutan pada Tanggal 02 Januari 2023 dengan rincian sebesar Rp.21.320.474,00 merupakan Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan sebesar Rp.7.068.860,00 merupakan Tambahan Penghasilan ASN.

**5.3.2.1.2. Utang Bunga**                                      **139.393.502,40**                                      **139.393.502,40**

Merupakan Utang Bunga Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) PT Sarana Multi Infrastuktur (SMI) Persero Kementerian Keuangan RI berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor PERJ-220/SMI/1221 Tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.147.766.963.670,15 yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dampak pandemi Covid-19 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.22.644.957.000,00 dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.125.122.006.670,15. Adapun yang menjadi beban bunga pada T.A. 2023 merupakan beban bunga normal sebesar Rp.720.199.763,00 *cutt off* per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp.139.393.502,40.

*Rincian atas Perhitungan Utang Bunga disajikan dalam Lampiran 17.*

**5.3.2.1.3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**                                      **36.941.743.872,00**                                      **0,00**

Merupakan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang atau pokok pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastuktur (SMI) Persero Kementerian Keuangan RI berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor PERJ-220/SMI/1221 Tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.147.766.963.670,15 yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dampak pandemi Covid-19 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.22.644.957.000,00 dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.125.122.006.670,15. Terdapat masa tenggang (*grace period*) selama 24 (*dua puluh empat*) bulan sejak tanggal pencairan pertama. Sehingga pokok pinjaman daerah baru akan mulai diangsur pada Bulan Mei 2024. Terdapat kewajiban untuk membayar cicilan pokok pinjaman daerah tersebut untuk T.A. 2024 sebesar Rp.36.941.743.872,00.

*Rincian atas Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan dalam Lampiran 18.*

**5.3.2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka**                                      **12.599.556.067,00**                                      **11.456.588.502,00**

Merupakan Pendapatan Diterima Dimuka dari Pajak Reklame yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sampai dengan 31 Desember 2023 tetapi belum jatuh tempo sehingga belum diakui sebagai Pendapatan tetapi masih sebagai Pendapatan Diterima



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Per 31 Desember 2023 (Rp.)	Per 31 Desember 2022 (Rp.)
Dimuka, yaitu pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) sebesar Rp.12.599.556.067,00.		
<i><b>Rincian atas Pendapatan Diterima Dimuka disajikan dalam Lampiran 19.</b></i>		
<b>5.3.2.1.5. Utang Belanja</b>	<b>285.322.273.741,66</b>	<b>357.686.363.398,48</b>
Merupakan Kewajiban Pemerintah Kota Bandar Lampung yang tertuang dalam Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 286/IV.02/HK/2024 Tanggal 09 Januari 2024 tentang Penetapan Kewajiban Terhadap Kegiatan yang Tidak Terbayar Pada APBD Tahun Anggaran 2023 dan Sisa Kewajiban Terhadap Kegiatan yang Tidak Terbayar Pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.250.572.308.451,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Rekapitulasi belanja kegiatan T.A. 2022 yang akan dibayarkan pada T.A. 2024		21.298.300.101,00
b. Rekapitulasi belanja kegiatan T.A. 2023 yang akan dibayarkan pada T.A. 2024		229.274.008.350,00
Dan kewajiban lainnya yang tidak tertuang dalam Keputusan Wali Kota Bandar Lampung tersebut sebesar Rp.55.593.807.264,86.		
Dari Utang Belanja yang tertuang dalam Keputusan Wali Kota Bandar Lampung tersebut, terdapat eliminasi Utang Jamkeskot senilai Rp.19.734.157.700,00 yang terdiri dari Utang Jamkeskot pada Puskesmas sebesar Rp.3.004.002.700,00 dan Utang Jamkeskot pada RSUD A. Dadi Tjokrodipo sebesar Rp.16.730.155.000,00 karena sebenarnya merupakan Piutang BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD A. Dadi Tjokrodipo. Selanjutnya sesuai hasil audit, terdapat juga koreksi pengurangan Utang Belanja Modal sebesar Rp.798.084.274,20 sehingga jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.285.322.273.741,66.		
<i><b>Rincian atas Utang Belanja disajikan dalam Lampiran 20.</b></i>		
<b>5.3.2.1.6. Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>110.825.219.798,15</b>	<b>147.766.963.670,15</b>
<b>5.3.2.2.1. UTANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>110.825.219.798,15</b>	<b>147.766.963.670,15</b>
Utang Dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	<b>110.825.219.798,15</b>	147.766.963.670,15
Merupakan Pinjaman dari Pemerintah Pusat melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero Kementerian Keuangan RI berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor PERJ-220/SMI/1221 Tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.147.766.963.670,15 yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dampak pandemi Covid-19 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.22.644.957.000,00 dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.125.122.006.670,15. Sebagian dari pinjaman tersebut disisihkan menjadi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp.36.941.743.872,00.		



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

	<b>Per 31 Desember 2023</b>	<b>Per 31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp.)</b>	<b>(Rp.)</b>
yang merupakan cicilan pokok pinjaman daerah untuk dibayar atau jatuh tempo pada T.A. 2024.		
<i>Rincian atas Utang Jangka Panjang Kepada Pemerintah Pusat disajikan dalam Lampiran 21.</i>		
<b>5.3.3. EKUITAS</b>	<b>6.140.501.839,683,14</b>	<b>5.882.911.016.596,15</b>



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>		
<b>5.4.1. PENDAPATAN</b>	<b>2.401.033.672.548,58</b>	<b>2.215.191.204.710,91</b>
Pendapatan Operasional Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>5.4.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO</b>	<b>737.995.134.552,58</b>	<b>663.461.015.004,91</b>
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>5.4.1.1.1. PAJAK DAERAH - LO</b>	<b>576.615.019.202,49</b>	<b>529.862.011.926,36</b>
Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>A. Pajak Hotel - LO</b>	<b>40.667.274.141,00</b>	<b>36.237.795.754,00</b>
Pajak Hotel Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Pajak Hotel - LO	40.667.274.141,00	36.237.795.754,00
- Pajak Hotel - LO	40.667.274.141,00	36.237.795.754,00
<b>B. Pajak Restoran - LO</b>	<b>116.919.048.477,00</b>	<b>101.373.431.587,00</b>
Pajak Restoran Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Pajak Restoran dan Sejenisnya - LO	116.919.048.477,00	101.373.431.587,00
- Pajak Restoran dan Sejenisnya - LO	116.919.048.477,00	101.373.431.587,00
<b>C. Pajak Hiburan - LO</b>	<b>24.666.835.222,00</b>	<b>20.341.386.428,00</b>
Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Pajak Tontonan Film - LO	13.370.783.435,00	11.245.825.550,00
- Pajak Tontonan Film - LO	13.370.783.435,00	11.245.825.550,00
b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	95.968.750,00	111.785.325,00
- Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	95.968.750,00	111.785.325,00
c. Pajak Pameran - LO	167.000,00	0,00
- Pajak Pameran - LO	167.000,00	0,00
d. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya - LO	1.112.156.938,00	540.296.526,00
- Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya - LO	1.112.156.938,00	540.296.526,00
e. Pajak Permainan Biliar dan Bowling - LO	216.536.436,00	147.431.105,00
- Pajak Permainan Biliar dan Bowling - LO	216.536.436,00	147.431.105,00
f. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan - LO	8.857.053.950,00	7.366.883.467,00
- Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan - LO	8.857.053.950,00	7.366.883.467,00
g. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LO	1.014.168.713,00	929.164.455,00
- Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LO	1.014.168.713,00	929.164.455,00
<b>D. Pajak Reklame - LO</b>	<b>29.506.246.455,11</b>	<b>30.056.375.199,40</b>
Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	29.506.246.455,11	30.056.375.199,40



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
- Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	29.506.246.455,11	30.056.375.199,40
<b>E. Pajak Penerangan Jalan - LO</b>	<b>127.887.253.845,00</b>	<b>117.411.221.038,00</b>
Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO	127.887.253.845,00	0,00
- Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO	127.887.253.845,00	0,00
b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LO	0,00	117.411.221.038,00
- Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LO	0,00	117.411.221.038,00
<b>F. Pajak Parkir - LO</b>	<b>10.191.056.540,00</b>	<b>8.410.627.481,00</b>
Pajak Parkir Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Pajak Parkir - LO	10.191.056.540,00	8.410.627.481,00
- Pajak Parkir - LO	10.191.056.540,00	8.410.627.481,00
<b>G. Pajak Air Tanah - LO</b>	<b>3.892.116.047,88</b>	<b>3.093.713.030,00</b>
Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Pajak Air Tanah - LO	3.892.116.047,88	3.093.713.030,00
- Pajak Air Tanah - LO	3.892.116.047,88	3.093.713.030,00
<b>H. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO</b>	<b>195.127.683,00</b>	<b>173.641.020,00</b>
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya - LO	195.127.683,00	173.641.020,00
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya - LO	195.127.683,00	173.641.020,00
<b>I. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO</b>	<b>115.133.007.225,00</b>	<b>113.552.963.669,96</b>
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. PBBP2 - LO	115.133.007.225,00	113.552.963.669,96
- PBBP2 - LO	115.133.007.225,00	113.552.963.669,96
<b>J. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO</b>	<b>107.557.053.566,50</b>	<b>99.210.856.719,00</b>
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. BPHTB-Pemindahan Hak - LO	107.557.053.566,50	0,00
- BPHTB-Pemindahan Hak - LO	107.557.053.566,50	0,00
b. BPHTB-Pemberian Hak Baru - LO	0,00	99.210.856.719,00
- BPHTB-Pemberian Hak Baru - LO	0,00	99.210.856.719,00
<b>5.4.1.1.2. RETRIBUSI DAERAH - LO</b>	<b>32.788.619.134,00</b>	<b>22.086.812.993,75</b>
Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>A. Retribusi Jasa Umum - LO</b>	<b>17.435.662.800,00</b>	<b>14.891.376.320,00</b>
Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	13.401.415.300,00	10.959.772.500,00
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	13.401.415.300,00	10.959.772.500,00
b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	591.525.000,00	558.807.000,00
- Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	591.525.000,00	558.807.000,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	2.134.217.500,00	2.042.962.300,00
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	2.134.217.500,00	2.042.962.300,00
d. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	476.767.500,00	468.347.000,00
- Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO	476.767.500,00	468.347.000,00
e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	89.641.500,00	61.730.500,00
- Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LO	89.641.500,00	61.730.500,00
f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	742.096.000,00	799.757.020,00
- Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	742.096.000,00	799.757.020,00
<b>B. Retribusi Jasa Usaha - LO</b>	<b>4.619.953.050,00</b>	<b>4.059.391.643,00</b>
Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	2.501.358.390,00	1.739.648.240,00
- Retribusi Penyewaan Bangunan - LO	2.400.033.390,00	1.640.448.240,00
- Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor - LO	0,00	99.200.000,00
- Retribusi Pemakaian Alat - LO	101.325.000,00	0,00
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO	1.234.518.000,00	1.361.484.000,00
- Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO	1.234.518.000,00	1.361.484.000,00
c. Retribusi Tempat Pelelangan - LO	278.470.660,00	299.668.403,00
- Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan - LO	79.470.660,00	79.382.688,00
- Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan - LO	199.000.000,00	220.285.715,00
d. Retribusi Terminal - LO	523.264.000,00	538.236.000,00
- Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO	523.264.000,00	538.236.000,00
e. Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	82.342.000,00	120.355.000,00
- Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan - LO	82.342.000,00	120.355.000,00
<b>C. Retribusi Perizinan Tertentu - LO</b>	<b>10.733.003.284,00</b>	<b>3.136.045.030,75</b>
Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO	10.733.003.284,00	3.136.045.030,75
- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO	10.733.003.284,00	3.136.045.030,75
<b>5.4.1.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LO</b>	<b>10.992.622.387,69</b>	<b>18.755.515.344,37</b>
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>A. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO</b>	<b>10.992.622.387,69</b>	<b>18.755.515.344,37</b>
a. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Lembaga Keuangan) - LO	10.992.622.387,69	18.755.515.344,37
Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Lembaga Keuangan) Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
- Perusahaan Daerah - PT Bank Waway Lampung	6.538.078.165,75	9.017.756.862,87
- BUMD - PDAM Way Rilau	0,00	0,00
- Lembaga Keuangan Bank - PT BPD Lampung	588.567.451,08	6.629.150.970,00
- PT BPR Syariah Bandar Lampung	3.865.976.770,86	3.108.607.511,50
- PD Pasar Tapis Berseri	0,00	0,00
- PD Kebersihan Tapis Berseri	0,00	0,00

Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp.10.992.622.387,69 adalah terdiri dari : pada Perusahaan Daerah PT Bank Waway Lampung sebesar Rp.6.538.078.165,75 dan pada PT BPR Syariah Bandar Lampung sebesar Rp.3.865.976.770,86 adalah merupakan pengaruh atas laba rugi Perusahaan Daerah (PT Bank Waway Lampung) dan PT BPR Syariah Bandar Lampung berdasarkan persentase kepemilikan, dimana investasi permanen pada Perusahaan Daerah (PT Bank Waway Lampung) dan PT BPR Syariah Bandar Lampung disajikan dengan metode ekuitas (*equity method*). Sementara itu, pada Lembaga Keuangan Bank (PT BPD Lampung) sebesar Rp.588.567.451,08 adalah merupakan koreksi tambah deviden yang diterima oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dari PT BPD Lampung untuk T.A. 2022, dimana investasi permanen pada Lembaga Keuangan Bank (PT BPD Lampung) disajikan dengan metode biaya (*cost method*).

### 5.4.1.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG SAH - LO 117.598.873.828,40 92.756.674.740,43

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :

#### A. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO 1.221.281.005,00 110.301.941,00

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :

a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO	1.221.281.005,00	110.301.941,00
- Hasil Penjualan Alat Angkutan - LO	1.122.059.672,00	0,00
- Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga - LO	99.221.333,00	110.301.941,00

#### B. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO 0,00 0,00

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :

a. Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - LO	0,00	0,00
- Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - LO	0,00	0,00

#### C. Jasa Giro - LO 736.437.658,38 1.701.093.435,11

Jasa Giro Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :

a. Jasa Giro pada Kas Daerah - LO	736.437.658,38	1.701.093.435,11
- Jasa Giro pada Kas Daerah - LO	736.437.658,38	1.701.093.435,11

#### D. Pendapatan Bunga - LO 1.755.636,00 282.038,00

Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	1.755.636,00	282.038,00
- Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	1.755.636,00	282.038,00

#### E. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO 0,00 117.775.000,00

Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :

a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - LO	0,00	117.775.000,00
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai	0,00	117.775.000,00





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - LO		
<b>F. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO</b>	<b>14.896.940.031,46</b>	<b>10.003.162.405,47</b>
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	14.896.940.031,46	10.003.162.405,47
- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	14.896.940.031,46	10.003.162.405,47
<b>G. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO</b>	<b>154.720.740,71</b>	<b>41.005.416,25</b>
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	154.720.740,71	41.005.416,25
- Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	154.720.740,71	41.005.416,25
<b>H. Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO</b>	<b>2.397.037.297,72</b>	<b>2.762.311.023,19</b>
Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	91.445.553,00	303.559.002,00
- Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	91.445.553,00	303.559.002,00
b. Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	1.139.479.971,10	1.444.422.292,00
- Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya - LO	1.139.479.971,10	1.444.422.292,00
c. Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	262.548.199,30	38.617.994,00
- Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film - LO	214.873.465,00	0,00
- Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya - LO	34.591.079,00	7.963.758,00
- Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling - LO	4.464.032,00	13.538.891,00
- Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan - LO	3.860.958,00	1.119.033,00
- Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LO	4.758.665,30	15.996.312,00
d. Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	363.809.993,32	592.752.371,19
- Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	363.545.069,32	592.752.371,19
- Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan - LO	205.875,00	0,00
- Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide - LO	59.049,00	0,00
e. Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	47.855.106,00	39.390.749,00
- Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	47.855.106,00	39.390.749,00
f. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	364.275.280,00	187.936.534,00
- Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	364.275.280,00	187.936.534,00
g. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	10.051.206,00	4.301.570,00
- Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya - LO	10.051.206,00	4.301.570,00
h. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO	117.571.989,00	151.330.511,00
- Pendapatan Denda PBBP2 - LO	117.571.989,00	151.330.511,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
<b>I. Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO</b>	<b>149.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha - LO	149.700.000,00	0,00
- Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	149.700.000,00	0,00
<b>J. Pendapatan dari BLUD - LO</b>	<b>98.041.001.459,13</b>	<b>74.025.593.481,41</b>
Pendapatan dari BLUD Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Pendapatan dari BLUD - LO	98.041.001.459,13	74.025.593.481,41
- Pendapatan dari BLUD - LO	98.041.001.459,13	74.025.593.481,41
<b>K. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995.150.000,00</b>
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Pendapatan Denda Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD - LO	0,00	3.995.150.000,00
- Pendapatan Denda Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD - LO	0,00	3.995.150.000,00
<b>5.4.1.2. PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>1.649.217.599.260,00</b>	<b>1.550.992.385.126,00</b>
Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>5.4.1.2.1. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LO</b>	<b>1.489.506.851.116,00</b>	<b>1.404.376.430.946,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>A. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO</b>	<b>1.484.026.599.116,00</b>	<b>1.395.584.755.946,00</b>
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	81.995.017.425,00	79.889.760.987,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
- DBH PBB - LO	2.107.658.000,00	7.506.042.793,00
- DBH PPh Pasal 21 - LO	0,00	54.715.331.921,00
- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND - LO	63.644.371.000,00	0,00
- DBH CHT - LO	376.198.425,00	353.161.919,00
- DBH SDA Minyak Bumi - LO	7.511.103.000,00	10.350.835.298,00
- DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi - LO	1.836.938.000,00	3.775.602.230,00
- DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty - LO	916.000,00	912.284.462,00
- DBH SDA Kehutanan-PSDH - LO	5.246.030.000,00	106.438.153,00
- DBH SDA Perikanan - LO	1.271.803.000,00	2.170.064.211,00
b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	1.064.924.059.102,00	994.485.941.727,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
- DAU - LO	1.064.924.059.102,00	994.485.941.727,00
c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	39.502.740.170,00	41.810.272.846,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD - LO	0,00	776.332.400,00
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD - LO	3.786.308.500,00	4.455.961.700,00
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP - LO	2.039.140.000,00	11.189.899.600,00
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah - LO	0,00	260.330.000,00





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar - LO	0,00	110.021.000,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian - LO	0,00	5.535.127.130,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB - LO	0,00	1.041.051.400,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi - LO	0,00	3.012.676.436,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB - LO	184.800.000,00	973.747.080,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) - LO	0,00	2.130.060.000,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit - LO	802.935.000,00	0,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan - LO	32.689.556.670,00	0,00
- DAK Bidang Infrastruktur Jalan Reguler-Jalan - LO	0,00	3.709.493.300,00
- DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler - LO	0,00	4.269.240.800,00
- DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler - LO	0,00	4.346.332.000,00
d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO	297.604.782.419,00	279.398.780.386,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
- DAK Non Fisik-BOS Reguler - LO	124.199.200.000,00	124.414.550.712,00
- DAK Non Fisik-BOS Kinerja - LO	2.895.000.000,00	60.000.000,00
- DAK Non Fisik-TPG PNSD - LO	120.332.335.000,00	113.180.239.857,00
- DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD - LO	1.266.418.538,00	3.253.250.000,00
- DAK Non Fisik-BOP PAUD - LO	13.318.874.366,00	10.908.588.000,00
- DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan - LO	5.009.300.000,00	4.537.100.000,00
- DAK Non Fisik-BOKKB-BOK - LO	24.954.125.315,00	20.004.710.300,00
- DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB - LO	0,00	2.127.167.817,00
- DAK Non Fisik-PK2UKM - LO	389.358.000,00	383.841.500,00
- DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal - LO	133.782.000,00	296.159.200,00
- DAK Non Fisik-BOKB-KB - LO	4.528.249.200,00	0,00
- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - LO	403.715.000,00	222.523.000,00
- DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian - LO	174.425.000,00	10.650.000,00
<b>B. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah (DID) - LO</b>	<b>5.480.252.000,00</b>	<b>8.791.675.000,00</b>
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Dana Insentif Daerah (DID) - LO	5.480.252.000,00	8.791.675.000,00
- Dana Insentif Daerah (DID) - LO	5.480.252.000,00	8.791.675.000,00
<b>5.4.1.2.2. PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - LO</b>	<b>159.710.748.144,00</b>	<b>146.615.954.180,00</b>
Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>A. Pendapatan Bagi Hasil - LO</b>	<b>159.710.748.144,00</b>	<b>146.615.954.180,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak-Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - LO	159.710.748.144,00	146.615.954.180,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
- Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	36.456.643.229,00	31.588.718.320,00
- Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	24.049.779.569,00	24.236.309.698,00
- Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	53.268.807.376,00	48.859.463.883,00
- Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan - LO	198.720.725,00	140.906.594,00
- Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	45.736.797.245,00	41.790.555.685,00
<b>5.4.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	<b>13.820.938.736,00</b>	<b>737.804.580,00</b>
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>5.4.1.3.1. PENDAPATAN HIBAH - LO</b>	<b>13.820.938.736,00</b>	<b>737.804.580,00</b>
Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>A. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO</b>	<b>9.489.651.736,00</b>	<b>737.804.580,00</b>
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	9.489.651.736,00	737.804.580,00
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	9.489.651.736,00	737.804.580,00
<b>B. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	12.000.000,00	0,00
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO	12.000.000,00	0,00
<b>C. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri - LO</b>	<b>14.080.000,00</b>	<b>0,00</b>
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri - LO	14.080.000,00	0,00
- Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri - LO	14.080.000,00	0,00
<b>D. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri - LO</b>	<b>4.305.207.000,00</b>	<b>0,00</b>
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - LO	4.305.207.000,00	0,00
- Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - LO	4.305.207.000,00	0,00
<b>5.4.2. BEBAN DAERAH</b>	<b>2.131.705.442.661,53</b>	<b>2.059.683.581.978,41</b>
<b>5.4.2.1. BEBAN OPERASI</b>	<b>2.121.094.942.661,53</b>	<b>2.044.864.189.017,41</b>



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
<b>5.4.2.1.1. BEBAN PEGAWAI</b>	<b>904.676.377.432,93</b>	<b>883.003.326.685,00</b>
Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>A. Beban Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>577.580.300.018,00</b>	<b>554.547.488.193,00</b>
Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Gaji Pokok ASN	440.258.364.510,00	426.544.079.515,00
- Beban Gaji Pokok PNS	383.751.009.310,00	412.472.506.815,00
- Beban Gaji Pokok PPPK	56.507.355.200,00	14.071.572.700,00
b. Beban Tunjangan Keluarga ASN	37.452.068.909,00	35.802.898.851,00
- Beban Tunjangan Keluarga PNS	32.902.147.721,00	34.706.320.313,00
- Beban Tunjangan Keluarga PPPK	4.549.921.188,00	1.096.578.538,00
c. Beban Tunjangan Jabatan ASN	11.176.369.950,00	11.198.880.000,00
- Beban Tunjangan Jabatan PNS	11.176.369.950,00	11.198.880.000,00
d. Beban Tunjangan Fungsional ASN	28.729.627.150,00	24.319.264.068,00
- Beban Tunjangan Fungsional PNS	23.219.833.150,00	24.319.264.068,00
- Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5.509.794.000,00	0,00
e. Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.835.044.350,00	7.195.030.000,00
- Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.485.189.350,00	6.315.635.000,00
- Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	349.855.000,00	879.395.000,00
f. Beban Tunjangan Beras ASN	23.484.008.128,00	22.205.564.306,00
- Beban Tunjangan Beras ASN	19.994.522.848,00	21.346.952.786,00
- Beban Tunjangan Beras PPPK	3.489.485.280,00	858.611.520,00
g. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	493.996.452,00	570.067.721,00
- Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	493.996.452,00	570.067.721,00
h. Beban Pembulatan Gaji ASN	5.713.708,00	5.629.116,00
- Beban Pembulatan Gaji PNS	5.111.748,00	5.439.566,00
- Beban Pembulatan Gaji PPPK	601.960,00	189.550,00
i. Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	26.538.327.802,00	26.706.074.616,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	24.256.372.930,00	25.991.802.496,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.281.954.872,00	714.272.120,00
j. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	901.694.765,00	0,00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	786.092.844,00	0,00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	115.601.921,00	0,00
k. Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.705.084.294,00	0,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.358.278.532,00	0,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	346.805.762,00	0,00
<b>B. Beban Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>83.354.569.574,00</b>	<b>68.230.949.470,00</b>
Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	82.746.949.876,00	68.153.090.372,00
- Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	82.686.457.136,00	68.153.090.372,00
- Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	60.492.740,00	0,00
b. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN	104.110.930,00	0,00
- Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS	104.110.930,00	0,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
c. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	262.426.230,00	0,00
- Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	262.426.230,00	0,00
d. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	241.082.538,00	0,00
- Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	241.082.538,00	0,00
e. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	77.859.098,00
- Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0,00	77.859.098,00
<b>C. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>147.354.467.474,00</b>	<b>155.781.379.487,00</b>
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah	18.537.666.718,00	21.055.433.963,00
- Beban Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Hotel	1.761.028.468,00	1.126.481.320,00
- Beban Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Restoran	5.237.084.507,00	3.623.526.874,00
- Beban Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.052.149.111,00	872.985.629,00
- Beban Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Reklame	1.030.792.758,00	1.592.201.034,00
- Beban Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	4.410.508.674,00	6.144.186.820,00
- Beban Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Parkir	405.740.677,00	263.852.279,00
- Beban Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Air Tanah	140.050.658,00	158.380.239,00
- Beban Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.088.669,00	5.256.644,00
- Beban Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.099.927.793,00	3.698.695.462,00
- Beban Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.393.295.403,00	3.569.867.662,00
b. Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	116.115.975.756,00	123.591.028.024,00
- Beban TPG PNSD	116.115.975.756,00	123.591.028.024,00
c. Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4.627.750.000,00	1.157.975.000,00
- Beban Tamsil Guru PNSD	4.627.750.000,00	1.157.975.000,00
d. Beban Honorarium	7.806.925.000,00	9.976.942.500,00
- Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.118.575.000,00	9.286.242.500,00
- Beban Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	358.600.000,00	363.750.000,00
- Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	329.750.000,00	326.950.000,00
e. Beban Jasa Pengelolaan BMD	266.150.000,00	0,00
- Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	266.150.000,00	0,00





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
<b>D. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD</b>	<b>36.117.485.859,00</b>	<b>34.157.173.498,00</b>
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Uang Representasi DPRD	1.111.110.000,00	1.114.260.000,00
- Beban Uang Representasi DPRD	1.111.110.000,00	1.114.260.000,00
b. Beban Tunjangan Keluarga DPRD	111.197.100,00	105.338.100,00
- Beban Tunjangan Keluarga DPRD	111.197.100,00	105.338.100,00
c. Beban Tunjangan Beras DPRD	128.255.820,00	127.821.300,00
- Beban Tunjangan Beras DPRD	128.255.820,00	127.821.300,00
d. Beban Uang Paket DPRD	95.193.000,00	95.508.000,00
- Beban Uang Paket DPRD	95.193.000,00	95.508.000,00
e. Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.611.109.500,00	1.615.677.000,00
- Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.611.109.500,00	1.615.677.000,00
f. Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	145.520.550,00	144.333.000,00
- Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	145.520.550,00	144.333.000,00
g. Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.790.600.000,00	8.820.000.000,00
- Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.790.600.000,00	8.820.000.000,00
h. Beban Tunjangan Reses DPRD	2.190.300.000,00	2.205.000.000,00
- Beban Tunjangan Reses DPRD	2.190.300.000,00	2.205.000.000,00
i. Beban Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	61.679.353,00	483.406,00
- Beban Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	61.679.353,00	483.406,00
j. Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	12.026.020.536,00	10.737.952.692,00
- Beban Jaminan Kesehatan DPRD	147.720.536,00	12.592.692,00
- Beban Tunjangan Perumahan DPRD	11.878.300.000,00	10.725.360.000,00
k. Beban Tunjangan Transportasi DPRD	9.840.200.000,00	9.190.800.000,00
- Beban Tunjangan Transportasi DPRD	9.840.200.000,00	9.190.800.000,00
l. Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.300.000,00	0,00
- Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.300.000,00	0,00
<b>E. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>	<b>171.883.940,00</b>	<b>165.968.699,00</b>
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00
- Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00
b. Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.636.000,00	6.636.000,00
- Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.636.000,00	6.636.000,00
c. Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00
- Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00
d. Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	6.083.280,00
- Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	6.083.280,00
e. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	364.420,00	367.479,00
- Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	364.420,00	367.479,00
f. Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.840,00	1.940,00





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
- Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.840,00	1.940,00
g. Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.469.120,00	0,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.469.120,00	0,00
h. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	0,00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	0,00
i. Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	0,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian Kerja KDH/WKDH	336.960,00	0,00
<b>F. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</b>	<b>1.393.120.000,00</b>	<b>1.327.620.000,00</b>
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00
- Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00
b. Beban Dana Operasional KDH/WKDH	1.000.000.000,00	934.500.000,00
- Beban Dana Operasional KDH/WKDH	1.000.000.000,00	934.500.000,00
<b>G. Beban Pegawai BOS</b>	<b>28.450.184.633,00</b>	<b>31.985.754.346,00</b>
Beban Pegawai BOS Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Pegawai BOS	28.450.184.633,00	31.985.754.346,00
- Beban Pegawai BOS	28.450.184.633,00	31.985.754.346,00
<b>H. Beban Pegawai BLUD</b>	<b>30.254.365.934,93</b>	<b>36.806.992.992,00</b>
Beban Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Pegawai BLUD	30.254.365.934,93	36.806.992.992,00
- Beban Pegawai BLUD	30.254.365.934,93	36.806.992.992,00
<b>5.4.2.1.2. BEBAN BARANG DAN JASA</b>	<b>870.646.997.259,94</b>	<b>765.309.172.586,48</b>
Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>A. Beban Barang</b>	<b>173.586.096.338,10</b>	<b>183.745.905.641,30</b>
Beban Barang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Barang Pakai Habis	168.826.742.307,30	183.703.080.641,30
- Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	30.331.967.805,00	28.204.834.800,00
- Beban Bahan-Bahan Kimia	2.450.000,00	19.920.000,00
- Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.502.418.294,00	17.776.584.137,00
- Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	358.205.250,00	272.884.620,00
- Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	2.000.000,00
- Beban Bahan-Isi Tabung Gas	109.797.500,00	119.248.500,00
- Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.048.000,00	18.864.000,00
- Beban Bahan-Bahan Lainnya	15.127.063.439,00	9.603.805.844,00
- Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.089.046.990,00	1.423.386.986,00
- Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	298.634.233,00	97.215.800,00
- Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	88.295.000,00	121.654.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.062.118.393,10	3.881.743.045,78
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.793.919.927,50	2.404.274.503,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.884.031.982,44	10.570.623.761,00





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp.)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp.)</b>
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	305.924.500,00	343.620.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.665.459.287,00	3.520.577.090,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.501.510.516,00	1.142.964.832,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.281.899.026,00	3.197.800.168,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	10.091.800,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	9.800.000,00	275.300.021,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cenderamata	1.076.191.400,00	1.391.692.500,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	414.086.500,00	99.772.300,00
- Beban Obat-Obatan-Obat	15.554.658.298,26	5.998.651.142,05
- Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	7.848.619.470,47
- Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	7.949.101.725,00	7.181.134.025,00
- Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	21.572.232.100,00	54.490.219.776,00
- Beban Natura dan Pakan-Natura	414.504.120,00	419.898.000,00
- Beban Natura dan Pakan-Pakan	14.998.000,00	26.950.000,00
- Beban Makanan dan Minuman Rapat	9.154.168.131,00	10.101.925.550,00
- Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.794.791.390,00	6.119.971.870,00
- Beban Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	99.824.800,00	26.185.000,00
- Beban Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	299.130.000,00	1.216.819.500,00
- Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.801.093.500,00	2.492.872.800,00
- Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	171.700.000,00	167.175.000,00
- Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	18.900.000,00	196.925.000,00
- Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	183.450.000,00	361.125.000,00
- Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.470.884.000,00	374.775.500,00
- Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	183.500.000,00	183.050.000,00
- Beban Pakaian Teknik	16.844.200,00	130.350.000,00
- Beban Pakaian Pelatihan Kerja	13.508.000,00	46.080.000,00
- Beban Pakaian Adat Daerah	349.350.000,00	262.300.000,00
- Beban Pakaian Batik Tradisional	1.490.823.500,00	1.080.848.500,00
- Beban Pakaian Olahraga	293.037.500,00	369.360.800,00
- Beban Pakaian Paskibraka	57.750.000,00	40.600.000,00
- Beban Pakaian Jas/Safari	18.625.000,00	68.385.000,00
b. Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	42.825.000,00
- Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	0,00	42.825.000,00
c. Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	4.759.354.030,80	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	6.080.000,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak	887.840,00	0,00





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
Bermotor Angkutan		
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin	2.735.000,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	1.000.000,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	888.000,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	33.205.000,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	212.941.036,02	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	3.823.872.758,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	152.382.490,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	7.790.000,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	47.710.390,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	6.575.000,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	41.760.000,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	42.790.300,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	12.000.000,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	51.850.000,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	26.640.000,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	8.109.750,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	1.665.000,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	16.500.000,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	2.748.100,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	1.532.530,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan	49.999,00	0,00





## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan		
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	1.465.000,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	41.301.790,50	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	557.500,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	1.000.000,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	83.357.049,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	4.100.000,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.430.930,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	6.816.000,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	7.484.000,28	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Baju Pengaman	950.000,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Masker	7.500.000,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	15.159.000,00	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	1.880.000,00	0,00
- Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.611.958,00	0,00
- Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	34.538.260,00	0,00
- Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	12.000.000,00	0,00
- Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	12.989.350,00	0,00
- Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	10.500.000,00	0,00
<b>B. Beban Jasa</b>	<b>474.206.011.036,14</b>	<b>383.290.559.960,85</b>
Beban Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Jasa Kantor	420.279.809.425,00	351.202.734.941,05
- Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.575.228.355,00	3.729.097.922,05
- Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.707.250.600,00	10.146.655.000,00
- Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.650.600.000,00	929.100.000,00
- Beban Honorarium Rohaniwan	7.400.000,00	4.700.000,00





## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
- Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	194.800.000,00	171.600.000,00
- Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	500.000,00	392.560.000,00
- Beban Jasa Tenaga Pendidikan	4.841.550.000,00	180.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.975.289.292,00	5.884.638.552,00
- Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	97.650.000,00	99.900.000,00
- Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	45.510.000.000,00	27.978.750.000,00
- Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.263.600.000,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	500.000.000,00	3.105.550.000,00
- Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	5.800.000,00
- Beban Jasa Tenaga Administrasi	130.147.500.000,00	132.462.800.000,00
- Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	6.041.000.000,00	4.869.390.000,00
- Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	69.529.250.000,00	42.796.250.000,00
- Beban Jasa Tenaga Ahli	4.000.729.037,00	2.803.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Kebersihan	3.979.748.000,00	3.935.577.000,00
- Beban Jasa Tenaga Keamanan	4.625.931.000,00	4.087.225.000,00
- Beban Jasa Tenaga Caraka	22.500.000,00	9.900.000,00
- Beban Jasa Tenaga Supir	288.000.000,00	293.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	781.450.000,00	892.250.000,00
- Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	53.200.000,00	60.050.000,00
- Beban Jasa Tata Rias	12.000.000,00	4.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.213.132.590,00	3.019.409.364,00
- Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	23.870.200,00	49.187.000,00
- Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	30.000.000,00	15.750.000,00
- Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	110.181.000,00	36.400.000,00
- Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	572.520.000,00	20.000.000,00
- Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	57.500.000,00	53.537.430,00
- Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	26.952.596,00	24.386.382,00
- Beban Jasa Kalibrasi	925.000,00	0,00
- Beban Jasa Pengolahan Sampah	60.000.000,00	0,00
- Beban Jasa Pengukuran Tanah	1.600.000,00	33.241.760,00
- Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.371.354.443,00	4.976.710.544,00
- Beban Tagihan Telepon	403.569.869,00	396.950.821,00
- Beban Tagihan Air	661.013.000,00	560.502.700,00
- Beban Tagihan Listrik	15.926.557.162,00	6.439.337.700,00
- Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.299.273.000,00	1.991.544.000,00
- Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.397.517.920,00	4.197.861.854,00
- Beban Paket/Pengiriman	24.158.000,00	275.000,00
- Beban Penambahan Daya	6.743.650,00	0,00
- Beban Registrasi/Keanggotaan	40.000.000,00	40.000.000,00
- Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	301.105.601,00	287.274.115,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
- Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	86.738.919.610,00	79.940.026.297,00
- Beban Lembur	6.207.739.500,00	4.278.546.500,00
b. Beban Iuran Jaminan/Asuransi	20.021.761.296,67	14.884.447.325,00
- Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan Bagi PBI	0,00	50.400.000,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	16.313.642.755,00	12.457.678.800,00
- Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.911.076.000,00	1.600.435.200,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	0,00	707.375.200,00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	311.270.400,00	0,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	389.088.000,00	0,00
- Beban Asuransi Barang Milik Daerah	96.684.141,67	68.558.125,00
c. Beban Sewa Tanah	21.666.666,67	8.333.333,33
- Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	21.666.666,67	8.333.333,33
d. Beban Sewa Peralatan dan Mesin	6.390.878.300,00	3.717.610.975,00
- Beban Sewa Excavator	397.118.000,00	199.370.000,00
- Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	74.000.000,00
- Beban Sewa Electric Generating Set	164.600.000,00	23.400.000,00
- Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	57.800.000,00	30.280.000,00
- Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.386.264.000,00	0,00
- Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	319.900.000,00	940.805.000,00
- Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	94.122.000,00	184.062.000,00
- Beban Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.200.000,00	0,00
- Beban Sewa Mebel	68.670.000,00	32.947.498,00
- Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	146.619.300,00	289.160.000,00
- Beban Sewa Kursi Kerja Pejabat	1.280.000,00	0,00
- Beban Sewa Kursi Tamu di Ruang Pejabat	4.500.000,00	0,00
- Beban Sewa Peralatan Studio Audio	178.450.000,00	229.162.500,00
- Beban Sewa Alat Studio Lainnya	253.000.000,00	24.000.000,00
- Beban Sewa Peralatan Umum	3.317.355.000,00	1.687.423.977,00
- Beban Sewa Peralatan Jaringan	0,00	3.000.000,00
e. Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.238.600.099,00	4.089.626.988,65
- Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.460.088.750,00	1.539.382.166,65
- Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	741.198.914,00	1.192.869.712,00
- Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum	0,00	1.292.425.110,00
- Beban Sewa Taman	37.312.435,00	40.150.000,00
- Beban Sewa Hotel	0,00	24.800.000,00
f. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	24.500.000,00	45.650.000,00
- Beban Sewa Audio Visual	0,00	19.000.000,00
- Beban Sewa Alat Musik	24.500.000,00	24.700.000,00
- Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	1.950.000,00
g. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	19.110.122.280,80	4.451.219.018,82
- Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	19.591.500,00
- Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa	19.300.000,00	19.080.240,00





## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
Desain Arsitektural		
- Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	49.783.500,00	0,00
- Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	290.559.150,00	393.354.700,00
- Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1.478.825.580,00	441.432.248,96
- Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.834.553.258,00	1.388.078.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	5.644.085.895,00	68.088.982,20
- Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrik Dalam Bangunan	372.714.690,00	0,00
- Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	0,00	7.500.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan	715.825.000,00	959.445.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	79.497.090,00	0,00
- Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	4.861.800,00	0,00
- Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	3.289.236.017,80	316.110.113,40
- Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.966.571.300,00	6.930.234,23
- Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.458.173.000,00	392.678.000,03
- Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses	0,00	19.850.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	393.671.000,00	389.880.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	15.280.000,00	0,00
- Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	49.417.000,00	0,00
- Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	447.768.000,00	0,00
- Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	29.200.000,00
h. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.982.283.680,00	2.054.751.710,00
- Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	45.396.000,00	155.624.050,00
- Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	99.828.900,00	0,00
- Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	99.719.600,00	97.963.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	50.366.000,00	0,00





## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
- Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	219.455.500,00	567.791.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.149.987.480,00	1.059.368.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00	25.425.660,00
- Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	317.530.200,00	0,00
- Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	0,00	148.580.000,00
i. Beban Beasiswa Pendidikan PNS	626.400.000,00	589.850.000,00
- Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	186.400.000,00	213.500.000,00
- Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	440.000.000,00	376.350.000,00
j. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.509.989.288,00	2.246.335.669,00
- Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.687.666.028,00	2.087.352.223,00
- Beban Bimbingan Teknis	327.618.260,00	158.983.446,00
- Beban Diklat Kepemimpinan	494.705.000,00	0,00
<b>C. Beban Pemeliharaan</b>	<b>8.300.928.029,00</b>	<b>6.736.016.595,00</b>
Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Pemeliharaan Tanah	62.534.687,00	43.410.972,00
- Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	12.703.000,00	12.703.000,00
- Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	49.831.687,00	30.707.972,00
b. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.131.033.097,00	2.544.670.400,00
- Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.000.000,00	34.190.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	5.000.000,00	0,00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.560.000,00	2.300.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	607.413.830,00	787.899.400,00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.800.000,00	14.955.355,00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	23.295.000,00	46.560.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.690.000,00	3.900.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	84.810.000,00	3.900.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	1.400.000,00	41.020.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	60.348.000,00	1.854.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	14.700.000,00	21.750.000,00



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	750.000,00	20.575.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.701.185,00	1.500.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	3.500.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	80.484.800,00	67.709.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	50.890.000,00	19.000.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	12.587.336,00	15.953.645,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	355.944.166,00	569.931.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	4.932.000,00	5.644.500,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.975.000,00	7.190.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	188.714.500,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	200.000,00	900.000,00
- Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	162.630.000,00	161.670.000,00
- Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	367.018.000,00	268.057.000,00
- Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	58.060.000,00	106.785.000,00
- Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00	200.000,00
- Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	111.525.780,00	72.040.000,00
- Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	64.155.000,00	19.044.000,00
- Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	30.113.000,00	34.335.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	0,00	19.130.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	8.050.000,00	0,00
- Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0,00	4.463.000,00
c. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.511.577.529,00	2.812.573.223,00
- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.412.608.016,00	1.816.830.173,00
- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	357.161.988,00	15.800.000,00
- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	0,00	74.038.800,00





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		
- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.065.585.725,00	0,00
- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	11.931.500,00
- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	97.297.000,00	24.013.750,00
- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	177.006.000,00	263.050.000,00
- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	401.918.800,00	538.813.000,00
- Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	68.096.000,00
d. Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.498.862.716,00	1.043.712.000,00
- Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	616.605.000,00	0,00
- Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	198.841.000,00	0,00
- Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	90.150.000,00	34.400.000,00
- Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	44.520.500,00	26.570.000,00
- Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	523.919.216,00	958.142.000,00
- Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	24.827.000,00	24.600.000,00
e. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	194.850.000,00
- Beban Pemeliharaan Aset Dalam Renovasi-Aset Dalam Renovasi-Aset Dalam Renovasi	0,00	194.850.000,00
f. Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	96.920.000,00	96.800.000,00
- Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	96.920.000,00	96.800.000,00
<b>D. Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>39.120.957.492,00</b>	<b>34.459.097.071,00</b>
Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.887.085.717,00	34.459.097.071,00
- Beban Perjalanan Dinas Biasa	18.527.045.942,00	13.728.584.277,00
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.813.820.000,00	15.385.324.939,00
- Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.957.547.393,00	3.865.617.500,00
- Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.588.672.382,00	1.479.570.355,00
b. Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	233.871.775,00	0,00
- Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	233.871.775,00	0,00
<b>E. Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>80.692.059.757,00</b>	<b>74.271.089.908,00</b>
Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
a. Beban Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	897.728.750,00	275.515.000,00
- Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	797.485.000,00	266.015.000,00
- Beban Penghargaan Atas Suatu Prestasi	52.243.750,00	9.500.000,00
- Beban Beasiswa	48.000.000,00	0,00
b. Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	79.794.331.007,00	73.995.574.908,00
- Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	67.102.966.007,00	56.163.499.908,00
- Beban Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat	12.691.365.000,00	17.832.075.000,00
<b>F. Beban Barang dan Jasa BOS</b>	<b>44.828.762.571,00</b>	<b>42.029.837.289,00</b>
Beban Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Barang dan Jasa BOS	44.828.762.571,00	42.029.837.289,00
- Beban Barang dan Jasa BOS	44.828.762.571,00	42.029.837.289,00
<b>G. Beban Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>49.912.182.036,70</b>	<b>40.776.666.121,33</b>
Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Barang dan Jasa BLUD	49.912.182.036,70	40.776.666.121,33
- Beban Barang dan Jasa BLUD	49.912.182.036,70	40.776.666.121,33
<b>5.4.2.1.3. BEBAN BUNGA</b>	<b>8.753.140.284,00</b>	<b>10.227.071.826,40</b>
Beban Bunga Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>A. Beban Bunga Utang Kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>8.753.140.284,00</b>	<b>9.405.821.826,40</b>
Beban Bunga Utang Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Bunga Utang Kepada Pemerintah Pusat	8.753.140.284,00	9.405.821.826,40
- Beban Bunga Utang Kepada Pemerintah Pusat Atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	8.753.140.284,00	9.405.821.826,40
<b>B. Beban Bunga Utang Atas Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)</b>	<b>0,00</b>	<b>821.250.000,00</b>
Beban Bunga Utang Atas Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Bunga Utang Atas Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	0,00	821.250.000,00
- Beban Bunga Utang Atas Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	0,00	821.250.000,00
<b>5.4.2.1.4. BEBAN SUBSIDI</b>	<b>1.217.423.860,00</b>	<b>2.208.574.500,00</b>
Beban Subsidi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>A. Beban Subsidi Kepada BUMN</b>	<b>1.217.423.860,00</b>	<b>2.046.574.500,00</b>
Beban Subsidi Kepada BUMN Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Subsidi Kepada BUMN	1.217.423.860,00	2.046.574.500,00
- Beban Subsidi Kepada BUMN	1.217.423.860,00	2.046.574.500,00
<b>B. Beban Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000.000,00</b>
Beban Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
a. Beban Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	162.000.000,00
- Beban Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	162.000.000,00
<b>5.4.2.1.5. BEBAN HIBAH</b>	<b>104.606.862.290,00</b>	<b>85.266.551.357,00</b>
Beban Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>A. Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>6.033.028.738,00</b>	<b>3.399.431.704,00</b>
Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	6.033.028.738,00	3.399.431.704,00
- Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	6.033.028.738,00	3.399.431.704,00
<b>B. Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>67.198.835.552,00</b>	<b>51.696.998.000,00</b>
Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	49.152.561.186,00	36.537.110.000,00
- Beban Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	49.009.986.186,00	35.688.810.000,00
- Beban Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	142.575.000,00	848.300.000,00
b. Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.018.674.366,00	15.159.888.000,00
- Beban Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.018.674.366,00	15.159.888.000,00
c. Beban Hibah Barang Kepada Koperasi	27.600.000,00	0,00
- Beban Hibah Barang Kepada Koperasi	27.600.000,00	0,00
<b>C. Beban Hibah Dana Bos</b>	<b>29.646.600.000,00</b>	<b>28.858.514.653,00</b>
Beban Hibah Dana Bos Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	29.646.600.000,00	28.858.514.653,00
- Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	29.646.600.000,00	28.858.514.653,00
<b>D. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</b>	<b>1.728.398.000,00</b>	<b>1.311.607.000,00</b>
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.728.398.000,00	1.311.607.000,00
- Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.728.398.000,00	1.311.607.000,00
<b>5.4.2.1.6. BEBAN BANTUAN SOSIAL</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>72.600.000,00</b>
Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>A. Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600.000,00</b>



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	0,00	72.600.000,00
- Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	0,00	72.600.000,00
<b>B. Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Keluarga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Keluarga Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Keluarga	0,00	0,00
- Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Keluarga	0,00	0,00
<b>C. Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	47.000.000,00	0,00
- Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	47.000.000,00	0,00
<b>5.4.2.1.7. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG</b>	<b>155.631.563,07</b>	<b>53.332.239.645,56</b>
Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>A. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah</b>	<b>43.364.809,00</b>	<b>53.017.023.301,56</b>
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	191.269,00	0,00
- Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	191.269,00	0,00
b. Beban Penyisihan Pajak Restoran	34.530.572,00	
- Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	34.530.572,00	0,00
c. Beban Penyisihan Pajak Hiburan	131.673,00	0,00
- Beban Penyisihan Piutang Pajak Tontonan Film	131.673,00	0,00
d. Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	702.143,00	0,00
- Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	702.143,00	0,00
e. Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	650.702,00	0,00
- Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	650.702,00	0,00
f. Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.158.450,00	0,00
- Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	7.158.450,00	0,00
h. Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	53.017.023.301,56
- Beban Penyisihan Piutang PBBP2	0,00	53.017.023.301,56



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
<b>B. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>112.266.754,07</b>	<b>145.216.344,00</b>
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00	19.564.344,00
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	3.322.000,00
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	16.242.344,00
b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	108.531.700,75	125.652.000,00
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	108.531.700,75	72.564.000,00
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	53.088.000,00
c. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.735.053,32	0,00
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.735.053,32	0,00
<b>C. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000.000,00</b>
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	0,00	170.000.000,00
- Beban Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD	0,00	170.000.000,00
<b>5.4.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>230.991.509.971,59</b>	<b>245.444.652.416,97</b>
Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>5.4.2.2.1. BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>47.117.627.027,67</b>	<b>43.985.772.785,26</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>A. Beban Penyusutan Alat Besar</b>	<b>734.068.855,44</b>	<b>1.307.141.484,64</b>
Beban Penyusutan Alat Besar Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Alat Besar Darat	430.999.420,64	1.020.014.562,94
- Beban Penyusutan Tractor	1.872.800,00	1.872.800,00
- Beban Penyusutan Grader	0,00	299.200.000,00
- Beban Penyusutan Excavator	428.708.049,21	593.408.049,21
- Beban Penyusutan Compacting Equipment	0,00	60.000.000,00
- Beban Penyusutan Mesin Proses	0,00	7.274.999,99
- Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	418.571,43	58.258.713,74
b. Beban Penyusutan Alat Bantu	303.069.434,80	287.126.921,70
- Beban Penyusutan Compressor	0,00	500.000,00
- Beban Penyusutan Electric Generating Set	262.506.186,67	264.979.964,38
- Beban Penyusutan Pompa	40.563.248,13	21.646.957,32
<b>B. Beban Penyusutan Alat Angkutan</b>	<b>12.108.798.620,97</b>	<b>12.798.982.128,22</b>
Beban Penyusutan Alat Angkutan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	11.568.484.974,18	12.418.811.598,29
- Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	45.213.800,00	78.682.967,50
- Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	3.545.100.138,51	3.885.023.842,06
- Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.862.197.371,01	2.277.026.156,85



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
- Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	593.137.305,74	282.712.172,06
- Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	191.472.445,95	221.788.635,01
- Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus	5.331.209.412,97	5.546.504.705,77
- Beban Penyusutan Alat Angkutan Kereta Rel	154.500,00	0,00
- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	127.073.119,04
b. Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	540.313.646,79	380.170.529,93
- Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	246.557.986,79	81.254.526,18
- Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	154.500,00
- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	293.755.660,00	298.761.503,75
<b>C. Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>447.245.140,43</b>	<b>539.964.468,44</b>
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	39.561.287,99	143.966.369,08
- Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Fondasi	9.927.599,16	113.822.513,58
- Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam yang Transportabel (Berpindah)	70.405,50	0,00
- Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu	11.089.950,00	12.243.855,50
- Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Khusus	573.333,33	0,00
- Beban Penyusutan Peralatan Las	17.900.000,00	17.900.000,00
b. Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	121.502.313,84	200.480.927,67
- Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik	100.000.463,84	200.000.927,67
- Beban Penyusutan Perkakas Standar (Standard Tools)	0,00	480.000,00
- Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kerja	750.000,00	0,00
- Beban Penyusutan Peralatan Bengkel Khusus Peladam	4.276.850,00	0,00
- Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	16.475.000,00	0,00
c. Beban Penyusutan Alat Ukur	286.181.538,60	195.517.171,69
- Beban Penyusutan Alat Ukur Universal	47.205.650,30	51.238.283,62
- Beban Penyusutan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	0,00	9.975.000,00
- Beban Penyusutan Alat Kalibrasi	0,00	11.596.000,00
- Beban Penyusutan Oscilloscope	11.596.000,00	0,00
- Beban Penyusutan Alat Ukur/Pembanding	97.662.950,00	97.266.950,00
- Beban Penyusutan Alat Ukur Lain-Lain	1.792.340,00	1.551.380,00
- Beban Penyusutan Alat Timbangan/Biara	1.070.260,00	2.078.225,00
- Beban Penyusutan Takaran Lainnya	0,00	20.792.239,72
- Beban Penyusutan Specific Set	124.753.438,30	0,00
- Beban Penyusutan Alat Pengukur Keadaan Alam	2.100.900,00	0,00
- Beban Penyusutan Alat Ukur Lainnya	0,00	1.019.093,35
<b>D. Beban Penyusutan Alat Pertanian</b>	<b>229.592.675,01</b>	<b>220.591.338,10</b>
Beban Penyusutan Alat Pertanian Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Alat Pengolahan	229.592.675,01	220.591.338,10



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
- Beban Penyusutan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	24.211.000,00	22.937.000,00
- Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	6.860.416,68	2.809.821,43
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian	4.219.658,33	445.416,67
- Beban Penyusutan Alat-Alat Peternakan	194.301.600,00	194.301.600,00
- Beban Penyusutan Alat Pengolahan Lainnya	0,00	97.500,00
<b>E. Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>9.984.244.140,99</b>	<b>9.011.207.817,51</b>
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Alat Kantor	3.000.051.595,21	1.761.246.081,96
- Beban Penyusutan Mesin Ketik	5.585.000,00	7.634.166,67
- Beban Penyusutan Mesin Hitung/Mesin Jumlah	34.068.022,60	20.720.852,97
- Beban Penyusutan Alat Reproduksi (Penggandaan)	14.324.346,00	7.840.416,67
- Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.239.425.763,99	645.359.638,55
- Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	1.706.648.462,62	1.079.691.007,10
b. Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	6.773.956.272,88	6.951.002.168,99
- Beban Penyusutan Mebel	3.893.885.117,53	2.431.038.250,10
- Beban Penyusutan Alat Ukur Pengukur Waktu	484.000,00	107.916,67
- Beban Penyusutan Alat Pembersih	68.110.384,87	136.291.005,94
- Beban Penyusutan Alat Pendingin	1.231.642.429,24	923.884.064,15
- Beban Penyusutan Alat Dapur	63.782.843,35	97.992.959,76
- Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.448.559.047,89	3.297.462.022,37
- Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	67.492.450,00	64.225.950,00
c. Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	210.236.272,90	298.959.566,56
- Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	74.222.181,56	108.489.864,30
- Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat	20.158.972,41	35.902.613,42
- Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	59.137.155,85	50.433.694,23
- Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat	3.250.000,00	33.963.903,43
- Beban Penyusutan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	1.960.000,00
- Beban Penyusutan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5.181.250,00	38.700.000,00
- Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	48.286.713,08	29.509.491,18
<b>F. Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>670.418.214,77</b>	<b>586.617.564,95</b>
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Alat Studio	590.484.364,99	490.808.937,32
- Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	314.767.008,00	323.280.576,65
- Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	89.925.618,52	67.906.562,57
- Beban Penyusutan Peralatan Studio Gambar	0,00	1.290.000,00
- Beban Penyusutan Peralatan Cetak	102.393.287,60	73.921.639,66
- Beban Penyusutan Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	8.220.875,87	4.915.525,10
- Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya	75.177.575,00	19.494.633,34



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
b. Beban Penyusutan Alat Komunikasi	69.875.383,10	77.636.044,28
- Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	49.172.573,48	53.669.244,28
- Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	5.295.625,00
- Beban Penyusutan Alat Komunikasi Sosial	16.913.009,62	17.078.041,66
- Beban Penyusutan Alat-Alat Sandi	2.089.800,00	1.593.133,34
- Beban Penyusutan Alat Komunikasi Khusus	1.700.000,00	0,00
c. Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	10.058.466,68	17.514.250,00
- Beban Penyusutan Peralatan Pemancar HF/SW	800.000,00	1.039.583,33
- Beban Penyusutan Peralatan Pemancar UHF	77.500,00	0,00
- Beban Penyusutan Peralatan Antena MF/MW	0,00	695.700,00
- Beban Penyusutan Peralatan Antena VHF/FM	0,00	5.312.500,00
- Beban Penyusutan Peralatan Translator VHF/VHF	0,00	1.499.000,00
- Beban Penyusutan Feeder	4.008.333,34	4.008.333,34
- Beban Penyusutan Program Input Equipment	2.159.133,34	2.159.133,33
- Beban Penyusutan Peralatan Antena Penerima VHF	3.013.500,00	0,00
- Beban Penyusutan Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	2.800.000,00
d. Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	658.333,35
- Beban Penyusutan Alat Pengatur Telekomunikasi	0,00	658.333,35
<b>G. Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>13.381.256.523,97</b>	<b>8.560.514.285,56</b>
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Alat Kedokteran	11.744.450.319,13	8.294.464.598,86
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	1.041.119.535,42	2.935.976.384,27
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gigi	222.234.839,66	47.184.575,85
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	146.654.582,14	28.129.666,00
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah	734.349.639,77	569.229.892,45
- Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	559.844.111,63	204.486.123,76
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran THT	128.076.267,01	95.423.666,73
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran Mata	361.597.469,20	561.707.368,78
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	694.633.422,02	723.180.485,51
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran Anak	17.840.400,04	803.121,49
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran Poliklinik	157.059.300,06	2.420.000,00
- Beban Penyusutan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	59.795.809,86	107.308.920,34
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	119.176.199,17	163.876.199,18
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jantung	3.276.017.543,89	763.893.057,59
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran Radiodiagnostic	3.573.135.360,47	1.890.969.935,47
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran Patologi Anatomy	0,00	20.665.425,00
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran Radioterapi	7.200.000,00	0,00
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran Nuklir	141.666,67	0,00
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	36.156.130,16	72.312.260,08
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gawat Darurat	353.878.031,94	106.897.516,36





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran ICU	4.426.666,68	0,00
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran Lainnya	251.113.343,34	0,00
b. Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	1.636.806.204,84	266.049.686,70
- Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kepolisian	250.490.168,03	264.538.016,40
- Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.386.316.036,81	1.511.670,30
<b>H. Beban Penyusutan Alat Laboratorium</b>	<b>2.015.946.288,97</b>	<b>2.607.829.670,80</b>
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	1.605.469.111,81	2.174.818.285,86
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Penyehatan	75.000,00	0,00
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hidrokimia	180.833,17	0,00
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	243.750,00	0,00
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	54.387.668,47	54.419.861,76
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum	449.479.599,67	1.127.261.764,43
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikrobiologi	3.403.481,67	277.718,56
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia	6.175.916,82	429.250,00
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Patologi	250.634.833,40	5.776.666,67
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Immunologi	5.536.520,00	11.073.040,00
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Makanan	69.001.041,65	39.375,00
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika	169.106.626,83	37.695.047,91
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian	6.448.933,36	1.671.866,67
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	55.833,34	0,00
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Biologi Perairan	138.891.854,14	0,00
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Biologi	64.166,67	35.100.344,75
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	30.166.508,40	60.333.016,75
- Beban Penyusutan Alat Pengukur Gelombang	0,00	7.930.000,02
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lain	4.190.000,02	0,00
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pendidikan	1.021.377,53	0,00
- Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Lainnya	416.405.166,67	832.810.333,34
b. Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir	51.968.333,33	51.968.333,34
- Beban Penyusutan Laboratory Safety Equipment	51.968.333,33	51.968.333,34
c. Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah	269.676.683,09	271.035.679,81
- Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang: Bahasa Indonesia	228.496.666,75	225.234.583,35
- Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang: Matematika	8.274.500,02	4.921.249,99
- Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang: IPA Dasar	7.407.500,00	6.560.000,00
- Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang: IPA Lanjutan	11.774.651,62	8.366.991,79
- Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang: IPA Menengah	3.953.750,00	325.000,00
- Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah	0,00	100.000,00





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
Bidang:IPA Atas		
- Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang:IPS	2.509.604,67	18.909.604,67
- Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang:Keterampilan	0,00	250.000,00
- Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang:Kesenian	1.033.333,34	2.233.333,33
- Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang:Olahraga	4.932.416,69	4.134.916,68
- Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.294.260,00	0,00
d. Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	80.090.660,75	103.388.677,34
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	1.898.660,71	949.344,00
- Alat Laboratorium Kualitas Udara	51.219.666,67	102.439.333,34
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	26.972.333,37	0,00
e. Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	8.741.499,99	6.618.694,45
- Beban Penyusutan Peralatan Umum	8.741.499,99	6.612.033,34
- Beban Penyusutan Pemesinan:Painting Shop	0,00	6.661,11
<b>I. Beban Penyusutan Komputer</b>	<b>7.301.293.366,06</b>	<b>8.175.975.191,86</b>
Beban Penyusutan Komputer Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Komputer Unit	5.261.562.975,90	3.752.851.466,86
- Beban Penyusutan Komputer Jaringan	381.748.850,00	420.702.362,16
- Beban Penyusutan Personal Computer	4.875.248.188,40	3.254.295.031,74
- Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya	4.565.937,50	77.854.072,96
b. Beban Penyusutan Peralatan Komputer	2.039.730.390,16	4.423.123.725,00
- Beban Penyusutan Peralatan Mainframe	93.006.997,35	74.382.589,43
- Beban Penyusutan Peralatan Mini Computer	81.665.515,00	1.983.184.868,05
- Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	1.359.046.731,43	743.605.467,40
- Beban Penyusutan Peralatan Jaringan	414.953.861,48	1.132.247.027,08
- Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	91.057.284,90	489.703.773,04
<b>J. Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian</b>	<b>627.910,05</b>	<b>0,00</b>
Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian	627.910,05	0,00
- Beban Penyusutan Alat Pengolahan Air	627.910,05	0,00
<b>K. Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi</b>	<b>2.968.532,86</b>	<b>0,00</b>
Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	2.968.532,86	0,00
- Beban Penyusutan Elektrik	2.968.532,86	0,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
<b>L. Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja</b>	<b>51.877.850,00</b>	<b>37.783.299,80</b>
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Alat Pelindung	36.677.000,00	30.570.451,98
- Beban Penyusutan Alat Pelindung Lainnya	36.677.000,00	30.570.451,98
b. Beban Penyusutan Alat SAR	15.200.850,00	7.212.847,82
- Beban Penyusutan Alat Penolong	4.159.100,00	1.458.333,33
- Beban Penyusutan Alat Pendukung Pencarian	11.041.750,00	5.754.514,49
<b>M. Beban Penyusutan Alat Peraga</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Beban Penyusutan Alat Peraga Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	2.100.000,00	0,00
- Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	2.100.000,00	0,00
<b>N. Beban Penyusutan Rambu-Rambu</b>	<b>126.564.624,11</b>	<b>112.436.136,15</b>
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	126.564.624,11	112.436.136,15
- Beban Penyusutan Rambu Bersuar	85.274.318,77	71.145.830,81
- Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar	41.290.305,34	41.290.305,34
<b>O. Beban Penyusutan Peralatan Olahraga</b>	<b>60.624.284,04</b>	<b>26.729.399,23</b>
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	60.624.284,04	26.729.399,23
- Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Atletik	3.387.500,00	0,00
- Beban Penyusutan Peralatan Permainan	23.209.908,35	14.292.494,45
- Beban Penyusutan Peralatan Senam	23.218.542,34	10.691.666,68
- Beban Penyusutan Olahraga Lainnya	10.808.333,35	1.745.238,10
<b>5.4.2.2.2. BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>40.679.013.536,74</b>	<b>37.080.168.370,65</b>
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>A. Beban Penyusutan Bangunan Gedung</b>	<b>39.924.362.176,41</b>	<b>36.321.110.139,11</b>
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Bangunan Gedung Tempat Kerja	38.587.643.627,91	34.966.545.499,57
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	10.876.590.028,47	13.362.374.015,15
- Beban Penyusutan Bangunan Gudang	53.490.382,15	51.144.553,59
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	6.089.020,00	6.089.020,00
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Instalasi	9.880.256,05	9.880.256,05
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Laboratorium	24.647.445,72	17.425.660,00
- Beban Penyusutan Bangunan Kesehatan	2.048.026.548,72	1.640.441.560,52
- Beban Penyusutan Bangunan Oseanarium/Observatorium	3.961.940,00	3.961.940,00
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	352.521.481,49	277.028.829,92
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	199.474.534,17	238.565.177,12
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	17.858.186.255,55	14.971.118.865,08



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	343.151.443,07	476.904.303,72
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.853.396.459,37	1.257.117.644,65
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	88.220.532,40	58.373.066,60
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	9.355.708,80	9.128.051,66
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Perpustakaan	80.318.811,97	69.840.400,32
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Museum	42.176.209,08	10.544.052,27
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	31.095.092,98	2.316.658,70
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Krematorium	153.910.854,04	1.643.603.769,72
- Beban Penyusutan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	1.499.071.541,52	43.487.970,18
- Beban Penyusutan Bangunan Terbuka	3.974.480,00	0,00
- Beban Penyusutan Bangunan Industri	0,00	89.934.622,53
- Beban Penyusutan Bangunan Parkir	1.730.400,00	0,00
- Beban Penyusutan Taman	28.706.548,74	6.324.077,22
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.639.850.407,07	687.338.734,48
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	379.817.246,55	33.602.270,09
b. Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal	1.336.718.548,50	1.354.564.639,54
- Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I	522.848.842,04	523.556.930,14
- Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II	13.957.260,00	13.957.260,00
- Beban Penyusutan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	406.000,00	406.000,00
- Beban Penyusutan Flat/Rumah Susun	799.506.446,46	816.644.449,40
<b>B. Beban Penyusutan Monumen</b>	<b>75.268.393,90</b>	<b>115.050.536,24</b>
Beban Penyusutan Monumen Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	75.268.393,90	115.050.536,24
- Beban Penyusutan Tugu	39.614.215,30	68.104.183,17
- Beban Penyusutan Bangunan Peninggalan	25.894.428,60	46.946.353,07
- Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	9.759.750,00	0,00
<b>C. Beban Penyusutan Bangunan Menara</b>	<b>45.587.949,65</b>	<b>19.753.807,89</b>
Beban Penyusutan Bangunan Menara Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan	45.587.949,65	19.753.807,89
- Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	4.452.000,00	0,00
- Beban Penyusutan Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	0,00	4.452.000,00
- Beban Penyusutan Bangunan Menara Telekomunikasi	15.301.807,90	15.301.807,89
- Beban Penyusutan Bangunan Menara Pengawas	25.834.141,75	0,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
<b>D. Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	<b>633.795.016,78</b>	<b>624.253.887,41</b>
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	633.795.016,78	624.253.887,41
- Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi	417.701.173,76	398.356.370,85
- Beban Penyusutan Pagar	185.057.297,37	225.897.516,56
- Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Lainnya	31.036.545,65	0,00
<b>5.4.2.2.3. BEBAN PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>142.894.489.138,79</b>	<b>164.351.965.951,31</b>
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>A. Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan</b>	<b>128.455.792.180,39</b>	<b>151.164.062.933,71</b>
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Jalan	121.638.951.245,77	141.989.758.686,87
- Beban Penyusutan Jalan Nasional	1.476.117.773,05	1.446.334.283,62
- Beban Penyusutan Jalan Kabupaten	119.984.456.530,90	453.028.400,43
- Beban Penyusutan Jalan Kota	79.282.320,08	137.353.685.862,72
- Beban Penyusutan Jalan Khusus	29.116.380,19	26.108.098,02
- Beban Penyusutan Jalan Lainnya	69.978.241,55	2.710.602.042,08
b. Beban Penyusutan Jembatan	6.816.840.934,62	9.174.304.246,84
- Beban Penyusutan Jembatan Pada Jalan Nasional	6.964.447,09	0,00
- Beban Penyusutan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	0,00	70.296.711,11
- Beban Penyusutan Jembatan Pada Jalan Kota	1.263.194.766,76	3.554.494.558,97
- Beban Penyusutan Jembatan Pada Jalan Khusus	5.537.737.887,02	5.537.737.887,06
- Beban Penyusutan Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal	8.943.833,75	11.775.089,70
<b>B. Beban Penyusutan Bangunan Air</b>	<b>10.872.218.088,14</b>	<b>10.139.372.934,93</b>
Beban Penyusutan Bangunan Air Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	2.561.920.877,70	2.596.307.118,24
- Beban Penyusutan Bangunan Waduk Irigasi	1.853.537,50	0,00
- Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Irigasi	189.419.192,76	161.729.119,97
- Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Irigasi	434.059.063,48	430.000.028,99
- Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Irigasi	247.725,00	0,00
- Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Irigasi	3.151.600,00	1.140.675,00
- Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Irigasi	1.933.189.758,96	1.997.825.044,02
- Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	5.612.250,26
b. Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut	194.864.288,42	911.799.223,12
- Beban Penyusutan Saluran Pembuang Pasang Surut	2.588.014,89	2.588.014,89
- Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pasang Surut	120.397.405,40	118.902.405,40
- Beban Penyusutan Bangunan Sawah Pasang Surut	71.328.668,13	0,00
- Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	550.200,00	790.308.802,83
c. Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	739.100,00	739.100,00
- Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	739.100,00	739.100,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
d. Beban Penyusutan Bangunan Pengaman	5.581.703.467,95	4.149.643.685,29
- Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	576.108.825,00
- Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	749.146.664,33	749.146.664,33
- Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	3.945.911.735,41	2.501.991.352,11
- Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	886.645.068,21	322.396.843,85
e. Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	130.969.763,81	176.789.951,51
- Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	11.089.725,00	0,00
- Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	927.065,74	47.415.461,10
- Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	47.540.261,10	0,00
- Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	66.294.875,87	124.256.654,31
- Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	5.117.836,10	5.117.836,10
f. Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.839.364.700,71	1.842.077.011,47
- Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	164.393.912,14	164.393.912,14
- Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	944.179.356,07	944.950.051,50
- Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	6.565.641,47	6.565.641,47
- Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	706.110.115,11	721.421.006,36
- Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	18.115.675,92	4.746.400,00
g. Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	562.655.889,55	462.016.845,30
- Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	547.966.461,05	459.516.845,30
- Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Kotor	14.516.103,50	2.500.000,00
- Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Kotor	173.325,00	0,00
<b>C. Beban Penyusutan Instalasi</b>	<b>1.524.336.977,82</b>	<b>1.547.498.157,23</b>
Beban Penyusutan Instalasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	49.047.427,50	103.195.829,05
- Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dangkal	6.711.307,50	6.411.307,50
- Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	42.336.120,00	96.784.521,55
b. Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	63.938.678,75	6.427.500,00
- Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Domestik	56.933.053,75	4.527.500,00
- Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Industri	2.490.000,00	1.245.000,00
- Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Pertanian	3.910.000,00	655.000,00
- Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor Lainnya	605.625,00	0,00
c. Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	4.749.250,00	4.749.250,00
- Beban Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	4.749.250,00	4.749.250,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
d. Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	1.156.293.858,75	1.120.723.283,63
- Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	1.109.429.208,75	81.403.005,00
- Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	92.500,00	92.500,00
- Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	6.250.000,00	6.250.000,00
- Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	40.522.150,00	1.032.977.778,63
e. Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	249.148.312,82	311.242.844,55
- Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Induk	201.098.947,75	198.788.120,00
- Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	14.419.852,50	79.106.444,20
- Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	33.629.512,57	33.348.280,35
f. Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	1.159.450,00	1.159.450,00
- Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	1.159.450,00	1.159.450,00
<b>D. Beban Penyusutan Jaringan</b>	<b>2.042.141.892,44</b>	<b>1.501.031.925,44</b>
Beban Penyusutan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	590.131.842,50	8.720.900,00
- Beban Penyusutan Jaringan Pembawa	583.492.042,50	5.991.300,00
- Beban Penyusutan Jaringan Induk Distribusi	6.393.050,00	2.482.850,00
- Beban Penyusutan Jaringan Sambungan ke Rumah	246.750,00	246.750,00
b. Beban Penyusutan Jaringan Listrik	1.428.784.658,24	1.479.305.773,94
- Beban Penyusutan Jaringan Transmisi	15.520.714,00	0,00
- Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	1.398.466.569,24	1.384.698.542,16
- Beban Penyusutan Jaringan Listrik Lainnya	14.797.375,00	94.607.231,78
c. Beban Penyusutan Jaringan Telepon	11.505.251,50	11.505.251,50
- Beban Penyusutan Jaringan Telepon di atas Tanah	11.505.251,50	11.505.251,50
d. Beban Penyusutan Jaringan Gas	11.720.140,20	1.500.000,00
- Beban Penyusutan Jaringan Pipa Dinas	11.720.140,20	1.500.000,00
<b>5.4.2.2.4. BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>206.057.018,39</b>	<b>26.745.309,75</b>
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>A. Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga</b>	<b>206.057.018,39</b>	<b>26.745.309,75</b>
Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian	206.057.018,39	26.745.309,75
- Beban Penyusutan Alat Musik	206.057.018,39	26.745.309,75
<b>5.4.2.2.5. BEBAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>94.323.250,00</b>	<b>0,00</b>
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>A. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>94.323.250,00</b>	<b>0,00</b>
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	94.323.250,00	0,00
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	1.467.000,00	0,00
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	92.856.250,00	0,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
<b>5.4.2.3. BEBAN TAK TERDUGA</b>	<b>10.610.500.000,00</b>	<b>14.819.392.961,00</b>
Beban Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>5.4.2.3.1. BEBAN TAK TERDUGA</b>	<b>10.610.500.000,00</b>	<b>14.819.392.961,00</b>
Beban Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
<b>A. Beban Tak Terduga</b>	<b>10.610.500.000,00</b>	<b>14.819.392.961,00</b>
Beban Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :		
a. Beban Tak Terduga	10.610.500.000,00	14.819.392.961,00
- Beban Tak Terduga	10.610.500.000,00	14.819.392.961,00
<b>5.4.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>269.328.229.887,05</b>	<b>155.507.622.732,50</b>
<b>5.4.4. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4.5. POS LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4.5.1. Pendapatan Luar Biasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
<b>5.4.5.2. Beban Luar Biasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Beban Luar Biasa	0,00	0,00
<b>5.4.6. SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>269.328.229.887,05</b>	<b>155.507.622.732,50</b>

Untuk perbedaan LO dan LRA dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Perbedaan pada Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO terdapat pada penerimaan pembayaran Piutang Pendapatan, dimana pembayaran Piutang dicatat sebagai Pendapatan-LRA tetapi tidak dicatat sebagai Pendapatan-LO hanya menjadi pengurang saldo Piutang Pendapatan.
- b. Perbedaan pada Belanja dan Beban terdapat pada pembayaran Utang Belanja, dimana pembayaran tersebut dicatat sebagai Belanja di LRA tetapi tidak menjadi Beban di LO, juga adanya pencatatan Beban Penyusutan Aset Tetap dan Penyisihan Piutang Pendapatan pada LO yang tidak terdapat dalam LRA.
- c. Adanya Beban yang menjadi Aset, seperti : Kapitalisasi Beban Konsultan Perencana dan Beban Konsultan Pengawas, beberapa Beban Pakai Habis yang menjadi Saldo Persediaan, Aset Tetap yang menjadi Beban *Extracountabel*.
- d. LRA menggunakan *Cash Basis* sedangkan LO menggunakan *Accrual Basis*.

***Untuk perbedaan LRA dan LO secara rinci disajikan pada Lampiran 23.***



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
<b>5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>5.5.1.1. ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>2.298.572.942.203,49</b>	<b>2.174.005.496.337,21</b>
Realisasi arus kas masuk yang berasal dari Aktivitas Operasi terdiri dari :		
<b>5.5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>693.454.939.522,49</b>	<b>645.855.131.761,21</b>
Realisasi arus kas masuk yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :		
5.5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah	546.953.963.871,38	498.946.403.154,86
5.5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah	32.809.743.878,00	20.313.700.256,75
5.5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.026.667.082,08	14.566.440.743,36
5.5.1.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	102.664.564.691,03	112.028.587.606,24
<b>5.5.1.1.2. Pendapatan Transfer</b>	<b>1.605.118.002.681,00</b>	<b>1.528.150.364.576,00</b>
Realisasi arus kas masuk yang berasal dari Pendapatan Transfer terdiri dari :		
5.5.1.1.2.1. Dana Bagi Hasil	73.117.341.055,00	72.068.413.357,00
5.5.1.1.2.2. Dana Alokasi Umum	1.064.924.059.102,00	994.485.941.727,00
5.5.1.1.2.3. Dana Alokasi Khusus - Fisik	39.502.740.170,00	41.810.272.846,00
5.5.1.1.2.4. Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	297.604.782.419,00	279.398.780.386,00
5.5.1.1.2.5. Dana Insentif Daerah	5.480.252.000,00	8.791.675.000,00
5.5.1.1.2.6. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	124.488.827.935,00	131.595.281.260,00
<b>5.5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Realisasi arus kas masuk yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari :		
5.5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah	0,00	0,00
5.5.1.1.3.2. Pendapatan Lainnya	0,00	0,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp.)</b>	<b>(Rp.)</b>
<b>5.5.1.2. ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>1.955.029.092.178,31</b>	<b>1.848.868.585.726,85</b>
Realisasi arus kas keluar yang berasal dari Aktivitas Operasi terdiri dari :		
5.5.1.2.1. Belanja Pegawai	928.558.595.633,97	863.375.394.263,07
5.5.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa	901.228.134.949,34	870.981.734.775,78
5.5.1.2.3. Belanja Bunga	8.753.140.284,00	10.265.113.770,00
5.5.1.2.4. Belanja Subsidi	1.209.596.500,00	2.458.574.500,00
5.5.1.2.5. Belanja Hibah	104.622.124.811,00	82.597.051.357,00
5.5.1.2.6. Belanja Bantuan Sosial	47.000.000,00	0,00
5.5.1.2.7. Belanja Tidak Terduga	10.610.500.000,00	19.190.717.061,00
<b>5.5.1.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>343.543.850.025,18</b>	<b>325.136.910.610,36</b>
Merupakan selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari Aktivitas Operasi		
<b>5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>		
<b>5.5.2.1. ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>	<b>1.221.281.005,00</b>	<b>110.301.941,00</b>
Realisasi arus kas masuk yang berasal dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan terdiri dari :		
5.5.2.1.1. Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin	1.221.281.005,00	110.301.941,00
<b>5.5.2.2. ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>	<b>342.466.047.515,50</b>	<b>428.750.976.273,15</b>
Realisasi arus kas keluar yang berasal dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan terdiri dari :		
5.5.2.2.1. Belanja Tanah	0,00	0,00
5.5.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin	66.160.112.894,02	39.214.431.118,00
5.5.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan	60.661.295.098,00	152.562.250.068,15
5.5.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	180.801.808.230,00	212.429.244.155,00



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp.)</b>	<b>(Rp.)</b>
5.5.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya	15.065.103.833,00	20.545.050.932,00
5.5.2.2.6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	19.777.727.460,48	4.000.000.000,00
<b>5.5.2.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>	<b>(341.244.766.510,50)</b>	<b>(428.640.674.332,15)</b>
Merupakan selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		
<b>5.5.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
<b>5.5.3.1. ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>156.766.963.670,15</b>
Realisasi arus kas masuk yang berasal dari Aktivitas Pembiayaan terdiri dari :		
5.5.3.1.1. Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	147.766.963.670,15
5.5.3.1.2. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah - Dana Bergulir	0,00	0,00
5.5.3.1.3. Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
5.5.3.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	9.000.000.000,00
<b>5.5.3.2. ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>53.267.578.125,00</b>
Realisasi arus kas keluar yang berasal dari Aktivitas Pembiayaan terdiri dari :		
5.5.3.2.1. Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	0,00	53.267.578.125,00
5.5.3.2.2. Pembayaran Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
5.5.3.2.3. Pembayaran Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
<b>5.5.3.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>103.499.385.545,15</b>
Merupakan selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari Aktivitas		



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
Pembiayaan		
<b>5.5.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>		
<b>5.5.4.1. ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>	<b>127.910.346.287,00</b>	<b>131.259.180.623,00</b>
5.5.4.1.1. Realisasi arus kas masuk yang berasal dari Aktivitas Non Anggaran merupakan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	127.910.346.287,00	131.259.180.623,00
<b>5.5.4.2. ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>	<b>127.910.346.287,00</b>	<b>131.259.180.623,00</b>
5.5.4.2.1. Realisasi arus kas keluar yang berasal dari Aktivitas Non Anggaran merupakan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	127.910.346.287,00	131.259.180.623,00
<b>5.5.4.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Merupakan selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari Aktivitas Non Anggaran		
<b>5.5.5. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS</b>	<b>2.299.083.514,68</b>	<b>(4.378.176,64)</b>
<b>5.5.6. SALDO AWAL KAS di BUD dan BENDAHARA PENGELUARAN</b>	<b>89.907.975,64</b>	<b>515.710.919,89</b>
<b>5.5.7. SALDO AWAL KAS di BLUD dan BOS</b>	<b>15.506.583.268,26</b>	<b>15.085.158.500,65</b>
<b>5.5.8. SALDO AKHIR KAS di BUD, BENDAHARA PENGELUARAN, BLUD dan BOS</b>	<b>17.895.574.758,58</b>	<b>15.596.491.243,90</b>
Saldo Akhir Kas terdiri dari :		
5.5.8.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	116.827.672,00	375.169,00
5.5.8.2. Kas BLUD	14.315.238.209,06	15.506.583.268,26
5.5.8.3. Kas BOK	3.315.237.221,00	0,00
5.5.8.4. Kas BOS	0,00	0,00
5.5.8.5. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
5.5.8.6. Kas Lainnya	117.040.000,00	208.448.071,00
5.5.8.7. Kas di BUD	148.271.656,52	89.532.806,64



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
5.6.1. EKUITAS AWAL	5.882.911.016.596,15	4.893.226.129.763,67
5.6.2. SURPLUS/DEFISIT - LO	269.328.229.887,05	155.507.622.732,50
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :</b>		
5.6.3. Koreksi Ekuitas - Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
5.6.4. Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
5.6.5. Koreksi Ekuitas - Piutang Pajak Daerah	(1.454.983.925,00)	(1.455.903.709,08)
5.6.6. Koreksi Ekuitas - Piutang Retribusi Daerah	(210.957.494,00)	(212.511.420,00)
5.6.7. Koreksi Ekuitas - Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
5.6.8. Koreksi Ekuitas - Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	8.714.681.131,40	(1.062.343.907,00)
5.6.9. Koreksi Ekuitas - Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
5.6.10. Koreksi Ekuitas - Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
5.6.11. Koreksi Ekuitas - Piutang Lainnya	0,00	0,00
5.6.12. Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	13.522.883.353,50	553.401.119,00
5.6.13. Koreksi Ekuitas - Beban Dibayar Dimuka	900,00	0,00
5.6.14. Koreksi Ekuitas - Persediaan	(1.027.450.911,00)	0,00
5.6.15. Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang Non Permanen	(8.779.278,35)	5.998.567,18
5.6.16. Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang Permanen	(52.262.889.140,40)	(32.393.411.881,58)
5.6.17. Koreksi Ekuitas - Tanah	1.398.652.087,00	797.760.774.000,00
5.6.18. Koreksi Ekuitas - Peralatan dan Mesin	(19.783.222.672,28)	(118.012.188,52)
5.6.19. Koreksi Ekuitas - Gedung dan Bangunan	39.877.483.501,82	(26.085.116.342,68)
5.6.20. Koreksi Ekuitas - Jalan, Jaringan dan Irigasi	(23.187.574.526,70)	(127.527.776,33)
5.6.21. Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Lainnya	0,00	88.486.220,00
5.6.22. Koreksi Ekuitas - Konstruksi Dalam Pengerjaan	(10.677.091.413,51)	(9.657.273.778,13)
5.6.23. Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan	17.098.579.008,22	50.355.552.572,62



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp.)</b>	<b>(Rp.)</b>
5.6.24. Koreksi Ekuitas - Dana Cadangan	0,00	0,00
5.6.25. Koreksi Ekuitas - Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
5.6.26. Koreksi Ekuitas - Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
5.6.27. Koreksi Ekuitas - Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
5.6.28. Koreksi Ekuitas - Aset Lain-Lain	(153.057.992,00)	(968.738.760,00)
5.6.29. Koreksi Ekuitas - Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(693.666.250,00)	0,00
5.6.30. Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
5.6.31. Koreksi Ekuitas - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
5.6.32. Koreksi Ekuitas - Utang Bunga	0,00	0,00
5.6.33. Koreksi Ekuitas - Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
5.6.34. Koreksi Ekuitas - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
5.6.35. Koreksi Ekuitas - Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
5.6.36. Koreksi Ekuitas - Utang Belanja	(137.257.832,11)	61.865.215.484,50
5.6.37. Koreksi Ekuitas - Utang Jangka Pendek Lainnya	17.247.244.653,35	(4.371.324.100,00)
5.6.38. Koreksi Ekuitas - Utang Kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
5.6.39. Koreksi Ekuitas - Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
5.6.40. Koreksi Ekuitas - Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
5.6.41. Koreksi Ekuitas - Utang Kepada Masyarakat	0,00	0,00
5.6.42. EQUITAS AKHIR	6.140.501.839.683,14	5.882.911.016.596,15



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2023 adalah media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2023 telah disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2023 khususnya Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, dilakukan melalui proses konversi terhadap kode rekening anggaran. Karena Struktur APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2023 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah pula dilakukan pemuktahiran melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Demikian penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 sebagai amanat dari Peraturan Perundangan Pengelolaan Keuangan dan sebagai wujud nyata amanat dari kewajiban kepala daerah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Laporan keuangan daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 sebagai perwujudan keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Oleh karena itu Laporan keuangan ini sebagai tolok ukur evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Sangat disadari bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan dalam penyusunan laporan keuangan. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan penyusunan laporan keuangan pada tahun-tahun yang akan datang.

**WALI KOTA BANDAR LAMPUNG**  
  
**EVA DWIANA**